PBNU

PERJUANGAN BESAR NAHDLATUL ULAMA

YAHYA CHOLIL STAQUF

PBNU

PERJUANGAN BESAR NAHDLATUL ULAMA

Tajdid Jam'iyyah untuk Khidmah Millenial

Yahya Cholil Staquf

PBNU

PERJUANGAN BESAR NAHDLATUL ULAMA

Tajdid Jam'iyyah untuk Khidmah Millenial

Penulis:
Yahya Cholil Staquf

Pemeriksa Aksara:
Wibowo Prasetyo
Muhammad Za'im Cholil Mumtaz

Sampul & Tata Letak:
Joe Runtiko
Rizal Wijaya

Pra-Cetak:
Ahmad Jamroni

Dokumentasi:
Ahmad Hanan

Penerbit:
Mata Air Publishing
Jl. K.H. Bisri Mustofa 4
Rembang - Jawa Tengah

Cetakan 2020

Daftar Isi

Manifesto

dalam dunia fana yang ganas ini
apakah engkau akan memperjuangkan sendiri nasibmu
atau mendaulat orang yang janji berjuang untukmu?

dalam lautan polo dan pantat
apakah kalian akan saling bergandeng tangan dan berbagi
dalam susah-payah
demi kesetiaan pada martabat
atau ramai-ramai menadahkan tangan
berebut sedekah dan belas kasihan?

di tengah kepungan rampok
apakah kalian kuat sengsara lebih lama
berkorban lebih banyak
atas nama harga diri
atau lebih suka selamat ala kadarnya
membiarkan rampok mengambil yang mereka suka
asal masih ada untuk kalian sisanya?

di depan cermin nanti
apakah kau berani
memandang wajahmu
atau melengos
supaya lebih nyenyak tidurmu?

apakah buyut-canggahmu nanti
adalah budak-budak yang mengutukmu
atau orang-orang gagah yang menangis
mengenang penderitaan dan jasa-jasamu?

Rembang, 6 Juli 2014
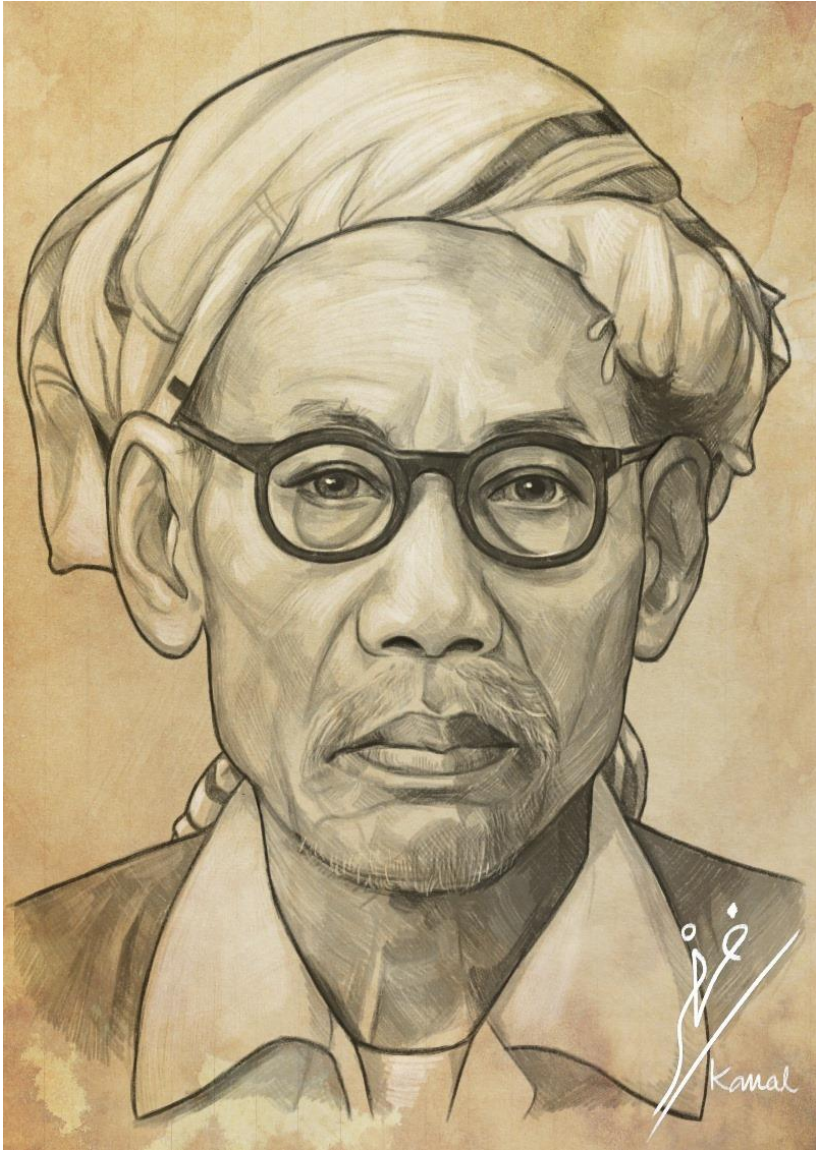
ABSTRAKSI

Nahdlatul Ulama dilahirkan dengan mengusung cita-cita peradaban, yaitu mewujudkan tata dunia yang harmonis dan adil berdasarkan akhlaqul karimah dan penghormatan terhadap kesetaraan martabat diantara sesama manusia. Strategi menuju cita-cita itu diawali dengan konsolidasi basis, yaitu memberdayakan jama'ah (komunitas) sebagai kekuatan kultural untuk merawat nilai-nilai luhur dan NKRI sebagai titik-tolak sosial-politik untuk terlibat dalam pergulatan antar bangsa. Selanjutnya, keseluruhan gerak NU harus koheren (padu) dalam nalar strategi dan pengorganisasiannya, dari tingkat lokal sampai tingkat global.

Konstruksi organisasi NU yang ada saat ini belum cukup mengalami penyesuaian sehingga formatnya relatif tidak berubah sejak 1952. Hal ini mengakibatkan NU cenderung semakin kedodoran dalam menanggapi masalah-masalah yang datang semakin deras dan terancam menjadi irrelevan. Oleh sebab itu diperlukan transformasi konstruksi organisasi agar lebih cocok dengan konteks realitas kekinian dan masa depan. Konstruksi organisasi itu meliputi pola konfigurasi agenda-agenda yang ditetapkan, pola hubungan antara jam'iyyah dengan jama'ah, struktur pengorganisasian dalam pelaksanaan agenda-agenda, mekanisme-mekanisme rekrutmen kepemimpinan dan kualifikasi personalia kepemimpinan dan pelaksana program.

Pada dasarnya, format ideal bagi konstruksi organisasi NU adalah format pemerintahan dengan fungsi-fungsi utama: menyediakan pelayanan bagi warga, menetapkan dan menerapkan regulasi agar

pelayanan dapat diakses secara adil dan transparan, dan mobilisasi sumberdaya-sumberdaya serta redistribusinya bagi instrumen-instrumen organisasi dan warga. Untuk mencapai format ideal itu diperlukan bukan hanya transformasi struktur dan format manajemen, tapi juga transformasi pola pikir (mindset) dan mentalitas.

Tanggung jawab dan tantangan NU di masa depan yang semakin luas dan beragam menuntut inklusivikasi khidmah dan kebangkitan dalam tiga jalur pergulatan, yaitu kebangkitan intelektualisme, kebangkitan teknokrasi dan kebangkitan kewirausahaan.

BAB I
ISLAM DI TENGAH DUNIA YANG BERUBAH

Memetakan Perubahan

Situbondo, 1984. Kiai Achmad Shiddiq, yang baru terpilih sebagai Rais 'Aam PBNU, menyampaikan dari atas mimbar sebuah pernyataan yang akan melekat selamanya di dalam ingatan para Nahdliyin: Kita harus menegakkan tidak hanya Ukhuwah Islamiyah, tetapi juga Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah.

Semua yang hadir tahu bahwa setiap orang Islam harus mengamalkan Ukhuwah Islamiyah, atau menegakkan persaudaraan dengan sesama muslim atau yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Itu berlaku di masa lalu, di masa sekarang, dan sampai kapan pun. Orang juga tahu bahwa sebagai warga negara, tiap-tiap orang harus menegakkan Ukhuwah Wathoniyah, yakni rasa persaudaraan satu sama lain sebagai warga satu bangsa. Tetapi Ukhuwah Basyariyah?

Tidak banyak yang tahu isyarat apa yang sedang disampaikan oleh K.H. Achmad Shiddiq dengan memunculkan rumusan tersebut dan apa urgensinya dalam konteks waktu itu. Baru sekarang, setelah berjarak 35 tahun, kita bisa dengan jernih menyadari betapa pentingnya pernyataan tersebut. Ia seperti peringatan dini tentang sesuatu, sebuah alarm yang meminta kita waspada, yang dibunyikan bahkan sebelum kebanyakan dari kita mampu menyadari gejala-gejalanya.

Presiden Soeharto menyalami KH. Abdurrahman Wahid, disaksikan oleh KH. As'ad Syamsul Arifin dan KH. Achmad Siddiq

Menurut K.H. Achmad Shiddiq, yang paling mendasar dari ketiga ukhuwah itu adalah Ukhuwah Basyariyah, atau rasa persaudaraan dan solidaritas sebagai sesama manusia.

Pernyataan itu tidak hanya benar, tetapi ia juga memberi kita pandangan dunia yang akurat untuk dijadikan pegangan dalam menempatkan diri di tengah berbagai perubahan dewasa ini. Dalam lingkup Indonesia saja, misalnya, kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan kerelaan semua warga negara untuk menegakkan Ukhuwah Basyariyah.

Benar bahwa kita harus menegakkan Ukhuwah Islamiyah, tetapi tidak mungkin Ukhuwah Islamiyah ditegakkan jika tidak dilandasi

Ukhuwah Wathoniyah. Warga NU mustahil bisa hidup rukun dengan orang Muhammadiyah sekiranya masing-masing tidak memiliki kesediaan untuk menegakkan rasa persaudaraan sebagai sesama warga negara. Selanjutnya, Ukhuwah Wathoniyah tidak mungkin terwujud jika tidak ada Ukhuwah Basyariyah. Tidak mungkin ada Ukhuwah Wathoniyah antara orang Jawa dengan orang Papua, misalnya, jika keduanya tidak saling menghargai dan saling terikat sebagai saudara sesama manusia.

Dalam kerangka ukhuwah basyariyah inilah kita akan membicarakan lebih jauh mengenai peran apa yang bisa dijalankan oleh NU, tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga pada skala global.

Banyak orang bisa menuturkan kalimat yang sekarang sudah menjadi klise: yang abadi adalah perubahan. Tetapi perubahan ke arah mana, dan bagaimana kita harus bersikap di dalam dunia yang berubah?

Saya mencatat setidaknya ada empat jenis perubahan dalam peradaban manusia, yang semuanya membutuhkan kecermatan dalam membaca fenomena dan kemampuan untuk memahami karakteristiknya masing-masing.

Yang pertama adalah perubahan peradaban yang berkenaan dengan tata politik dunia. Perubahan tata politik ini berurusan dengan dua hal, yaitu peta politik dan identitas agama. Yang kedua, perubahan dalam demografi, yaitu perubahan komposisi kependudukan. Pada masa lalu, penduduk di satu wilayah biasanya seragam, sekarang menjadi beragam.

Di Eropa, pada mulanya hampir-hampir tidak bisa ditemukan warga negara beragama Islam, tetapi sekarang penduduk muslim sudah mencapai sekitar lima sampai enam persen dari tujuh ratus juta orang. Di Amerika Serikat, jumlah warga muslimnya juga terus bertambah.

Yang ketiga, perubahan dalam standar norma. Praktik-praktik yang dianggap wajar dan baik-baik saja pada masa lalu, menjadi keliru pada masa sekarang. Perbudakan, misalnya, adalah praktik yang lazim di masa lalu dan merupakan norma yang umum di banyak masyarakat di berbagai belahan dunia. Peradaban manusia pada masa lalu menganggap perbudakan adalah bagian dari tatanan ekonomi, bagian dari gaya hidup, atau bagian dari keseharian yang wajar saja, seperti kita punya kambing. Kita mendapati gambaran ini pada kisah Spartacus, misalnya, sebuah kisah tentang perlawanan para budak yang terjadi sebelum Masehi.

Sekarang, kita tidak bisa hidup dengan meneruskan norma masa lalu; kita tidak mungkin memelihara budak dan memperlakukannya dengan cara orang-orang di masa lalu memperlakukan budak mereka. Perbudakan adalah satu contoh paling gamblang tentang bagaimana peradaban manusia mengembangkan standar norma baru yang menyingkirkan standar norma lama. Ada banyak lagi tindakan yang dulu dianggap kejahatan atau menyimpang dari norma, tetapi sekarang menjadi wajar, dan sebaliknya.

Yang keempat, perubahan karena globalisasi. Globalisasi membuat batas-batas, baik fisik maupun non fisik, menjadi tidak relevan dan tidak bisa menghalangi interaksi antarmanusia. Globalisasi adalah fenomena besar dalam perubahan peradaban, yang tidak bisa dibendung sama sekali.

Tentang keempat perubahan peradaban itu, kita akan membicarakannya lebih rinci sebagai berikut:

Perubahan Tata Politik Dunia

Dulu, pada abad pertengahan akhir hingga meletusnya Perang Dunia Pertama, ada satu imperium besar, yaitu Kekhalifahan Turki Usmani, yang menjadi representasi dunia Islam. Wilayah di luar Turki Usmani, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, adalah dunia non Islam,

atau setidak-tidaknya diragukan keberadaannya sebagai bagian dari dunia Islam, sebab wilayah ini bukan bagian dari Turki Usmani.

Ketika para habaib di Hadramaut, atau sebetulnya sejak mereka berada di Hijaz, dikejar-kejar oleh orang-orang Wahabi dan dibunuhi. Banyak di antara mereka yang ingin lari ke Nusantara. Negeri ini tidak asing bagi mereka, karena pada waktu itu banyak santri Nusantara yang belajar di Mekkah.

Masalahnya, Nusantara berada di bawah pemerintahan Belanda, yang dalam pandangan Islam adalah penguasa kafir. Pandangan fikih waktu itu mengharamkan orang Islam berhijrah ke Darul Kufr.

Untuk menjawab persoalan ini, Sayid Abdurrahman Ba'alawi, seorang ulama mazhab Syafi'i dari Hadramaut, Yaman, kemudian menuliskan fatwanya di dalam Bughyatul Mustarsyidin, sebuah kitab fikih yang menghimpun berbagai fatwa dari para ulama mazhab Syafi'i. Menurut sang ulama, orang Islam diperbolehkan hijrah ke Hindia Belanda.

Fatwa yang menghalalkan hijrah ke Hindia Belanda ini didasari laporan bahwa wilayah Nusantara, meskipun dikuasai oleh Belanda, tidak termasuk Darul Kufr. Nusantara tetap berstatus Darul Islam, karena sebelumnya daerah itu pernah mempunyai penguasa-penguasa Islam. Dan Darul Islam itu adalah status yang tidak bisa berubah sampai kiamat.

Poin penting dari kasus ini, tidak ada pengakuan mutlak pada waktu itu bahwa Nusantara adalah bagian dari dunia Islam, sebab wilayah ini bukan bagian dari Turki Usmani.

Identitas keagamaan adalah hal yang lazim melekat pada negara-negara di masa lalu. Hampir semua negara atau kerajaan yang ada di dunia ini memakai identitas agama. Perang-perang yang terjadi pada masa itu hampir selalu diberi alasan agama. Turki Usmani jelas Islam. Kerajaan-kerajaan lain di Eropa terbagi antara Kristen dan Katolik, dengan varian masing-masing. Prusia, yang sekarang menjadi

Hanja untuk latihan warga N.U.

SURAT SUARA

Pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat

DJAWA-TIMUR TAHUN 1955

Hanja untuk latihan warga N.U.
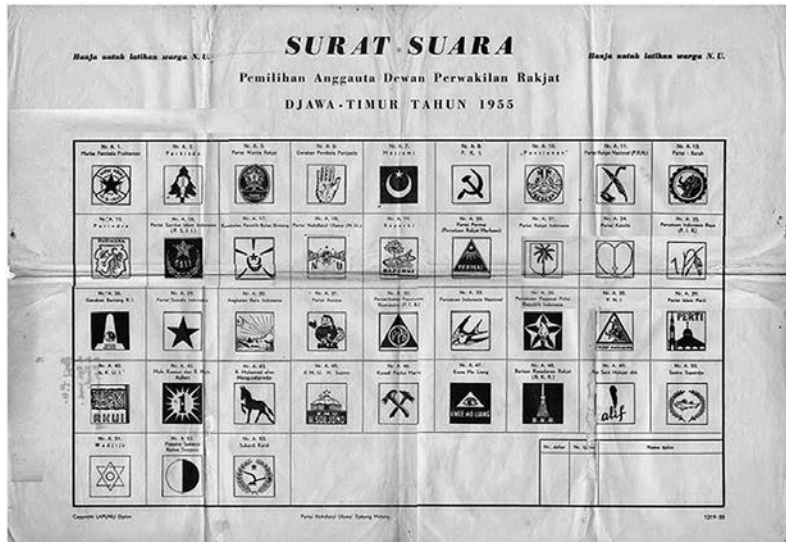
Surat suara pemilihan anggota DPR Jawa Timur tahun 1955

Jerman, mempunyai identitas Katolik. Belanda adalah kerajaan Kristen Protestan. Inggris beridentitas Kristen Anglikan, dengan raja atau ratunya berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi keagamaan. Italia beridentitas Katolik.

Satu-satunya negara yang dikenal tidak menggunakan identitas agama adalah Amerika Serikat, sebuah negara yang didirikan pada abad ke-18. Warganya datang dari berbagai latar belakang. Meskipun jumlah orang Kristen Protestan paling dominan di sana, tetapi identitas keagamaan tidak relevan untuk diberlakukan.

Namun Amerika bukan yang pertama. Empat abad sebelum Amerika, sudah pernah ada kerajaan yang tidak menggunakan identitas agama, yaitu sebuah kerajaan di Nusantara yang bernama

Majapahit. Di kerajaan ini berlaku semboyan Bhinneka Tunggal Ika—semboyan yang kelak diteruskan pemakaiannya oleh Republik Indonesia.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika membuktikan bahwa Majapahit menolak menjadikan agama sebagai identitas politik kerajaan. Tentu ada suasana Hindu dan Buddha, dua agama yang dianut oleh masyarakat Majapahit, tetapi tidak ada agama resmi kerajaan. Dan karena identitas agama tidak menjadi keputusan politik kerajaan, maka tidak ada kewajiban bagi penduduk Majapahit untuk mengikuti agama negara. Mereka berhak menganut agama yang mereka yakini.

Hak atas kebebasan beragama ini tidak mungkin kita temukan di negara-negara yang menggunakan agama sebagai identitas politik. Di negara dengan agama sebagai identitas, barangsiapa tidak mau mengikuti agama negara, ia akan diusir, dibunuh, atau dijadikan warga negara kelas dua. Orang Protestan, misalnya, tidak bisa menjadi warga negara yang setara di negara Prusia, sebab negara itu adalah negara Katolik. Orang Katolik tidak bisa menjadi warga negara yang memliliki kesetaraan hak di negara Belanda, karena negara itu beridentitas Protestan.

Masalah yang ditimbulkan oleh diberlakukannya agama sebagai identitas negara ini bisa berlarut-larut. Inggris, yang beridentitas Kristen Anglikan, harus menghadapi konflik berkepanjangan dengan rakyat Irlandia Utara yang mempertahankan identitas Katolik mereka dan ingin memerdekakan diri.

Di Turki Usmani pun situasinya begitu. Orang-orang non muslim tidak mungkin menjadi warga negara kelas satu di wilayah mana pun di dalam kekhalifahan itu. Mereka yang bukan Islam harus masuk Islam jika ingin mendapatkan kesetaraan hak sebagai warga negara. Alternatifnya, mereka harus meminta dzimmah kepada imam, dalam hal ini adalah Khalifah Turki Usmani, jika mereka terus bertahan menganut agama mereka. Jika imam mengabulkan permintaan

mereka, status mereka menjadi kafir dzimmi, yaitu orang kafir yang dilindungi sejauh mereka mematuhi kewajiban yang ditetapkan atas mereka, antara lain membayar pajak lebih. Tetapi mereka tetap saja menjadi warga negara kelas dua.

Dalam hal terjadi peperangan dengan kelompok atau negara kafir (kafir harbi), nasib pihak yang kalah sepenuhnya tergantung kepada imam. Imam boleh memperlakukan mereka sesuai dengan keputusannya sendiri: imam boleh membunuh mereka begitu saja, atau menawan mereka untuk mendapatkan tebusan dari pihak mana pun yang mau menebus atau berminat menjadikan mereka budak.

Hukum seperti ini berlaku di mana-mana, tidak hanya di Turki Usmani yang beridentitas Islam, tetapi juga di Prusia yang Katolik. Ia berlaku juga di Belanda atas nama agama Protestan, berlaku di Inggris atas nama agama Anglikan, berlaku di India atas nama agama Hindu. Di negara Hindu, orang yang tidak beragama Hindu secara otomatis akan menjadi warga negara di luar kasta—mereka akan menempati kedudukan terendah sebagai kaum paria.

Pemandangan seperti ini tidak pernah ada di Majapahit. Kita bisa mengatakan bahwa di kerajaan ini ada kebebasan beragama. Raja Hayam Wuruk beragama Hindu, patih Gajah Mada beragama Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, ketika Islam mulai masuk ke negara tersebut, raja membiarkan saja anak-anaknya dinikahi oleh orang-orang Islam.

Sampai tiba masa keruntuhannya di awal abad keenam belas, Majapahit mempunyai kesempatan dua ratus tahun lebih untuk mengamalkan gagasan Bhinneka Tunggal Ika dan memantapkannya sebagai budaya, sebagai peradaban masyarakat di Nusantara. Hal ini setidaknya bisa menjelaskan kenapa di wilayah Nusantara orang sulit diajak mengkafir-kafirkan orang lain. Bagaimanapun, kita mewarisi budaya dan peradaban Majapahit di dalam gen kemasyarakatan kita.

Saya cenderung percaya bahwa jika tidak dibiayai besar-besaran,

sulit untuk menyulut konflik antaragama di wilayah mana pun di Nusantara ini. Jika itu sampai terjadi, kemungkinan besar memang ada yang berkepentingan untuk mengobarkannya—dengan propaganda, dengan provokasi, dan tentu saja dengan biaya besar. Kendati demikian, karena pertikaian semacam itu jauh dari budaya yang kita warisi, kita masih gampang mengupayakan rekonsiliasi sekiranya telanjur terjadi konflik. Dalam sejumlah kasus, kita berhasil membuktikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi ia sudah menjadi fondasi peradaban Nusantara.

Satu hal yang juga penting dicatat dalam tata politik dunia di masa lalu adalah soal perbatasan negara. Pada masa itu, peradaban manusia belum mengembangkan hukum yang mengatur secara definitif batas-batas negara. Dengan kata lain, belum ada rezim perbatasan. Yang disebut batas negara pada masa itu adalah sejauh jangkauan militer tiap-tiap kerajaan. Sebuah kerajaan dengan militer yang kuat akan mampu meluaskan batas-batas negara sejauh yang dikehendaki oleh pemimpinnya, dan baru akan berhenti jika ada yang berhasil menghentikan gerak ekspansi mereka.

Itu yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain. Penguasa Makedonia itu bisa memiliki dua tanduk, sebuah perumpamaan untuk kekuasaannya yang membentang luas dari barat ke timur, karena ia memiliki kekuatan militer yang mampu meluaskan jangkauannya ke mana-mana. Itu pula yang dilakukan oleh Julius Caesar dan para penguasa Romawi lainnya, sehingga negeri itu mampu membesarkan diri dari wilayah semula yang hanya sebesar kota Roma menjadi sebuah imperium lintas benua.

Selama ribuan tahun tata politik dunia berlangsung seperti itu. Tidak pernah ada dua kerajaan hidup berdampingan dalam situasi saling menghormati batas masing-masing. Jika ada dua kerajaan bertetangga, keduanya pasti akan terlibat dalam perang abadi sampai salah satu dicaplok oleh yang lainnya.

Di dalam praktek yang sudah mapan selama ribuan tahun itu, sebenarnya ada satu fragmen sejarah yang menarik dicatat, tetapi sayang ia tidak mendapatkan banyak perhatian, yaitu perjanjian perbatasan pada Perang Tabuk. Dan Rasulullah adalah pemimpin negara, pemimpin politik, yang pertama kali melakukan perjanjian perbatasan itu.

Peristiwa Perang Tabuk bermula karena adanya kabar bahwa Romawi menyiapkan pasukan besar-besaran di wilayah perbatasan untuk menyerbu wilayah orang-orang Islam. Rasulullah memutuskan untuk berangkat memimpin pasukannya melawan pasukan Romawi. Pertempuran tidak pernah terjadi. Ketegangan berakhir setelah Rasulullah membuat perjanjian dengan pihak Romawi untuk menyepakati mana batas kekuasaan Islam dan mana batas kekuasaan Romawi.

Kita melupakan fragmen sejarah yang sangat penting ini karena lebih memberi perhatian pada hal-hal lain: tentang bagaimana sebagian sahabat Nabi terlambat berangkat dan disuruh tobat, atau tentang orang-orang munafik yang enggan berangkat ke medan perang. Kita hampir tidak memberi perhatian pada perjanjian perbatasan karena ia memang bukan hal yang lazim pada masanya.

Situasi tanpa rezim perbatasan, yang membuat tidak adanya tapal batas yang definitif antarnegara, dalam segi tertentu memiliki sisi positifnya sendiri: ia memungkinkan Islam berkembang dan meluaskan pengaruhnya dalam waktu cepat.

Islam lahir di abad pertengahan awal ketika Romawi mulai melemah; imperium terbelah dua menjadi Romawi Barat, dengan Roma sebagai pusat pemerintahan, dan Romawi Timur atau Bizantium, yang berpusat di Konstantinopel. Bangsa-bangsa Jermanik memanfaatkan situasi tersebut dengan mendirikan kerajaan-kerajaan baru di wilayah kekuasaan Romawi Barat. Pada saat yang hampir bersamaan, di Afrika Utara dan Timur Tengah, kekhalifahan yang

dibangun oleh orang Islam mulai menggerogoti wilayah-wilayah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur.

Jumlah negara bertambah, pusat-pusat kekuasaan menyebar, dan tiap-tiap negara menggunakan agama sebagai identitas. Orang-orang Islam membagi dunia melalui kacamata yang simpel, yaitu bahwa dunia ini terbagi dalam dua wilayah; satu bagian adalah wilayah Islam, satu bagian lagi wilayah non Islam, dan masing-masing merupakan ancaman terhadap satu sama lain.

Tentu ada batas-batas wilayah pada tiap-tiap negara atau kerajaan, tetapi, sekali lagi, tidak ada rezim internasional yang mengatur hukum-hukum perbatasan. Di wilayah-wilayah yang dianggap perbatasan, orang membangun rubath, atau pondokan yang digunakan untuk menampung para relawan yang siap berjihad, bahu-membahu dengan kekuatan militer negara, untuk berperang melawan tentara Kristen. Kadang ada ulama yang datang ke pondokan-pondokan itu dan mengajarkan ilmunya kepada para pemuda yang siap berjihad. Dari praktek itu terbentuklah kemudian suasana pembelajaran yang mirip pesantren di Nusantara. Hanya suasananya yang agak mirip, tetapi alasan keberadaan dan model pembelajarannya berbeda dari model pesantren yang sudah ada di Nusantara pada masa pra Hindu.

Di Nusantara, pendidikan adalah sebuah "praktik populis"; ia diselenggarakan sendiri oleh rakyat, dan berada di kampung-kampung. Tidak ada pendidikan yang begitu meluas seperti pesantren di Nusantara. Begitu meluas dan begitu membumi di tengah-tengah masyarakat, sampai-sampai di suatu desa bisa ada dua-tiga pesantren dan dengan tingkat pengajaran yang tidak rendah.

Jejaknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Di Kajen, misalnya, ada sekitar 50 pesantren, dan setiap pesantren mengajarkan pendidikan sampai tingkat yang tinggi. Ini membuktikan bahwa

Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy'ari.
Foto berasal dari arsip Almarhum KH. Amir Ilyas Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, yang merupakan santri langsung dari Hadratussyaikh.

pendidikan adalah tradisi penting di Nusantara ini, dan tidak terjadi di tempat lain. Di Mesir, di Arab, Sudan, Syria, tidak ada pendidikan di kampung-kampung dengan mutu seperti di pesantren-pesantren kita. Di kampung-kampung Nusantara, para kiai mengajar para santri sampai ke tingkat ilmu yang tinggi.

Kembali ke situasi politik dunia waktu itu. Dengan latar belakang melemahnya Imperium Romawi, baik di Barat maupun di Timur, di Jazirah Arab lahir Dinasti Umayah dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Bani Umayah adalah kekhalifahan pertama Islam setelah berakhirnya masa kepemimpinan al-Khulafa ar-Rasyidun. Ia membangun stabilitas di dalam negeri dengan memperkuat pasukan militer dan dengan itu pula ia mengembangkan pengaruh sehingga kekuasannya membentang luas mencakup wilayah-wilayah dari China hingga Prancis Selatan.

Keberhasilan paling monumental dalam sejarah kekhalifahan ini adalah Ekspansi Hispania pada 711. Pasukan muslim di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad menyeberangi selat Gibraltar untuk menguasai seluruh wilayah Hispania (sekarang Iberia, yang meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit wilayah Prancis).

Diilhami oleh keberhasilan di Hispania, pemerintahan Bani Umayah kemudian meluaskan ekspansinya ke wilayah Galia. Di sini, pasukan muslim berhasil menaklukkan beberapa wilayah, tetapi ekspansi Galia tidak berjalan semulus penaklukan terhadap Hispania.

Dalam ekpansi Galia, pasukan Umayah, yang disebut Saracen oleh orang-orang Eropa, untuk pertama kalinya kalah dalam pertempuran di Poitiers, pada 732. Dua tahun setelah kekalahan itu, mereka berhasil menaklukkan kota-kota Avignon, Arles, dan Marseilles. Meskipun kota-kota itu bisa ditundukkan secara mudah oleh pasukan muslim, tetapi banyak sejarawan menganggap kekalahan di Poitiers sebagai titik balik bagi ekspansi mereka di tanah Galia.

Pada 737, pasukan Saracen dipukul mundur oleh pasukan militer Franka di bawah komando Jenderal Charles Martel. Mereka kembali ke Andalusia (Spanyol) dan gagal memantapkan pengaruh di Galia (Prancis).

Masa pemerintahan Bani Umayah berakhir pada 750 setelah Abu al-'Abbas merebut Damaskus dan menggulingkan Marwan, khalifah terakhir Bani Umayah. Abu al-'Abbas mendirikan kekhalifahan baru, Bani Abasiyah, dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, Irak. Jarak Damaskus (dekat laut) ke Baghdad (daratan) 800an km, jauhnya seperti Jakarta ke Surabaya.

Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu keturunan Bani Umayah, berhasil meloloskan diri ke Andalusia dan meneruskan pemerintahan Umayah (Umayah II) di sana. Ia memerintah di Kordoba dan membangun kota itu sebagai pusat peradaban di Eropa.

Periode ini menarik dalam sejarah peradaban Islam. Dengan keturunan Bani Umayah melanjutkan pemerintahan di Kordoba dan Bani Abasiyah membangun kejayaan di Baghdad, kedua ibukota pemerintahan Islam itu seperti saling berlomba membangun diri sebagai pusat peradaban: Kordoba di Barat, Baghdad di Timur. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di kedua kota itu. Universitas, perpustakaan, arsitektur, musik hingga rumah sakit paling maju pada zamannya ada di Kordoba dan Baghdad.

Para pemikir dan cendekiawan dari berbagai bidang keilmuan, seperti matematika, filsafat, kedokteran, kimia, geografi, dan sebagainya, begitu bergairah melakukan studi dan melahirkan karya-karya ilmiah mereka. Dalam rentang masa ini, dunia Islam melahirkan nama-nama Ibnu Rusyd, Al Kindi, Ibnu Sina, Al Khwarizmi, dan masih banyak lagi.

Ibnu Rusyd mewakili kecemerlangan Kordoba. Ia menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah, kedokteran, astronomi, fisika, fikih, dan linguistik. Oleh dunia Barat ia

dikenal sebagai "Sang Penafsir" karena dalam karya-karya filsafatnya ia banyak menafsirkan karya-karya Aristoteles. Sebagai ahli hukum dan ahli pengobatan, ia mengabdikan dirinya sebagai hakim dan dokter istana.

Al Kindi, Ibnu Sina, dan Al Khwarizmi adalah nama-nama yang mewakili kecemerlangan Baghdad. Al Kindi disebut sebagai "Bapak Filsafat Arab" dan orang yang menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan, sementara Ibnu Sina dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran modern, dan Al Khwarizmi adalah ilmuwan yang melahirkan nama aljabar dalam matematika. Kosakata algoritma yang kita kenal sekarang ini, yang menjadi landasan bagi operasi hitung, pemrosesan data, dan penalaran otomatis untuk pemrograman komputer, merupakan sebutan Latin terhadap nama Al Khawarizmi: Algoritma.

Gairah untuk membangun peradaban dan mengembangkan ilmu pengetahuan ini memiliki aspek buruknya sendiri dalam tata dunia waktu itu. Ia membuat kekhalifahan Islam mengendurkan perhatian kepada politik dan kemiliteran. Sementara seteru mereka di Eropa terus mencari jalan untuk merebut kembali Andalusia dan wilayah-wilayah Kristen lainnya yang berada di bawah kekuasaan Islam.

Pemerintahan Umayah di Kordoba runtuh lebih dulu pada 1031, setelah mengalami masa gemilang peradaban dengan pembangunan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, rumah sakit, bangunan-bangunan megah, dan sebagainya. Di puncak kejayaannya, gedung perpustakaan di sana mencapai 70 buah. Keruntuhan Bani Umayah di Andalusia itu membuat orang-orang Islam terusir secara besar-besaran dari negeri tersebut.

Di wilayah kekuasaan Bani Abasiyah, para amir penguasa wilayah satu demi satu mengangkat diri sebagai khalifah, sehingga di mana-mana muncul banyak kekhalifahan baru. Bani Abbasiyah sendiri

akhirnya melemah, dengan wilayah kekuasaan hanya di Baghdad.

Meski Baghdad melemah, secara umum Islam masih merupakan kekuatan besar dengan kekuatan yang menyebar dalam bentuk kerajaan-kerajaan baru. Bizantium merasa terancam oleh orang-orang Islam Turki, dan mengirimkan utusan untuk meminta bantuan kepada Paus.

Menanggapi permintaan itu, Paus Urbanus II menyerukan, pada 1095, khotbah berisi dorongan kepada dunia Kristen untuk melakukan Perang Salib, yang tidak hanya untuk membantu Romawi Timur, tetapi sekaligus merebut Yerusalem dari tangan penguasa Islam. Perang Salib pertama meletus setelah seruan itu. Sepanjang dua abad hingga 1291, dunia menyaksikan tujuh Perang Salib besar dan banyak Perang Salib kecil-kecil, yang hasilnya adalah kekalahan di pihak tentara gabungan Eropa.

Dalam masa-masa Perang Salib inilah, Islam memperkenalkan kepada dunia nama Sultan Saladin, atau Shalahuddin al-'Ayyubi, pemimpin pasukan muslim yang tangguh dan dihormati bahkan oleh Eropa karena kesantunannya dalam memperlakukan para tawanan perang.

Dante Alighieri, sastrawan Italia, menyebut di dalam puisi epiknya, Divina Comedia, bahwa Saladin adalah orang baik. Buku itu lahir di tengah frustrasi orang-orang Eropa setelah kegagalan demi kegagalan dalam Perang Salib. Di sana, Dante menggambarkan semua orang Islam masuk neraka, kecuali Saladin. Orang Islam yang baik ini ia gambarkan berada di Limbo, sebuah tempat di antara surga dan neraka. Saladin tidak bisa masuk surga, meskipun ia orang baik, karena belum dibaptis.

Keberhasilan pasukan Islam memukul tentara Eropa dalam rentetan Perang Salib berbanding terbalik dengan situasi Baghdad. Kekhalifahan Abasiyah, yang gemilang dalam membangun peradaban namun melemah secara militer, akhirnya runtuh pada 1258

oleh serbuan pasukan berkuda dari padang rumput Mongolia di bawah komando Hulagu Khan. Kota Baghdad, yang selama lima ratus tahun membangun diri sebagai pusat peradaban, dihancurkan sama sekali. Perpustakaan-perpustakaan diratakan dengan tanah dan semua buku dibenamkan ke Sungai Tigris. Peradaban habis tak bersisa di Baghdad.

Yang selamat dari serbuan Hulagu adalah karya-karya ilmiah dan pemikiran para cendekiawan yang sebelumnya sudah berpindah ke Eropa dalam bentuk terjemahan. Dan Eropa berutang kepada para pemikir dan ilmuwan dari dunia Islam untuk kelahiran Renaisans di Barat, yang mengakhiri kesuraman abad pertengahan untuk menuju era pencerahan.

Keruntuhan Bani Abasiyah mengakibatkan tidak adanya satu kekhalifahan besar yang menaungi seluruh dunia Islam. Pada masa-masa kekosongan ini, sebuah negara kecil berdiri di barat laut Anatolia. Osman Bey yang mendirikannya pada 1299, sekitar empat puluh tahun setelah runtuhnya Baghdad. Negara kecil ini kemudian menaklukkan wilayah Balkan dan menjadikan dirinya sebuah imperium lintas benua, yang selanjutnya kita kenal dengan nama Turki Usmani.

Eropa menanggapi kebangkitan dan ekspansi Turki Usmani dengan melancarkan berbagai perang, yang lazim disebut Perang Salib juga sekalipun tidak bertujuan mengambil alih Yerusalem. Lagi-lagi mereka kalah dan menjadi kian terpuruk. Pukulan terberat bagi Eropa terjadi pada 1453 ketika Turki Usmani menamatkan riwayat Kekaisaran Romawi Timur dan mengambil alih ibu kotanya Konstantinopel.

Di antara rentetan kekalahan, Eropa mendapatkan hiburan dengan keberhasilan pasukan gabungan Spanyol yang terdiri atas bala tentara dua kerajaan Katolik, Kastilia, dan Aragon, menaklukkan Keamiran Granada pada penghujung abad kelima belas. Granada

adalah wilayah terakhir bagi orang-orang Islam —yang disebut bangsa Moor— di Andalusia. Misi Eropa untuk merebut kembali Andalusia dari tangan orang Islam berhasil sepenuhnya dengan kejatuhan istana Alhambra di Granada. Setelah hampir delapan ratus tahun menguasai Andalusia dan membawa negeri itu keluar dari kegelapan, orang-orang Islam akhirnya diusir, diinkuisisi, atau dipaksa masuk Katolik. Nasib yang sama dialami oleh orang-orang Yahudi.

Khairuddin Barbarossa, panglima angkatan laut Turki Usmani di Laut Tengah, memimpin misi penyelamatan orang-orang Moor. Ia menyeberangkan mereka dari Andalusia ke tempat-tempat aman di Maroko, Tunisia, dan Aljazair, dan berkali-kali mengalahkan armada-armada laut Eropa di perairan Mediterania. Semuah misi yang luar biasa.

Sepanjang abad keenam belas dan ketujuh belas, Turki Usmani merupakan imperium terkuat di dunia. Ia mengendalikan Eropa bagian tenggara, Asia Barat, Afrika Utara, dan wilayah Tanduk Afrika. Puncak kejayaan Turki Usmani terjadi pada masa pemerintahan Sulaiman al-Qanuni, dengan angkatan laut laut di bawah komando Khairuddin Barbarossa.

Di Eropa, kekalahan demi kekalahan di berbagai Perang Salib dan kepedihan yang mereka alami, telah mengilhami antara lain lahirnya karya-karya sastra dan pahlawan-pahlawan dongeng yang muncul dari cerita-cerita rakyat berlatarkan Perang Salib. Mereka menciptakan tokoh-tokoh pahlawan mereka; mereka menciptakan tokoh penjahat besar dari pihak musuh mereka. Mereka menggambarkan, misalnya, Khairuddin Barbarossa sebagai bajak laut berjanggut merah —Barbarossa artinya si Janggut Merah— dalam cerita-cerita fiksi mereka. Gambaran tentang bajak laut ini terus bertahan sampai berabad-abad kemudian, bahkan sampai abad ke-20.

Keadaan mulai berbalik di abad kedelapan belas. Turki Usmani mulai meredup, sementara kerajaan-kerajaan Kristen Eropa

melakukan konsolidasi. Pada satu kesempatan di masa itu, gubernur Tunisia melakukan serangan terhadap kapal dagang Inggris yang sedang melayari Laut Tengah. Inggris menuntut ganti rugi kepada Turki Usmani, karena Tunisia merupakan bagian dari kerajaan tersebut, dan Turki Usmani menjawab bahwa gubernur Tunisia melakukannya untuk menjalankan perintah agama. Jawaban ini tidak keliru secara fikih. Menurut Mazhab Syafi'i, orang Islam memiliki kewajiban yang bersifat fardlu kifayah untuk setahun sekali melakukan jihad ofensif kepada orang-orang kafir.

Jawaban Turki Usmani itu melahirkan lanjutan yang mudah ditebak: Perang. Turki Usmani kalah dalam rentetan perang yang berkepanjangan, dan kekalahan inilah yang kemudian membuka peluang bagi kerajaan-kerajaan Eropa untuk mendesakkan tuntutan kepada imperium yang mulai melemah tersebut. Salah satu tuntutan mereka adalah agar Turki Usmani memberikan status kewarganegaraan yang setara kepada orang-orang Kristen yang tinggal di wilayahnya. Dengan kata lain mereka menuntut dihapuskannya hukum dzimmi, dan hanya memberlakukan hukum yang sama terhadap semua warga negara.

Orang-orang Kristen Armenia yang tinggal di wilayah Turki Usmani merasa mendapatkan kesempatan untuk ikut menuntut perlakuan setara sebagai warga negara. Ini tuntutan yang tabu. Di mata Turki Usmani, orang-orang Kristen Armenia itu sudah melanggar fikih dan sekaligus berpihak kepada musuh. Hal ini membuat mereka kehilangan hak dzimmah. Dan bagi orang-orang kafir yang sudah kehilangan hak dzimmah, nasib mereka sepenuhnya berada di tangan imam. Maka, pemerintah Turki Usmani menanggapinya dengan melakukan pembantaian yang menewaskan tiga ratus ribu orang Kristen Armenia.

Memasuki abad kesembilan belas, Turki Usmani kian melemah oleh dua sebab, ialah gejolak di dalam negeri yang menginginkan

pembaruan dan munculnya benih-benih pemberontakan oleh orang-orang Arab di Timur Tengah. Di Eropa, revolusi industri membawa perubahan besar-besaran dalam berbagai aspek; dari segi kemiliteran, mereka semakin kuat.

Perang Dunia Pertama pecah pada 1914. Turki Usmani, yang sekubu dengan Jerman, Bulgaria, dan Austria-Hungaria, berperang melawan sekutu yang terdiri atas Inggris, Prancis, Rusia, Italia, Amerika Serikat, Rumania, dan Jepang. Selama berlangsungnya perang besar ini, Eropa betul-betul "merancang" masa depan Timur Tengah, dengan keyakinan bahwa kali ini Turki Usmani pasti tumbang. Dan mereka harus menjadikannya tidak mungkin bangkit kembali.

Untuk memastikan kehancuran Turki Usmani, Inggris meningkatkan provokasi di kalangan para pemimpin Arab agar mereka melancarkan perlawanan bersenjata dan membebaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Kepada mereka Inggris menyampaikan bahwa kekhalifahan Islam sudah selayaknya kembali ke tangan yang berhak, yakni orang Arab, dan ke tanah yang paling tepat, ialah tanah Arab.

Syarif Husain bin Ali, penguasa Hijaz dari klan Bani Hasyim (keturunan Nabi), menyambut ajakan Inggris setelah mendapatkan janji bahwa Inggris akan mendukungnya sebagai Khalifah Islam dan menyerahkan kepadanya seluruh wilayah Arab. Thomas Edward Lawrence, seorang sarjana sejarah dan agama yang kelak dikenal dengan sebutan Lawrence of Arabia, ditugasi oleh pemerintah Inggris untuk menjadi penasihat militer Syarif Husain. Dengan dukungan dana dan persenjataan dari Inggris, Syarif Husain melancarkan Revolusi Arab dan memulai perlawanan bersenjata kepada Turki Usmani di tengah berlangsungnya Perang Dunia Pertama.

Pada saat yang sama, Inggris juga mengirim seorang agen intelejen bernama Harry St John Bridger Philby –terkenal dengan nama panggilan Jack Philby—untuk bergabung dan mendampingi

keluarga Saud yang juga sedang berkonsolidasi di Nejed. Jack Philby diterima sebagai penasehat Abdul Aziz Alu Saud, menjadi saluran masuknya dukungan persenjataan dari Inggris bagi revolusi suku Badui itu, dan terus membantu Keluarga Saud dalam negosiasinya dengan Inggris dan Amerika.

Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, 1918, Syarif Husain mengumumkan diri sebagai Raja Hijaz, tetapi Inggris tidak memenuhi janjinya untuk menjadikan Syarif Husain sebagai khalifah Islam yang menguasai seluruh wilayah Arab. Rekomendasi Jack Philby lebih dipercaya oleh Pemerintah Inggris sehingga justru Abdul Aziz yang didukung untuk mendirikan Kerajaan Arab Saudi. Setelah kerajaan berdiri, Jack Philby masuk Islam (1930), mengawini seorang perempuan Arab, dan mengganti namanya menjadi Abdullah.

Diam-diam Inggris dan Prancis menyepakati peta pembagian wilayah, menentukan mana saja yang akan berada di bawah kendali Inggris dan mana yang di bawah Prancis. Pada 1917, sebelum perang dunia berakhir, Inggris mengumumkan Deklarasi Balfour yang mendukung pendirian negara Israel di wilayah Palestina.

Syarif Husain memprotes Deklarasi Balfour dan pembagian wilayah yang disepakati oleh Inggris dan Prancis, tetapi itu hanya protes oleh pihak dengan kekuatan kecil dan tidak digubris oleh Inggris.

Inggris terang-terangan mendukung Abdul Aziz Alu Saud, penguasa Nejed yang menolak bergabung dalam Revolusi Arab. Keluarga Saud dikenal pertaliannya sejak abad kedelapan belas dengan para pengikut Wahabi. Kekuatan militernya ditulangpunggungi oleh milisi Wahabi, yang beranggotakan orang-orang suku Badui yang diberi doktrin ultra-konservatif untuk memerangi siapa pun yang mereka anggap sesat.

Pada 1923, Kekhalifahan Turki Usmani benar-benar terhapus dari muka bumi setelah Gerakan Nasional Turki memproklamasikan

kemerdekaan yang menandai berdirinya Republik Turki. Penghapusan kekhalifahan dinyatakan secara resmi oleh Parlemen Turki pada 3 Maret 1924. Selang dua hari, Syarif Husain memanfaatkan kosongnya kekhalifahan dengan mengumumkan diri sebagai khalifah baru bagi dunia Islam, tetapi pada tahun itu juga ia diturunkan dari tahta dan diusir oleh Ibnu Saud yang mengalahkannya dalam perang di bulan Oktober. Kedudukannya sebagai raja Hijaz digantikan oleh Ali, putra sulungnya, tetapi Ali juga harus lari ke pengasingan dua tahun kemudian akibat serbuan Abdul Aziz.

Sejak itu keluarga Saud menjadi penguasa di Hijaz dan Nejed. Ia menyatukan kedua wilayah itu pada 1932 menjadi Kerajaan Saudi Arabia, dengan Abdul Aziz menjadi raja pertama dan doktrin Wahabi yang ultra-konservatif sebagai landasan bernegara.

Dalam buku Secret Affairs: Britain's Collusion with Radical Islam, penulis Mark Curtis memaparkan sebuah dokumen rahasia yang sudah dideklasifikasi, berisi pernyataan Winston Churchill tentang Wahabi di depan Parlemen Inggris pada 1921. Churchill, yang waktu itu menjabat menteri kolonial Inggris, menggambarkan Wahabi sebagai aliran yang keras, tidak toleran, bersenjata, dan haus darah.

Kata Churchill: "Orang-orang Wahabi mempercayai bahwa membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka adalah perintah Tuhan dan bukti keimanan. Wanita bisa dihukum mati hanya karena mereka terlihat di desa-desa Wahabi. Laki-laki boleh dibunuh karena merokok. Dan mengenakan pakaian sutra adalah pelanggaran hukum." Namun, di kemudian hari Churchill juga menulis: "Saya sungguh kagum kepadanya (Abdul Aziz), karena kesetiaannya kepada kita tak habis-habis."

Dengan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (KSA), yang menyebarkan kengerian di Timur Tengah melalui doktrin Wahabinya, kita menyaksikan skenario Inggris dan para sekutunya berjalan sempurna setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Dan rancangan

itu kian sempurna dengan berdirinya negara Israel di Palestina setelah Perang Dunia Kedua. Mereka berhasil "menciptakan" Timur Tengah sebagaimana yang mereka bayangkan: sebuah kawasan yang dirundung konflik sepanjang waktu, tak bisa bersatu, dan di tengah-tengah mereka ada Israel yang selalu menjadi masalah.

Tata politik dunia berubah melalui perang demi perang, sebagian besar atas nama agama, dan kemapanan yang telah berlangsung ribuan tahun dirombak setelah dua perang besar yang kita namai Perang Dunia Pertama dan Kedua. Negara-negara agama melepaskan identitas agama mereka, sehingga hampir tidak ada lagi negara agama. Amerika dan Uni Soviet muncul sebagai dua negara adikuasa, yang membawa dunia ke dalam situasi perang dingin selama empat dekade lebih. Perang ideologi antara Amerika dan Uni Soviet, dengan sekutu masing-masing, menggantikan perang agama antara Islam dan Kristen di masa negara-negara masih melekatkan agama sebagai identitas.

Korban nyawa berjatuhan di berbagai kawasan negara-negara dunia ketiga, baik di Amerika Latin, Asia, maupun Afrika, terutama oleh agresivitas Amerika dalam memerangi ideologi komunisme.

Di tengah-tengah berlangsungnya perang dingin ini, Iran di bawah komando Khomeini melancarkan revolusi pada 1979 dan berhasil menumbangkan Syah Reza Pahlevi yang didukung oleh Amerika. Didorong oleh kekhawatiran terhadap popularitas revolusi Iran dan simpati yang meluas terhadap keberhasilan Iran menumbangkan rezim, Arab Saudi gigih melakukan kampanye internasional untuk memusuhi Iran.

Perang Dingin berakhir pada 1991 ketika Uni Soviet runtuh dan negara-negara pembentuknya melepaskan diri untuk menjadi negara-negara yang berdiri sendiri. Namun kampanye Wahabi Arab Saudi terus berjalan hingga hari ini. Dalam empat puluh tahun sejak 1979 itu, menurut laporan media Inggris Independent, mereka

menghabiskan tidak kurang dari seratus miliar dolar AS untuk kampanye ini.

Jika angka itu akurat, dan kita menggunakan perbandingan demografis sebagai landasan untuk membuat hitungan kasar tentang aliran dana, maka kita akan bisa memperkirakan berapa besar dari dana itu yang mengalir ke Indonesia.

Jumlah penduduk muslim Indonesia kira-kira seperenam dari seluruh penduduk muslim dunia yang keseluruhannya sekitar 1,5 miliar. Jadi, dari jumlah dana kampanye seratus miliar dolar, bisa diduga seperenamnya, atau sekitar 16 miliar dolar, masuk ke Indonesia dalam kurun waktu empat puluh tahun. Itu berarti tiap tahun 400 juta dolar AS.

Yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan kucuran dana sebesar ini adalah mendakwahkan Wahabi untuk memusuhi Syiah dan menanamkan watak ultra-konservatif kepada warga muslim di Nusantara. Pada 1980, mereka mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA), intitusi pendidikan asing pertama di Indonesia. Melalui institusi inilah literatur-literatur mengenai ajaran Wahabi disebarluaskan dan indoktrinasi dijalankan. Tak lupa membangun masjid di mana-mana, sebagai tanda kedatangan mereka. Masjid, itu seperti bendera zaman perang, menjadi penanda kekuasaan.

Mari kita lihat logika kampanye Arab Saudi dan konsekuensi lanjutannya. Arab Saudi menyerukan permusuhan terhadap Iran. Kenapa Iran harus dimusuhi? Karena ia Syiah dan Syiah itu kafir (menurut paham Wahabi). Logika lanjutan dari cara berpikir ini adalah bahwa, kalau Syiah harus dimusuhi karena kafir, berarti semua kafir di seluruh dunia harus dimusuhi. Itu berarti kita harus memutar waktu dan memundurkannya ke masa lalu yang jauh untuk membuat cara berpikir seperti ini relevan, dan tindakan-tindakan berdasarkan cara berpikir semacam ini tidak anakronistik (menyelisihi zaman).

Tetapi Wahabi tampaknya memang sebuah anakronisme yang mengerikan. Aliran ini sejak kelahirannya di abad ke-18 sudah menunjukkan watak intoleran, bahkan terhadap Ahlussunnah wal Jama'ah yang menjunjung rasa hormat –dalam praktek keberagamaan sehari-hari—terhadap Nabi, para sahabat, dan para ulama zuhud dalam tradisi Islam.

Mereka menyamakan berziarah ke makam, mendoakan orang-orang suci atau para wali, sebagai tindakan menyembah berhala. Mereka memusuhi makam dan peninggalan sejarah. Irfan al-Alawi, direktur yayasan penelitian warisan Islam, sebagaimana dikutip oleh The New York Times, 31 Mei 2015, menyebutkan bahwa kebrutalan Wahabi telah menyebabkan hancurnya lebih dari 95 persen situs bersejarah di dekat kota suci Mekkah dan Madinah.

"Puluhan makam telah dihancurkan, sebuah rumah yang diasosiasikan dengan Siti Khadijah, istri Nabi, dirobohkan dan diganti dengan WC umum, dan sebuah rumah yang diyakini milik Abu Bakar diratakan untuk pembangunan jalan menuju Hotel Hilton," kata Alawi.

Laporan berjudul "Saudi Mengubah Tempat Kelahiran Wahabisme Menjadi Objek Wisata" itu menampilkan kepada kita sebuah ironi. Mereka menghancurkan makam dan peninggalan sejarah Islam, namun mereka sendiri merenovasi makam dan tempat kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran Wahabi.

Di luar ironi —dan inkonsistensi— yang lahir dari tindakan mereka, indoktrinasi Wahabi terbukti telah melahirkan kekacauan di mana-mana. Dan setiap keberhasilan kampanye Wahabi di mana pun akan melahirkan negara gagal. Kita melihat hal itu secara terang-benderang pada kasus Somalia. Kampanye Wahabi sukses besar di sana, dan akibatnya Somalia gagal total sebagai negara dan dirundung perang tak berkesudahan, sampai-sampai mereka mengembangkan bisnis bajak laut, dan sebagainya. Kekacauan serupa terjadi di Nigeria, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Kampanye Wahabi berpotensi melahirkan negara gagal di mana-mana karena dilakukan dengan mendorong permusuhan antaragama.

Perubahan Demografi

Situasi tanpa perbatasan yang definitif bertahan sampai meletusnya Perang Dunia Kedua. Setelah perang besar itu berakhir, negara-negara membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai rezim internasional yang menjaga perbatasan antarnegara, sehingga sekarang kita memiliki rezim perbatasan. Papua dan Papua Nugini memiliki batas yang disepakati oleh dua negara dan dilindungi oleh hukum internasional. Kalau salah satu melanggar seluruh dunia akan memusuhi, kecuali jika pelakunya terlalu kuat seperti Amerika Serikat. Menurut hukum internasional, invasi Amerika Serikat ke Irak, misalnya, atau ke negara-negara lain, adalah sebuah pelanggaran. Tetapi ketika Amerika Serikat melakukannya, tidak ada yang berani memusuhi negara adidaya tersebut, sebab ia terlalu kuat.

Kalau kita bicara misalnya Saudi berkonflik melawan Iran, kita masih bisa bilang itu Syiah melawan Sunni, tapi bagaimana jika Saudi berkonflik melawan Qatar, Turki berkonflik melawan Emirat atau melawan Mesir, kita akan berpihak ke mana, keduanya sama-sama Ahlussunnah wal Jama'ah.

Negara-negara sekarang sudah hampir tidak ada yang memakai identitas agama, hanya sebagian sisa-sisa Turki Usmani, itupun tidak semua. Mesir masih memakai identitas Islam, Maroko juga masih memakai identitas Islam, tapi Libanon sudah tidak, Irak sudah tidak. Banyak negara bekas Turki Usmani sekarang menjadi negara yang mandiri dan melepaskan identitas Islam. Karena tidak lagi memakai identitas agama, warga negaranya menjadi campur.

Karena Eropa tidak lagi memakai identitas Katolik atau protestan dan lain-lain, semua orang bisa tinggal. Di Jerman warga negaranya

sudah bermacam-macam, apalagi orang protestan, orang Islam sudah banyak. Di Inggris juga demikian, orang Islamnya sudah banyak. Kota Paris memiliki penduduk muslim sekitar lima persen.

Gejala kemajemukan dan multikulrutalisime ada di mana-mana; orang-orang dengan agama yang berbeda-beda hidup bersama di satu kampung, sehingga jika diletupkan konflik antaragama, yang terjadi adalah kerusuhan kampung. Dan hal ini sudah terjadi di Ambon, di Poso, dan sekarang terjadi di Sri Lanka, di India, di Myanmar, dan sebagainya.

Dan begitu terjadi kerusuhan kampung, orang mengaitkannya dengan sentimen agama. Mereka merespons dengan klaim bahwa umat Islam di dunia ini bersaudara. Artinya, jika terjadi benturan, misalnya, antara orang Kristen dan orang Islam di satu tempat, orang-orang Islam yang berada di tempat-tempat lain merasa harus ikut memerangi orang-orang Kristen di sekitar mereka. Itu terjadi karena orang mempertahankan cara berpikir lama, sementara dunia mengalami perubahan demografi. Jika hal ini dipertahankan, niscaya kita akan melihat keruntuhan masyarakat di mana-mana.

Maka, salah satu urusan terbesar kita adalah bagaimana menemukan cara berpikir yang lebih tepat untuk menghadapi dunia yang berubah. Cara berpikir masa lalu, yang telah mewariskan kepada kita sejumlah masalah dan barangkali kepahitan, jelas tidak mungkin dipertahankan lagi, kecuali jika kita ingin terus mendapatkan masalah. Untuk menemukan pemecahan, kita memerlukan cara berpikir baru yang lebih bersandar pada masa depan.

Solusi datang dari masa depan, ialah ketika kita memiliki kesediaan untuk menjunjung Ukhuwah Basyariah dan secara sungguh-sungguh mengamalkan prinsip persaudaraan antarmanusia.

Masa lalu mengajarkan kepada kita bahwa permusuhan antaragama adalah fardlu 'ain, ekspansi dan jihad ofensif adalah fardlu kifayah setahun sekali. Tetapi doktrin semacam tidak mungkin

didakwahkan sekarang. Memaksakannya pada konteks hari ini hanya akan melahirkan kerusakan di mana-mana. Di dalam negeri, kita sudah melihat gejala itu dengan meletusnya perang antaragama di Ambon dan Poso. Kita beruntung mewarisi peradaban Nusantara yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, sehingga Ambon bisa direkonsiliasi dan Poso bisa diselesaikan. Bayangkan yang terjadi di Irak, Suriah, Nigeria, Somalia, Afghanistan, atau Pakistan. Rasa permusuhan di sana seperti tidak bisa disembuhkan. Ya Allah, ini bagaimana, baku bunuh kok tidak kapok-kapok?!

Dalam skala besar, kita melihat kehancuran yang mengerikan ketika orang-orang kulit putih Amerika marah kepada Islam karena aksi terorisme yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center, 11 September 2001. Mereka mengidentifikasi bahwa pelakunya adalah Al-Qaidah, dan aksi teror itu dilakukan atas nama Islam. Pemerintah Amerika kemudian mengumumkan keputusan politik untuk melancarkan perang global melawan terorisme.

Perang melawan terorisme ini di bawah permukaan berkembang menjadi sentimen kemarahan terhadap semua imigran Islam. Mereka menganggap Islam sebagai ancaman. Dan karena orang-orang Islam di sana adalah imigran, maka kemarahan itu meluas menjadi sentimen anti-imigran.

Di perbatasan Meksiko, misalnya, tiba-tiba ada orang membunuhi para imigran dari Meksiko dan Amerika Latin. Di tempat-tempat lain, Islam dimusuhi karena dianggap berasal dari setan. Bagi orang Kristen, apa yang di luar iman mereka adalah kepercayaan yang sesat, dan karena itu harus dimusuhi. Implikasi dari iman tersebut, semua yang bukan Kristen harus dimusuhi, termasuk Islam dan Yahudi. Itu sebabnya setelah penembakan sebuah masjid di New Zealand, ada lagi orang mengamuk di Kalifornia Selatan menembaki sinagog. Kali ini orang Yahudi yang menjadi korban oleh teror yang diilhami kejadian di New Zealand.

Kita bisa melihat logika berpikir yang mereka kembangkan sama persis dengan logika Wahabi dalam kampanye memusuhi Iran: Syiah adalah kafir, dan karena itu harus dimusuhi. Dan karena Syiah harus dimusuhi, maka semua kafir harus dimusuhi.

Semua ini berpotensi meningkatkan konflik universal yang tanpa struktur. Ya Allah, sampai kapan selesainya rumusan, homo homini lupus—semua melawan semua, manusia adalah serigala bagi sesamanya?

Perubahan Standar Norma

Mari kita mulai bagian ini dari urusan yang paling emosional dan sering memancing kegaduhan, yaitu tentang kafir. Suka atau tidak, kita harus mengakui bahwa permusuhan kepada kafir memang ada tuntunannya, ada nashnya. Jika ada orang yang berkeras menyangkalnya, maka ada dua kemungkinan yang bisa kita katakan mengenai orang itu. Pertama, ia bohong. Kedua, pemahamannya tidak mendalam. Orang yang memiliki pemahaman mendalam akan tahu bahwa memang seperti itu menurut fikih: kita diminta bermusuhan.

Hukum asli tentang orang kafir adalah halal darahnya dan halal hartanya. Ini dogma yang sudah menjadi mapan selama berabad-abad. Orang Islam boleh membunuh orang kafir, boleh merampok hartanya, dan boleh pula merebut istrinya untuk dijadikan budak. Tidak ada dosa di dalam perbuatan itu. Yang tidak boleh diperlakukan seperti itu adalah orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan dari imam atau Sultan. Dalam Islam, mereka disebut kafir dzimmi.

Hal seperti ini berlangsung ratusan tahun dan tidak ada masalah, karena memang seperti itu caranya di masa lalu.

Pernah terjadi di masa Rasulullah suatu peristiwa ketika orang-orang Islam di Madinah keluar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Mereka melakukannya sebagai cara untuk bertahan hidup. Di

Madinah pada waktu itu cuma ada kurma, anggur, dan kambing. Jika mereka tidak keluar bertempur, mereka akan habis dan peradaban Islam tidak akan pernah ada.

Dalam konteks itu, mengembangkan permusuhan adalah jalan untuk keselamatan, untuk bertahan hidup. Di tingkat negara, permusuhan dikembangkan sebagai cara untuk menjaga perbatasan, mempertahankan kedaulatan.

Turki Usmani juga begitu. Tanpa adanya dogma tentang permusuhan dengan orang kafir, kekhalifahan niscaya runtuh dalam waktu cepat. Pada kenyataannya, mereka membesar dan bertahan selama lima ratus tahun, meski dalam lima abad itu mereka tidak berhenti berperang melawan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Sekiranya Turki Usmani tidak melakukan itu, maka kekuatan militer kerajaan-kerajaan lain yang akan menyerbu, mengancam kedaulatan kekhalifahan, dan membahayakan bagi keselamatan umat Islam.

Jadi, kita bisa mengatakan bahwa permusuhan memiliki tujuan syariah: ia memelihara orang-orang mukmin di dalam wilayah negara dari ancaman bahaya kerajaan kerajaan kafir di sekitarnya. Dan, karena memiliki tujuan syariah, mengembangkan permusuhan lantas menjadi norma standar. Kedaulatan dan kejayaan suatu negera betul-betul bergantung kepada kekuatan militernya.

Kita sudah menyinggung bagaimana Bani Abasiyah menjadi lemah dan akhirnya runtuh, justru karena mengembangkan tujuan-tujuan yang hari ini kita pandang mulia, ialah membangun peradaban yang menopang berkembangnya ilmu pengetahuan. Namun, kealpaannya untuk membangun kekuatan militer membuat Baghdad dengan mudah ditaklukkan oleh pasukan Mongolia yang bahkan tidak tahu bagaimana menghargai ilmu pengetahuan.

Kelanjutan logis dari permusuhan yang dianjurkan adalah terjadinya penaklukan dan penjajahan. Karenanya, penaklukan satu negara oleh negara lain, dan penjajahan oleh satu bangsa terhadap

bangsa lain, merupakan praktek yang lumrah. Setiap imperium besar membangun kebesarannya melalui penaklukan dan penjajahan, dengan cara melatih ribuan orang yang siap membunuh kapan pun. Peradaban Romawi dibangun melalui jalan penjajahan oleh orang-orang Romawi terhadap wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Peradaban Islam juga melakukan cara serupa.

Di negara kita, banyak orang merasa tidak nyaman mendengar pernyataan bahwa Islam datang sebagai penjajah. Tetapi, bahasa yang kita gunakan sehari-hari tidak memiliki kosakata lain, untuk menyebut aksi penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan Arab ke tanah Persia. Mereka menyerbu atas nama Islam. Persia kalah, wilayahnya diduduki, orang-orang yang tidak mau masuk Islam diwajibkan membayar jizyah. Apa namanya kalau bukan penjajahan?

Setelah penaklukan itu, orang-orang Islam yang keluar sebagai pemenang akan menjalankan hukum tersendiri bagi penduduk setempat yang tidak mau masuk Islam. Orang kafir harus memakai atribut tertentu, apakah berupa ikat pinggang atau selendang, yang menandai bahwa dia kafir. Orang kafir tidak boleh naik kendaraan, ke mana-mana harus jalan kaki, orang kafir tidak boleh lewat di jalan yang biasa dilewati orang mukmin. Itu tercantum di kitab yang populer di pesantren Kifayatul Akhyar, karya ulama Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mun'im (wafat 829 H/1522 M, era transisi kesultanan Mamalik ke Turki Utsmani).

Perlakuan semacam ini kurang lebih sama dengan perlakuan terhadap pribumi di zaman Hindia Belanda. Pada masa itu, di gedung-gedung pemerintahan lazim terdapat tulisan "andjing dan boemipoetera dilarang masoek". Artinya, pribumi adalah kafir dzimmi bagi pemerintahan Hindia Belanda. Sekarang kita melihat praktek tersebut jelek sekali, tetapi memang begitu caranya pada waktu itu.

Akibat lain dari penaklukan adalah perbudakan. Dan karena penaklukan dan penjajahan adalah tindakan normal, maka

perbudakan menjadi praktik yang normal juga. Tidak ada masalah bagi para bangsawan dan orang-orang kaya untuk memelihara budak. Orang bisa membelinya di pasar budak, dan, kalau sudah membeli budak di pasar, tidak ada kewajiban menanyakan asal-usul budak itu.

Ini bukan hanya terjadi di dunia Islam, tetapi di seluruh dunia. Orang-orang kulit putih Afrika Selatan bahkan melegitimasi perbudakan terhadap ras kulit hitam dengan landasan Alkitab. Mereka mengimani bahwa orang kulit hitam Afrika adalah keturunan Ham, anak Nabi Nuh, yang dikutuk oleh sang ayah bahwa kelak anak cucunya akan menjadi budak.

Perbudakan terhadap orang-orang Afrika hitam di Amerika berjalan lancar dengan sokongan orang-orang Yahudi dan Arab. Mereka menjadi pengusaha kaya raya karena berdagang manusia. Praktik seperti ini pada waktu itu tidak melanggar norma; ia menjadi bagian dari sistem perekonomian.

Sekarang, dunia menyatakan perbudakan sebagai tindak kejahatan, walaupun ada negara yang diam-diam masih mempraktikannya, yaitu Mauritania. The Guardian, media Inggris, pada 8 Juni 2018 menulis:

"Di negara gurun Afrika Utara ini, perbudakan memiliki sejarah panjang, bermula sejak orang-orang Moor yang berbahasa Arab menyerbu desa-desa Afrika, menerapkan sistem kasta yang kaku dan masih dipertahankan sampai hari ini, menjadikan penduduk berkulit gelap terikat sebagai budak bagi tuan mereka yang berkulit lebih terang."

Pada 1981, karena tuntutan dunia internasional, pemerintah Mauritania sudah mengeluarkan undang-undang yang melarang perbudakan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menjalankannya. Polisi tidak berani menangkap orang-orang yang masih memelihara budak, sebab yang mereka lakukan itu dihalalkan dalam Al-Qur'an,

dan itu berarti dihalalkan oleh Allah. Perbudakan sah menurut agama.

Kasus Mauritania sekaligus menjadi ilustrasi bahwa praktik yang lazim di masa lalu, yang bahkan dihalalkan oleh kitab suci, menjadi tampak tidak bermoral ketika dijalankan hari ini, ketika zaman berubah dan interaksi antarmanusia mengadopsi cara berpikir yang melahirkan standar moral baru.

Banyak hal yang menjadi standar norma bisa berubah karena semua itu buatan manusia dengan berbagai macam kepentingannya. Kepentingan-kepentingan manusia di masa lalu melahirkan standar norma yang mendukung cara hidup sesuai kepentingan zamannya. Begitu pula dengan kepentingan manusia hari ini dan nanti. Manusia akan terus-menerus bergulat untuk perubahan norma, untuk memperjuangkan perubahan standar nilai-nilai. Dan ini bukan cuma pergulatan wacana. Ini sudah menjadi pergulatan antarkekuatan politik juga, dan kadang menjadi alat penekan di dalam pergaulan antarnegara.

Untuk waktu sekarang, persoalan paling mendasar bagi kita adalah bagaimana memiliki mindset (pola pikir) yang tepat untuk dunia yang sedang dan akan selalu berubah.

Naluri dasar manusia, atau semua makhluk hidup, adalah mempertahankan kehidupan, menyelamatkan diri dari ancaman, dan melahirkan generasi-generasi penerus kehidupan. Semua manusia, apa pun etnisnya, apa pun agamanya, apa pun alirannya, memiliki kebutuhan naluriah itu.

Dari kebutuhan naluriah itu, lahir dogma-dogma yang mendukung rasa permusuhan. Ia tepat untuk satu rentang masa, sebagaimana sudah kita bicarakan, tetapi berpotensi menimbulkan masalah untuk masa yang berbeda.

Dari dunia Islam, kita bisa melihat contoh yang paling aktual, misalnya, pada pada kasus Wahabi. Ia dibangun dengan menegakkan permusuhan dogmatis terhadap siapa saja yang berbeda dari mereka,

dan kemudian mengkampanyekan rasa permusuhannya dengan dana besar ke mana-mana, dan hasilnya adalah panen kekacauan di mana-mana.

Dan kekacauan itu sulit diselesaikan sebab mereka berhujah dengan fikih yang mapan. Misalnya, yang namanya maksiat itu memang harus dilawan. Menurut Ibnu Katsir, jika sultan tidak mampu memberantas kemaksiatan, maka siapa pun yang mampu harus melakukannya. Itu menyebabkan kita selalu kesulitan menghadapi sepak terjang organisasi-organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI).

Pada saat mereka menggunakan sentimen permusuhan terhadap kafir, untuk kepentingan politik praktis, tidak ada juga yang bisa menyalahkan. Bagaimanapun, hukum asli tentang permusuhan terhadap kaum kafir itu ada dan tidak pernah berubah.

Kita mengakui hal itu, tetapi kita juga memerlukan kesadaran baru bahwa tidak mungkin lagi sekarang ini meneruskan cara seperti itu. Kita harus punya perspektif baru yung membawa kita kepada jalan keluar dari dogma dan permusuhan ini.

Islam di Timur Tengah jelas tidak mempunyai jalan keluar. Kekacauan dan suasana permusuhan di sana sudah berlangsung sangat lama dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Jika Islam di Timur Tengah punya jalan keluar, semua kekacauan itu pasti tidak akan berlangsung berlarut-larut. Bagaimana mungkin di tengah tragedi kemanusiaan yang luar biasa seperti itu Islam tidak punya jawaban?

Globalisasi

Globalisasi menyiratkan pengertian bahwa umat manusia, dengan berbagai kepentingannya, bergerak menuju kebersatuan. Para pengamat dan sarjana sudah menyampaikan berbagai analisa dan penjelasan tentang hal ini. Dari apa yang mereka sampaikan, kita bisa meringkasnya kira-kira seperti ini: Globalisasi dipicu mula-mula

oleh munculnya jaringan sistem ekonomi internasional (kapitalisme), yang di dalamnya mencakup perdagangan dan transaksi, penanaman modal dan investasi, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, dan pertukaran gagasan dan budaya. Pendorong pertamanya adalah kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi.

Gerak menyatu ini memperlihatkan kepada kita aspek-aspek positif dan negatif. Ia datang seperti sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Aspek positifnya, empati, solidaritas, dan belas kasih di antara sesama manusia tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, agama, etnis, atau atribut-atribut pembeda lainnya. Kita bisa melihat contohnya pada kasus-kasus bencana alam dan kemanusiaan.

Tsunami di Aceh, gempa di Padang, kelaparan di Sudan, dan lain-lain dengan cepat akan menggerakkan umat manusia dari berbagai negara untuk mengirimkan bantuannya. Bencana di satu tempat seolah-olah menjadi urusan semua umat manusia untuk ikut mengatasinya. Ini tidak terjadi sekian abad lalu.

Aspek-aspek negatifnya banyak juga. Virus-virus sosial, wabah, dan sentimen primordial bisa menjalar dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Ini membuat sebagian pengamat menjadi pesimistis terhadap globalisasi, dan negara-negara yang cemas mencoba mengatasinya dengan kebijakan-kebijakan proteksi dan lain-lain.

Jadi, ketika kemanusiaan menunjukkan gerak menyatu, kepentingan politik menunjukkan gerak ke arah berlawanan: ia makin eksklusif dan ingin memisahkan diri. Itu sebabnya keputusan-keputusan politik menjadi keliru dan berbuntut masalah. Misalnya, kebijakan Amerika untuk menutup perbatasan, menghambat imigran, atau melancarkan perang dagang dengan China, semuanya berakhir sebagai masalah bagi negara tersebut.

Globalisasi adalah keniscayaan. Menolak globalisasi sama halnya dengan menolak gravitasi, kata Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB.

Dan melawan gravitasi sama dengan melawan sunnatullah. Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa globalisasi akan berhenti di tengah jalan. Yang terjadi justru sebaliknya, proses kebersatuan terjadi kian cepat, dan internet membawa globlalisasi ke arah yang lebih maju lagi.

Jika pada mulanya interaksi global lebih banyak melibatkan lembaga-lembaga dan pemerintahan, sekarang setiap individu bisa terlibat aktif sebagai pelaku. Internet membuat kita bisa membangun bisnis atau mengembangkan persahabatan dengan orang-orang dari belahan dunia mana pun. Ia juga memberi kita peluang untuk bertengkar sambil tidur-tiduran di kamar atau jongkok di kakus. Terserah Anda akan bertengkar dengan orang Amerika, Afrika Selatan, Somalia, atau orang Rembang. Teknologi menyingkirkan sekat-sekat yang membatasi gairah anda untuk bertengkar secara global.

Tetapi Anda harus menyadari juga bahwa di dunia ini ada miliaran orang dan Anda bukan satu-satunya yang memiliki gairah bertengkar. Di tiap tempat ada juga orang-orang lain yang memiliki gairah bertengkar sama besarnya, atau mungkin lebih besar ketimbang Anda.

Kepentingan politik akan mengorganisir mereka untuk membangun tentara dunia maya atau cyber army. Orang Amerika membentuk cyber army, orang Rusia membentuk cyber army, orang Israel, orang Tiongkok, orang Yaman, orang Iran, dan lain-lain. Pendukung pemerintah, penentang pemerintah, penyebar kebencian, dan siapa saja bisa berhimpun untuk membentuk cyber army.

Ketika kemanusiaan bergerak menuju kebersatuan, mereka menyebarkan perpecahan, bertukar hoaks, dan saling menyerang. Itu aspek negatif globalisasi, yang muncul dari cara berpikir yang tidak kompatibel dengan perubahan.

Orang-orang yang tidak kompatibel gagal menyadari bahwa globalisasi berarti kita semua berada di bahtera yang sama. Jika satu

orang merusak dindingnya, semua orang akan menanggung risikonya, termasuk dirinya sendiri. Krisis ekonomi di satu kawasan, misalnya, itu berarti masalah bagi semua kawasan lainnya. Kita pernah mengalaminya. Amerika mengalaminya. Eropa mengalaminya. Pada akhirnya, dunia mengalaminya.

Mereka tidak menyadari bahwa ekonomi Indonesia berpengaruh terhadap ekonomi global, begitu juga sebaliknya. Mereka tidak mau tahu bahwa perang di Timur Tengah juga membawa dampak bagi dunia. Jika kawasan ini tidak mampu mengakhiri kekacauannya dalam 10-15 tahun ke depan, mungkin ekonomi dunia akan runtuh.

Timur Tengah mewakili pangsa yang tidak kecil di dalam keseluruhan ekonomi dunia, angkanya bisa sampai sepertiga dari seluruh pangsa ekonomi dunia. Belum lagi jika kita mempertimbangkan suplai minyak yang bakal tersendat.

Karena Islam di Timur Tengah tidak menawarkan jalan keluar, maka sudah waktunya bagi Islam Nusantara untuk mengambil peran aktif, sebab kita semua berada di perahu yang sama. Saya pikir, inilah isyarat yang disampaikan oleh K.H. Achmad Shiddiq, 35 tahun lalu di Situbondo.

Globalisasi, gerak peradaban ke arah persatuan umat manusia, hanya akan membawa kebaikan jika kita berpegang pada Ukhuwah Basyariah. Dan dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan antarsesama itulah NU akan menawarkan jawaban Islam terhadap masalah-masalah hari ini.

***

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.
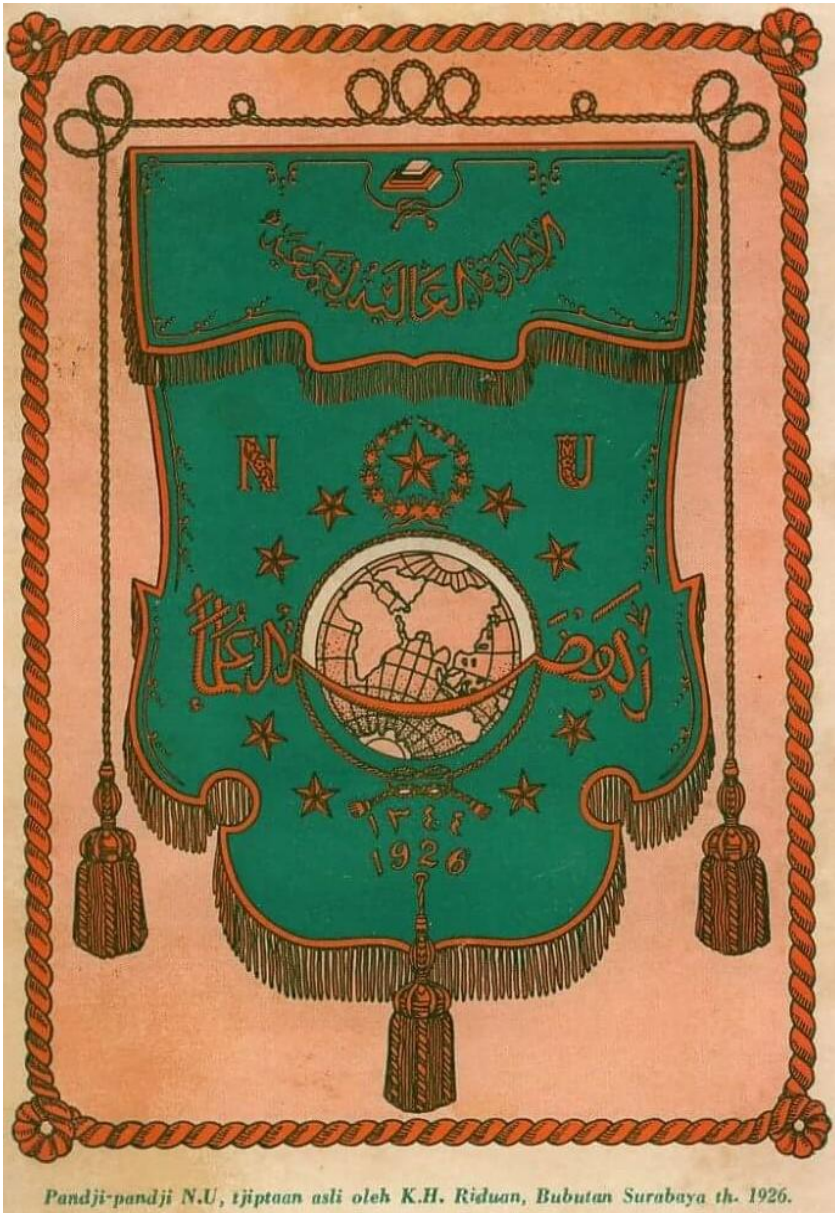
BAB II MERINTIS PERADABAN BARU

Memaknai Kelahiran Nahdlatul Ulama

Ketika Nahdlatul Ulama didirikan, Nusantara berada di bawah penjajahan Belanda, dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Itu sebabnya ketika Turki Usmani dikalahkan dalam perang dunia pertama, sebetulnya Nusantara tidak ikut kalah, sebab kita bukan bagian dari Turki Usmani. Delapan tahun setelah Perang Dunia Pertama, pada 1926, atau 1344 H, NU didirikan.

Melalui kacamata sekarang, kita bisa mengatakan bahwa cita-cita pendirian NU adalah cita-cita peradaban. Kekhalifahan Islam tumbang dalam perang dan kemudian terkubur selamanya. Dunia sedang mengalami penyusunan ulang, demikian pula pola-pola hubungan antarnegara dan antarbangsa, demikian pula peradaban baru. Hanya saja pada waktu itu belum cukup wawasan untuk membangun nalar tentang bagaimana perjuangan di tengah-tengah perubahan momentum sejarah. Yang ada hanya wangsit-wangsit hasil istikharah. Bahkan gambar jagat yang menjadi lambang NU, itu adalah hasil istikharah.

Ketika Kiai Ridwan Abdullah, seniman NU pada waktu itu, diminta menggambar lambang Nahdlatul Ulama, ia melakukan istikharah dan kemudian tidur dan mendapatkan isyarat bentuk seperti itu, yang kemudian ia tuangkan dalam gambar. Begitu juga

ketika Hadratussyekh menerima usulan dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk mendirikan NU.

Kiai Wahab Hasbullah adalah wali peradaban. Ia menjadi inisiator bagi seluruh pergerakan kiai-kiai NU sejak momentum perubahan peradaban itu berlangsung. Ketika berkobar Perang Dunia Pertama, Kiai Wahab sedang berada di Mekkah dan merasakan betul suasana peperangan itu memengaruhi masyarakat muslim di Timur Tengah.

Sepulang dari Mekkah, ia mendirikan Nahdlatut Tujjar dan kemudian Nahdatul Wathon. Setelah kekalahan Turki Usmani pada 1918, dan kekhalifahan itu akhirnya bubar pada 1923, Kiai Wahab Hasbullah berinisiatif mengusulkan didirikannya Nahdlatul Ulama. Gagasan ini ia bawa kepada gurunya.

Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sang guru, tidak langsung menyetujui dan mendirikan NU. Ia masih mempunyai guru, ialah Kiai Muhammad Kholil Bangkalan. Gagasan ini harus dibawa dan didengar oleh gurunya itu.

Ini cara NU. Orang tidak akan membuat keputusan sendiri sebelum meminta pendapat gurunya.

Kiai Kholil Bangkalan beristikharah dan mendapatkan isyarat berupa ayat Al-Qur'an:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"Mereka ingin memadamkan api Allah, memadamkan cahaya Allah dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah adalah Dzat yang senantiasa menyempurnakan cahaya walaupun orang-orang yang ingkar tidak menyukai." (Q. S. 61:8)

Berdasarkan isyarat itulah Kiai Muhammad Kholil Bangkalan mengizinkan Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul ulama.

Kiai Ridwan Abdullah, pembuat lambang Nahdlatul Ulama

Dengan nalar apa kita menjelaskan munculnya isyarat itu? Tidak ada yang bisa memastikannya. Kita hanya bisa mengira-ngira berdasarkan konteks zaman ketika isyarat itu muncul. Pada masa itu Turki Usmani baru saja kalah perang dan kekhalifahan yang sudah berdiri selama lima ratus tahun bubar untuk selamanya sebagai akibat dari kekalahan dalam Perang Dunia Pertama.

Negara-negara yang menjadi wilayah kekuasaannya diduduki oleh negara-negara Eropa yang keluar sebagai pemenang. Dan pihak pemenang menjadi "juru peta" untuk membelah-belah Timur Tengah dan memastikan bahwa Turki Usmani tidak akan pernah bangkit lagi.

Turki Usmani adalah lawan yang telah berkali-kali terlibat perang dengan mereka selama lebih dari 500 tahun. Tidak mungkin mereka biarkan kekhalifahan itu melakukan rekonsolidasi, lalu bisa bangkit kembali, dan menjadi musuh mereka lagi. Dan mereka berhasil.

Kecuali menjajah wilayah Turki Usmani, Eropa kemudian mensponsori lahirnya Saudi Arabia dan menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang Najed dan bukan kepada Syarif Husain. Selanjutnya, di tengah-tengah Timur Tengah yang terbelah-belah itu, mereka mensponsori berdirinya negara Israel. Tidak ada perang lagi sesudah Perang Dunia Pertama itu, tetapi ada bermacam-macam manuver politik, bermacam-macam propaganda, dan bermacam-macam intrik dan sebagainya.

Berdasarkan isyarat inilah Kiai Muhammad Kholil Bangkalan mengizinkan Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang diinginkan adalah supaya Nahdlatul Ulama menjadi wasilah untuk menyempurnakan cahaya Allah.

Itu tugas sejarah yang harus kita lunasi, sebab nurullah adalah sesuatu yang sangat kompleks, sangat agung, yang tidak bisa kita reduksi hanya dengan fikih, tidak bisa kita reduksi hanya dengan kekuasaan, tidak bisa kita reduksi hanya dengan kebesaran-kebesaran dan keunggulan-keunggulan material. Pasti di dalam

nurullah ini ada hal-hal yang bersifat rohani, yang spiritual, yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia secara universal.

Cita-Cita NU, Cita-Cita NKRI

Segala kejayaan peradaban, sejak zaman Rasulullah shallah alaihi wasallama hingga kepada masa kejayaan Umayah dan Abasiyah, lalu beralih ke Turki Usmani, adalah kejayaan material. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan sains adalah material. Di luar yang material itu, kita tahu ada kalangan-kalangan sufi yang mengembangkan laku-laku spiritual, dan kita juga tahu bahwa tasawuf tidak pernah menjadi konstruksi peradaban Islam. Ia hanya menjadi thariqah (bermakna luas, tidak hanya tarekat) dari kelompok-kelompok di dalam kalangan umat Islam, tapi tidak pernah menjadi konstruksi peradaban umat.

Sekarang, apa yang menjadi semangat dari tasawuf, yaitu mengembangkan agama sebagai kekuatan rohani, berhasil dikukuhkan sebagai fondasi peradaban Islam Nusantara.

Di Nusantara, hal-hal yang bersifat rohaniah, yang bersifat akhlak, tumbuh menjadi peradaban. Tawadlu, di tempat-tempat lain adalah akhlak pribadi-pribadi, di Nusantara menjadi peradaban. Di wilayah Nusantara ini, asalkan kita tawaduk, kita diperlakukan hormat.

Namun, sampai saat itu semuanya belum jelas benar apa maknanya dan bagaimana arahnya. Para kiai, meskipun sudah mendirikan Nahdlatul ulama, tidak mengobarkan perang terhadap Belanda. Sejak berdiri pada 1926 sampai 1945, NU tidak pernah ikut berperang. NU dan para kiai pada masa itu boleh dikata "bermain dua kaki". Di satu sisi, mereka menerima Pemerintahan Hindia Belanda sebagai sistem politik yang efektif menguasai dan mengatur ketertiban masyarakat. Betapa tidak? NU berdiri didaftarkan sebagai organisasi resmi kepada Pemerintah Hindia Belanda, dibawah hukum Hindia Belanda.

Posisi ini sempat melahirkan masalah-masalah di kalangan umat, terutama karena pemerintahan Hindia Belanda bukan pemerintahan Islam. Ketika pemerintah Hindia Belanda menunjuk petugas-petugas penghulu untuk menikahkan orang, masalah yang muncul adalah apakah sah para penghulu itu menjadi wali hakim sekiranya pengantin tidak mempunyai wali. Bagaimanapun, yang menunjuk mereka menjadi penghulu adalah pemerintahan kafir. Kepala negeranya bernama Ratu Wilhelmina, yang dalam pandangan Islam adalah ratu kafir. Setelah dilakukan bahtsul masail, keputusannya adalah sah penghulu menjadi wali hakim.

Di sisi lain, NU dan para kiai melancarkan perlawanan budaya secara total. Kiai-kiai menjauhi sekolah-sekolah Belanda, bahkan sampai mengharamkan santri-santrinya berpakaian seperti Belanda, yaitu jas-dasi dan pantalon. Nalarnya (terlalu) sederhana: larangan tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir.

Pada 1926, PKI mengobarkan pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda, Nahdlatul ulama tidak ikut memberontak. Indonesia belum ada. Orang sedang dalam proses menyebarkan gagasan tentang kemerdekaan, tetapi belum ada nalar untuk membentuk negara, sampai akhirnya sejarah memberi kesempatan kepada para pemimpin kita untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Inilah kesempatan yang diberikan oleh sejarah bagi Indonesia untuk menjadi negara merdeka, tanpa harus ada perang.

Pemerintahan Republik Indonesia, yang baru diproklamasikan, mengisi masa vakum ketika Jepang kalah dan wilayah ini belum diambil alih oleh Sekutu. Masa vakum inilah yang dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan, itu pun setelah Bung Karno diculik oleh para pemuda yang dipimpin oleh Chairul Saleh ke Rengasdengklok. Di tempat inilah Bung Karno dan Bung Hatta diminta merumuskan naskah proklamasi yang

kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Apakah ini hanya tentang bangsa Indonesia?

Jawabnya: Tidak. Pembukaan UUD 1945 ini berbicara tentang hak universal semua bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan persis inilah yang kemudian mengilhami negara-negara jajahan yang lain untuk menuntut kemerdekaan. Apakah Indonesia merupakan negara pertama yang merdeka setelah perang dunia ke-2? Tidak. Sebelumnya sudah ada Saudi Arabia, tetapi Saudi Arabia ada bukan karena memerdekakan diri dari penjajahan. Ia ada karena memisahkan diri dari Turki Usmani.

Ini menunjukkan bahwa cita-cita NKRI adalah cita-cita peradaban dunia. Apa yang termaktub di dalam mukadimah undang-undang dasar 1945 tidak lain adalah cita-cita peradaban umat manusia seluruh dunia. Nusantara, meskipun jauh daru belahan dunia lain, namun sudah ratusan tahun bergaul dengan penduduk dunia, bertukar budaya, saling belajar teknologi, hingga agama atau keyakinan. Kita bagian dari penduduk dunia. Ini pemahaman yang harus terus dibenamkan dalam alam pikir kita, dalam kesadaran kita.

Maka, di dalam konteks perubahan peradaban, wasilah bagi NU adalah negara, karena kita berhadapan dengan tata dunia yang dinamikanya ditentukan oleh pergaulan antarnegara. Di dalam konteks ini, makna NKRI harga mati adalah makna wasilah, karena tidak ada cara lain untuk membangun peradaban dunia yang lebih mulia di masa depan selain dengan wasilah negara.

Kita seringkali terpaku kepada ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan orang-orang mulia pada zaman dahulu dan kemudian menganggapnya sebagai satu prinsip yang harus dipegang selama-lamanya. Kita sering lupa bahwa manusia hidup dalam ruang dan waktu dan berada di tengah-tengah kenyataan yang terus berubah. Ketika Masyumi didirikan, Hadratussyekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Masyumi adalah satu-

satunya partai politik untuk umat Islam Indonesia. Tetapi ketika beliau wafat dan digantikan oleh KH Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Wahab berkeras membawa NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri.

Apakah itu berarti Kiai Wahab tidak menghargai pernyataan dari gurunya, Kiai Hasyim Asy'ari?

Bukan itu persoalannya. Keputusan itu diambil oleh Kiai Wahab karena perkembangan dari wasilah yang bernama NKRI ini menuntut Nahdlatul Ulama memisahkan diri dari Masyumi. Langkah itu dilakukan meskipun orang-orang tidak sanggup menalar kenapa NU keluar dari Masyumi. Itu keputusan berat. Keluar dari jemaah adalah dosa besar menurut nalar fikih. Dan kemauan keras Kiai Wahab untuk keluar dari Masyumi tidak ada yang tahu nalar fikihnya.

Pada waktu itu Kiai Wahab hanya mengatakan bahwa kita menginginkan persatuan, tetapi tidak bersatu sebagai kuda tunggangan. "Orang lain yang menunggang, kita yang dipecuti," katanya, "karena itulah kita harus keluar dari Masyumi." Sampai sekarang tidak ada yang tahu bagaimana nalar fikihnya.

Tetapi, jika kita merekonstruksi implikasi politik keluarnya NU dari Masyumi, kita bisa menemukan kenyataan bahwa seandainya NU tidak keluar dan mengikuti pemilu 1955 sebagai bagian dari Masyumi, dan Masyumi menjadi satu-satunya partai politik yang mewakili seluruh umat Islam Indonesia, kemungkinan Masyumi akan menang sebagai mayoritas tunggal dalam pemilu tahun itu. Begitu NU keluar dari Masyumi, yang lain-lain ikut keluar juga menjadi partai sendiri.

Masyumi gagal memenangi suara mayoritas dan hanya memperoleh sekitar 30% suara. NU sendiri mendapatkan sekitar 18% suara. Ditambah dengan perolehan suara dari partai-partai Islam yang lain, sekiranya semua partai Islam masih berhimpun dalam Masyumi, maka bisa dipastikan bahwa Masyumi memperoleh lebih dari 50% suara. Dengan perolehan suara di atas 50%, di dalam konstituante

Masyumi niscaya berhasil menggolkan agenda mereka untuk mengusung konstitusi negara Islam, dan Indonesia akan menjadi negara Islam. Dengan keluarnya NU dari Masyumi, yang kemudian diikuti oleh keluarnya partai-partai lain, konstituante tidak berhasil menetapkan konstitusi negara Islam yang diperjuangkan oleh Masyumi.

Bung Karno kemudian mengumumkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945, dan NU mendukung Bung Karno. NKRI berhasil lolos dari tren untuk mendirikan negara dengan identitas agama. Sedangkan kalau berhasil ditetapkan konstitusi semacam itu pasti akan terjadi konflik yang tidak akan selesai-selesai dengan PKI, dengan PNI, dan dengan partai-partai. Dan pasti kita tidak mungkin bisa mengklaim Papua, tidak mungkin juga NTT dan Sulawesi Utara mau tetap bergabung dengan Indonesia.

Politik: Sebuah Jalan

Jika itu terjadi, tidak mungkin ada NKRI seperti yang kita punyai hari ini. Kita kehilangan wasilah untuk ikut membangun peradaban dunia masa depan dengan kunci-kunci solusi Ukhuwah Basyariyah. Kita tidak sekadar membicarakan Ukhuwah Basyariyah yang disampaikan pada 1984 oleh KH Achmad Siddiq. Itu hanya momentum ketika gagasan tersebut dinyatakan secara verbal, tetapi bibit rohaniah dari Ukhuwah Basyariyah itu sudah ada sejak lahirnya Nahdlatul Ulama.

Untuk keberhasilan perjuangan itu, mau tidak mau NU harus berpolitik. Dalam konteks sekarang, politik, bagaimanapun, adalah jalur cepat untuk membangun peradaban. Kita tidak bisa menghindari jalan itu. Ini bukan pergulatan wacana, bukan sekadar pergulatan omongan, tapi pergulatan politik. Sejarah panjang ribuan tahun pertarungan jatuh bangunnya peradaban adalah jatuh bangunnya politik, karena perang adalah politik.

Gus Dur –seorang yang menyerap ilmunya Kiai Chudlori Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai Achmad Shiddiq—pernah mengatakan bahwa kita membangun demokrasi supaya orang berpolitik tidak usah pakai bunuh-bunuhan, bukan hanya agar kelihatan NU ini sebesar apa kekuatannya. Itu cara orang NU menjawab, secara rileks saja, demi menenteramkan para kiai. Itu sama rileksnya dengan jawaban Kiai Wahab ketika ditanya kenapa NU keluar dari Masyumi. Katanya: Supaya kita punya bis sendiri. Apakah sudah ada yang bisa nyopir atau belum, tidak masalah. Kalau tidak ada yang bisa nyopir, kita sewa sopir. Yang penting bisnya milik kita. Dalam sebuah urusan lain, Kiai Wahab malah malah menjawab pertanyaan seorang Kiai Abdul Jalil Kudus dengan menang-menangan: "Sampean diam saja. Kitab Sampean Cuma terbitan Menara Kudus. Kitabku lebih banyak dan terbitan luar negeri. Ikut aku saja."

Warga Nahdliyin akan menyebutnya sebagai naluri kewalian, dan mereka yang mencoba rasional mungkin akan mengatakan itu kepekaan intuisi, tetapi hal-hal semacam itulah yang sering menjadi keajaiban di dalam NU. Sepanjang sejarahnya, NU sulit kompak. Hanya beberapa kali NU terlihat kompak, dan kompaknya itu pasti di tengah-tengah momentum kontroversial. Ketika Kiai Wahab mengajak keluar dari Masyumi, tidak sedikit yang menolak ajakan untuk keluar itu. Bahkan semua putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menolak, kecuali KH Abdul Wahid Hasyim, yang terpaksa ikut karena posisinya sebagai ketua umum Tanfidziyah, sementara yang memerintahkan keluar adalah Rais 'Aam. Yang lain-lain tetap Masyumi. Tetapi kemudian sejarah memperlihatkan bahwa sebagian besar ulama NU dan warganya mendukung keluar dari Masyumi. Dan ketika para ulama dan warga NU sudah kompak dengan keputusan keluar dari Masyumi, sejarah berbelok. Jika NU tidak keluar, mestinya NKRI sudah menjadi negara Islam. Karena NU keluar, negara ini tetap NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

Almaghfurlah KH Bisri Syansuri disambut Wakil Presiden RI Adam Malik, Amir Machmud & Alamsyah pada Muktamar ke-26 1979 di Semarang.

Begitu pula ketika NU menerima asas tunggal Pancasila. Tidak ada yang setuju terhadap keputusan itu. Gus Dur tidak setuju asas tunggal karena dianggap tidak demokratis, Kiai Mustofa Bisri tidak setuju asas tunggal, Kiai Ali Maksum sampai sedih kenapa kita dipaksa-paksa menerima asas tunggal. Karena urusan ini, Kiai Ali Maksum kemudian istisyaroh kepada sahabatnya, Kiai Hamid Kajoran, Magelang, mengeluhkan: Bagaimana kok Pak Harto memaksa kita menerima asas tunggal, terus aku sebagai Rais 'Aam harus bagaimana?

Kiai Hamid Kajoran kemudian menjawab: Loh, Pancasila itu kan milik kita. Isinya keyakinan-keyakinan kita. Sekarang mau dikembalikan, masa kita tidak mau terima.

Dan ungkapan itu membuat Kiai Ali Maksum sampai menangis. “Kenapa kok tidak terpikir seperti itu?” katanya.

Ketua komisi rekomendasi pada muktamar tahun itu adalah Gus Dur. Anggotanya antara lain Kiai Mustofa Bisri, Kiai Anwar Nuris (kemudian menjadi sekjen PBNU), Abdullah Sarwani, Muhammad Thohir. Dan komisi tidak setuju menerima asas tunggal. Dalam rumusan komisi tidak ada penerimaan terhadap asas tunggal. Kalimat-kalimatnya canggih, antara lain menyebut bahwa Pancasila tidak bisa disamakan dengan agama. Singkatnya, tidak ada pernyataan menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Sebelum masuk ke sidang pleno, Kiai As’ad Syamsul Arifin, Situbondo, memanggil siapa yang telah membikin rekomendasi. Tidak ada yang mau menghadap. Gus Dur dan yang lain-lain juga tidak mau. Akhirnya, setelah dipaksa-paksa, Kiai Mustofa Bisri yang datang menghadap. Kiai As’ad memarahi Kiai Mustofa: Bagaimana ini? Pak Harto itu maunya kita terima asas tunggal.

“Kita bukan menerima atau menolak, kita cuma mau mendudukkan persoalan secara proporsional, Kiai,” kata Kiai Mustofa Bisri.

“Ndak bisa begitu. Pak Harto ingin kita terima asas tunggal. Kalau ndak bahaya kita ini,” kata Kiai As’ad.

“Loh, NU ini organisasi besar, Kiai. Masa kalau NU tidak nurut sama Pak Harto, Pak Harto berani bikin apa-apa sama NU.”

“Ya, kalau ndak berani. Kalau Pak Harto berani, siapa yang akan bertanggung jawab kepada Allah, kepada umat?”

“Kalau kita terima, siapa yang tanggung jawab kepada Allah, kepada umat?“

“Saya.”

Akhirnya NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Walaupun tadinya tidak ada yang setuju Pancasila sebagai asas tunggal, tetapi begitu Nahdlatul Ulama menerimanya, mengubah AD/ART yang semula berasaskan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah menjadi Pancasila, seluruh kiai mau menerima. Maka, terbentuklah assawadul a'zdham yang mau menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sejarah belok lagi. Muhammadiyah, DDII, dan ormas-ormas seperti PGI dan KWI juga sebelumnya mau menolak. Tetapi begitu NU menerima asas tunggal, semua ikut terima.

Isu kontroversial berikutnya di tubuh NU adalah reformasi. Banyak yang tidak setuju Pak Harto diturunkan, karena itu terlalu berisiko. Orde Baru sudah membangun kemapanan begitu lama; jika diruntuhkan, risikonya adalah instabilitas. Sampai dengan matinya mahasiswa-mahasiswa Trisakti, masih banyak yang tidak setuju. Saya sendiri pada waktu itu mengenakan kain hitam di lengan, untuk menunjukkan dukungan, sendirian saja di Rembang. Yang lain-lain masih bingung, ikut reformasi atau tidak. Tetapi kemudian terbentuk assawadul a'zdham yang menyetujui reformasi. Assawadul a'zdham adalah cara NU menyelesaikan masalah, sama seperti bertanya kepada para guru, istikharah, dan sejenisnya.

Mengakui Masalah, Menemukan Solusi

Dalam pergulatan politik, NKRI adalah kendaraan bagi NU untuk berjuang demi peradaban. Dunia sedang membutuhkan visi tentang peradaban masa depan yang mulia dan kita sudah memiliki rumusannya dalam pembukaan UUD 1945. Keputusan Nahdlatul Ulama pada muktamar ke-27, tentang Ukhuwah Basyariah, tidak lain adalah cita-cita peradaban dunia yang mulia, yang harus kita perjuangkan dalam pergaulan internasional. Politik luar negeri harus dikonsentrasikan kepada perjuangan ini.

Dan perjuangan dalam membangun peradaban dunia berarti kita memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Artinya,

pertama-tama kita harus tahu masalahnya apa dan harus mau mengakui bahwa itu masalah. Jika tidak mau mengakui ada masalah, tidak mungkin kita bisa berpikir tentang solusinya. Sekarang, jika fikih mengatakan bahwa orang kafir itu harus dimusuhi dan halal darahnya, apakah ini masalah atau tidak? Apakah fikih semacam itu hari ini menjadi masalah atau tidak? Akui sebagai masalah. Supaya bisa kita pikirkan jalan keluarnya.

Fikih mengatakan bahwa khilafah adalah cita-cita politik Islam yang paripurna, karena semuanya harus diarahkan kepada persatuan umat Islam di seluruh dunia. Dan itu dasarnya adalah wilayah. Ada banyak aspek fikih yang dasarnya adalah wilayah. Misalnya kalau ada mayat tidak dikenal, apakah wajib dirawat sebagai mayat muslim atau tidak, pertimbangannya adalah wilayah di mana mayat itu ditemukan. Jika ia ditemukan di wilayah Darul Islam, ia wajib dirawat sebagai muslim. Kalau ia ditemukan di Darul Kufur, tidak wajib.

Menurut fikih, hukum harus mengikuti syariah. Syariah diformulasikan dalam yurisprudensi oleh mujtahid yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dengan metodologi yang sudah ditetapkan. Masalahnya, kita saat ini mempunyai negara nasional yang hukumnya dirumuskan oleh orang-orang yang bukan mujtahid. Orang-orang kafir ikut merumuskan hukumnya karena mereka menjadi anggota parlemen. Wajib atau tidak kita taat pada hukum yang metodologinya tidak persis dengan yang ditetapkan menurut syariah?

Itu masalah dan, jika tidak ada jalan keluar, berarti semua umat Islam di mana-mana wajib berontak kepada negara yang tidak menggunakan identitas Islam.

Saya juga tidak setuju jika ISIS dikatakan sebagai Khawarij, atau di luar Islam. Mereka itu orang-orang Islam. Fikih yang mereka anut pun sama dengan kita, yaitu fikih empat mazhab. Persoalannya, ISIS ngotot melawan Amerika, membalas invasi Amerika, dan memerlukan ideologi yang cukup kuat untuk melakukannya. Maka, mereka

menemukan sesuatu di dalam turats dan memaksakan penerapan fikih klasik itu di dalam praktik. Semua pakai dalil. Potong tangan, perbudakan, dan lain sebagainya.

Menghukum mati juga begitu, ada dalilnya. Bedanya zaman dulu gak ada truk dan gak ada senapan. Sekarang mereka memakai teknologi canggih itu. Orang-orang dinaikkan truk lalu diikat dan disuruh tengkurap di atas tanah, sampai seratusan lebih, dan kemudian ditembaki satu demi satu pada kepala, sampai habis. Padahal mereka bukan tentara perang, mereka orang-orang sipil. Secara fikih halal atau tidak tindakan seperti ini? Halal. Kalau imamnya memilih bunuh, bunuh saja. Itu halal.

Dan, kita tahu, mereka seperti itu bukan tanpa sebab. Irak semula adalah negara stabil, walaupun diperintah oleh diktator, kemudian diinvasi. Wajar jika mereka marah dan kemudian membalas. Kalau Amerika memperlakukan hal yang seperti itu kepada Indonesia, saya pasti jadi teroris. Saya akan galang Banser untuk menjadi teroris.

Bagaimanapun, kita harus memandang segala sesuatu dengan adil, dan kita berlaku tidak adil jika mengatakan bahwa ISIS itu bukan Islam, atau Islam yang menyempal, dan sebagainya. Dengan menudingkan jari hanya kepada mereka, kita abai pada Amerika yang telah mendorong mereka menjadi seperti itu. Kita menganggap Amerika tidak punya salah sama sekali dan yang salah adalah orang-orang Irak yang menyempal dari Islam. Tidak bisa begitu.

Saya pernah diundang oleh Dubes Inggris di Jakarta. Dia bilang ada imam-imam di Inggris yang mengadakan gerakan menolak menyalati mayat para teroris. Jadi, jika ada teroris mati, masjid-masjid di sana tidak ada yang mau menyalati dan dia mengajak saya ikut dalam gerakan itu. Saya bilang, "Tidak bisa! Kalau ada teroris di Inggris mati dan tidak ada orang Inggris yang mau menyalati, saya akan datang untuk menyalatinya, sebab dia muslim. Kalau dia tidak disalati, kita semua seluruh dunia ikut berdosa. Kita harus adil."
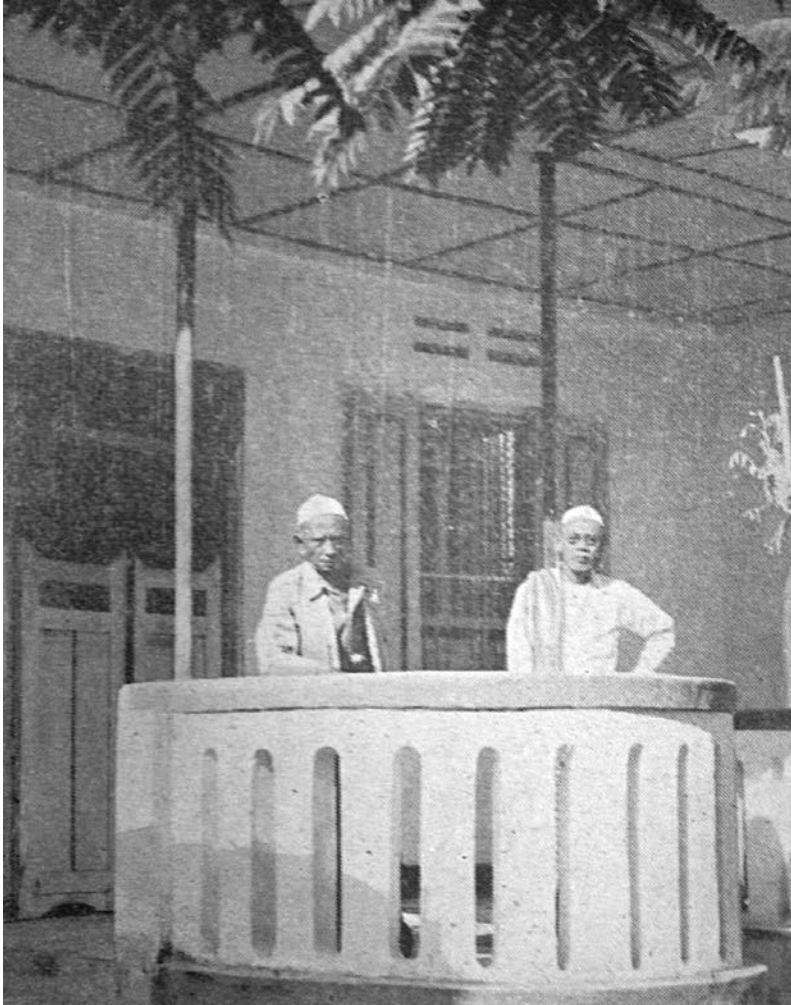
KH. Wahab Hasbullah bersantai di belakang rumahnya di Pondok Pesantren Tambakberas ditemani adik iparnya, KH. Bisri Syansuri tahun 1955.

Masalahnya bukan pada orang-orang ini. Masalahnya ada di dalam turats, fikih klasik, yang masih kita anggap sebagai pegangan yang mu'tabar. Kalau kita paksakan turats untuk dilaksanakan sekarang, pasti terjadi kekacauan di mana-mana. Itu harus kita akui sebagai masalah. Jangan menyebut-nyebut soal moderat, sebab wasathiyah itu konsep yang omong kosong, seolah-olah ada Islam yang ghairu wasathiyah.

Lalu, moderat sendiri itu apa? Apakah ia berarti tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Artinya, Islam jangan seratus persen, lima puluh persen saja cukup. Ketidakjelasan inilah yang kemudian disambut oleh orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sebagainya. Mereka bersemangat menyampaikan konsep "Islam Kaffah", Islam yang bulat, Islam yang seratus persen. Mereka bilang Islam moderat itu hanya 50 persen. Saya pikir, saya juga tidak akan mau disuruh menjadi Islam hanya 50 persen.

Upaya mencari jalan keluar tidak seperti itu. Kita harus berani mengakui ada masalah, dan dari sana kita mencari jalan keluar dari masalah.

Kita harus mengakui dan kita harus berbicara kepada semua orang di seluruh dunia tentang masalah ini. Di dalam fikih, dalam hal terjadi konflik, aturan fikihnya adalah kita harus membela sesama muslim dan memerangi orang yang memerangi kelompok Islam. Tetapi kalau ini kita lakukan, runtuhlah dunia dengan serta merta. Sementara itu, kalau kita tidak melakukan, fikihnya mengatakan begitu.

Berarti ada masalah di sini, dan kita harus akui sebagai masalah. Kita harus bicara kepada dunia tentang masalah-masalah ini supaya seluruh dunia ikut memikirkan jalan keluarnya. Dan ini bukan hanya persoalan muslim dan non muslim. Ini juga menyangkut juga pandangan-pandangan masyarakat di luar Islam. Orang Kristen memiliki pandangan yang mirip; orang Yahudi memiliki pandangan

yang mirip juga; orang Hindu kurang lebih sama. Di negara Komunis seperti China, semua orang yang bukan Komunis tidak boleh nongol. Rasisme di Barat masih marak. Orang Hindu di India bisa semena-mena tiap saat pada orang Islam. Orang Buddha di Myanmar membantai umat Islam. Rezim Islam? Sudah saya contohkan di atas.

Maka, kita harus mencari jalan keluarnya, bersama-sama dengan manusia-manusia lain, dan kita harus kembali kepada Ukhuwah Basyariah. Dan, sebelum ikut serta di dalam perjuangan peradaban dunia, pertama-tama kita harus mendudukkan secara benar NKRI sebagai wasilah.

Wasilah NKRI

Sekarang, jika kita ingin menjadikan NKRI sebagai wasilah untuk cita-cita yang kita yakini, kita harus bertarung untuk memenangkan NKRI, dari mereka yang ingin menggunakan NKRI untuk tujuan-tujuan lain, dari mereka yang ingin menggunakan NKRI untuk mengeruk keuntungan-keuntungan pribadi, dari mereka yang ingin menggunakan NKRI untuk menumpuk harta sendiri, dari mereka yang ingin menggunakan NKRI untuk melestarikan dinasti kekuasaan di dalam keluarganya sendiri. Kita harus menyelamatkan NKRI dari orang-orang seperti ini.

Kita tidak berpikir perjuangan ini semata-mata untuk kejayaan NU: ini soal memperjuangkan peradaban masa depan yang lebih mulia untuk seluruh umat manusia. Karena wasilahnya adalah NKRI, maka kita harus bertarung untuk memenangkan NKRI dan menjaga keutuhannya. Selanjutnya, kita berjuang supaya kekuatan-kekuatan yang ada di dalam NKRI, termasuk sumberdaya-sumberdayanya, termasuk kekayaannya, digunakan untuk perjuangan mencapai cita-cita peradaban.

Itu perjuangan yang memerlukan kesungguhan, yang memerlukan tidak hanya kerja keras, tetapi juga transformasi pola

pikir. Kita harus bangkit dan menolong diri sendiri. Ini tidak mudah, sebab pada kenyataannya kita, dan rakyat pada umumnya, dalam keadaan yang sangat lemah. Begitu lemahnya, sampai-sampai mereka sudi menjual milik yang sangat berharga dengan harga murah.

Pemilu adalah nasib kita dalam lima tahun ke depan, sangat mahal, tetapi kita menjualnya dengan harga murah: seratus ribu, dua ratus ribu, tiga ratus ribu. Murah sekali.

Dan berapa harga NU? Terpaksa NU dijual murah juga karena kita tidak berdaya. Karena itu kita harus mengubah orientasi dan pola pikir kita. Dengan pola pikir yang berbeda, kita akan bisa melihat lebih jernih masalah-masalah di dalam organisasi NU dan bagaimana menjadikan kehadiran NU benar-benar bermakna bagi masyarakat.

Ketika bicara tentang kepengurusan NU, kita tidak bisa lagi hanya bicara soal manajemen organisasi. Pertama, karena Nahdlatul Ulama tidak punya anggota yang terdaftar, tidak punya anggota resmi, tidak ada membership, yang ada adalah fellowship, kesertaan. Kesertaan ini, kalau dikaitkan dengan teritori, ia akan menjadi citizenship, kewargaan. Itu sebabnya selama ini kita hanya mengenal warga NU, dan bukan anggota NU.

Implikasi dari kewargaan adalah ia membutuhkan lebih dari sekedar manajemen organisasi, tetapi governance atau tata kelola. Kita harus mulai bicara tentang pemerintahan NU. Ini paradigma baru: NU dikelola sebagai pemerintahan. Selama ini kita hanya berpikir tentang pemerintahan yang dikaitkan dengan negara. Kita akan membicarakannya dalam bagian selanjutnya.

***
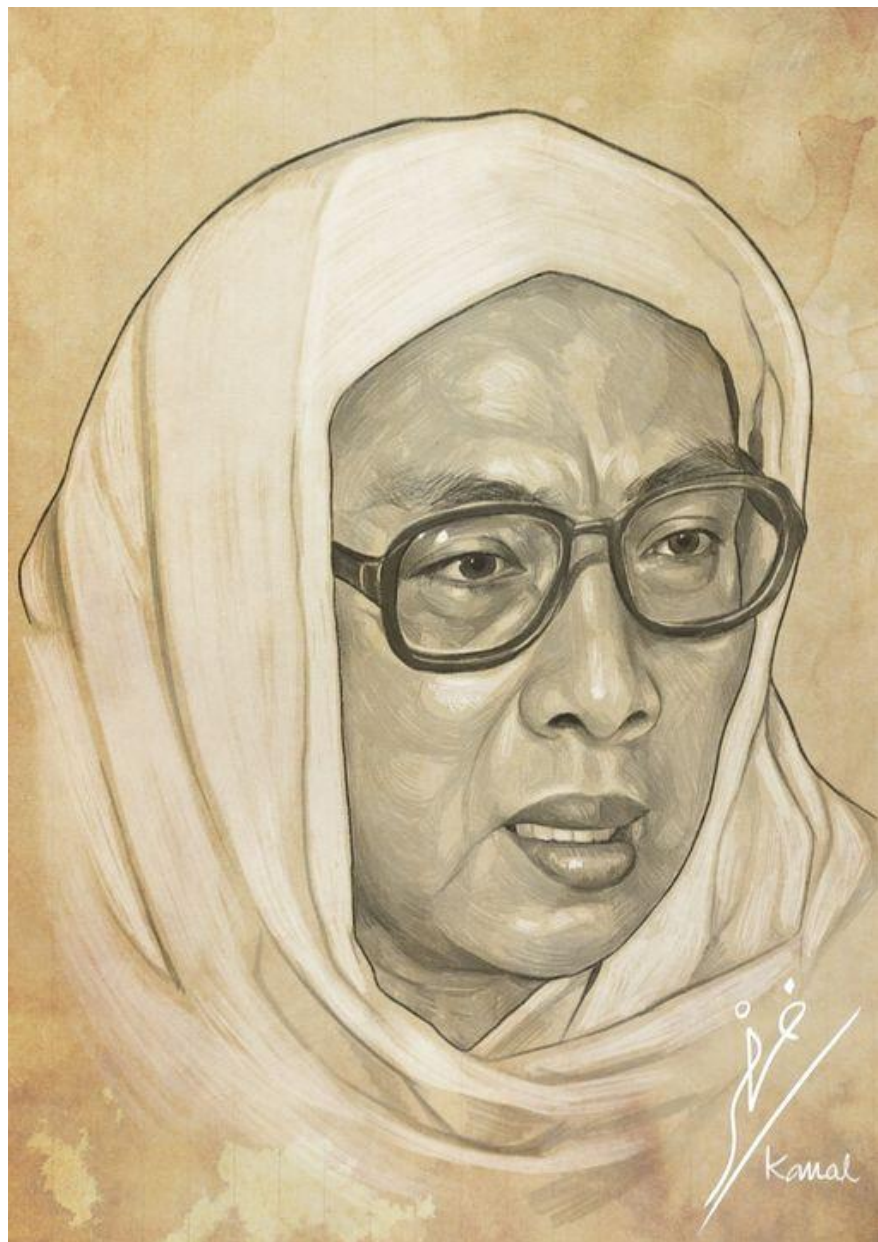
BAB III MENGENALI JATI DIRI DAN KEHENDAK ORGANISASI

Sebuah organisasi bisa terjebak dalam kejumudan, menjadi tumpul dan tak terarah, serta para pengurusnya tak melakukan apa-apa selain menimang dan mengelus-elus SK kepengurusan. Orang ingin menjadi pengurus dan mereka dengan cepat melupakan apa yang harus dilakukan begitu mereka dipercaya menjadi pengurus. Ini masalah serius, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menaruh kepercayaan dan menyandarkan sebagian aspirasi mereka kepada organisasi itu.

Hasil survei terbaru Alvara menyebutkan bahwa 39% populasi muslim di Indonesia mengaku anggota NU, lebih 50% berafiliasi kepada NU, dan sekitar 70% menempatkan NU pada "top of mind" mereka. Menempatkan NU pada top of mind berarti menjadikan fatwa-fatwa NU sebagai pegangan dalam situasi tertentu yang mengharuskan mereka menentukan sikap. Menempatkan NU pada top of mind berarti menunggu kepemimpinan sosial (dan politik) para pemimpin NU di berbagai tingkatan.

Dengan rentang pengaruh seluas itu, NU berada dalam posisi memikul tanggung jawab terbesar dalam mengukir wajah masyarakat. Dan, dengan tanggung jawab sebesar itu, NU seharusnya menjadi subyek dengan rencana dan tindakan yang skalanya sama besar dengan tanggung jawabnya. Jika NU membiarkan diri menjadi

Suasana sidang khusus Syuriah pada Muktamar ke-19 NU Palembang. Nampak depan KH. Ilyas Ruhiyat, KH. Wahab Hasbullah, KH. Ridwan Abdullah, & KH. Bisri Syansuri

sekadar objek yang larut dalam arus agenda-agenda yang dibuat entah oleh siapa di luar sana, tanpa kehendak apalagi kemampuan bernegosiasi secara desisif untuk menegaskan perannya, tanpa wibawa sebagai organisasi yang mestinya ikut menentukan arah dinamika masyarakat, itu sama halnya NU menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diletakkan di pundaknya.

NU harus berjuang membangun kapasitasnya untuk hadir secara lebih bermakna di tengah masyarakat. Untuk itu, NU harus sungguh-sungguh memahami jati dirinya, memahami kedudukannya di tengah keseluruhan konstelasi dan gerak dinamis masyarakat, memahami kepentingan-kepentingannya, memahami tujuannya, membangun strateginya, menetapkan target-target dan agenda-agendanya. Hanya dengan cara itu NU hadir dan bermakna.

Jam'iyyah Diiniyyah Ijtimaa'iyyah

Disadari atau tidak, diakui atau tidak, orang NU di berbagai tingkatan, baik pengurus maupun warga, lebih membangun pola pikir dan mengembangkan wawasan yang condong pada masalah keagamaan. Mereka mencurahkan hampir seluruh energi dan kepedulian mereka untuk urusan-urusan seputar agama, dan kurang menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial-ekonomi dan berbagai hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Padahal telah dinyatakan bahwa khidmah NU harus memiliki dimensi ganda, yaitu keagamaan dan kemasyarakatan.

Lebih memprihatinkan lagi, wawasan tentang khidmah keagamaan pun cenderung terkungkung pada hal-hal yang menyangkut peribadatan dan dimensi agama sebagai identitas kelompok. Dominasi pola pikir keagamaan semacam ini menjadikan NU sensitif terhadap isu-isu sektarian (pertentangan antarmazhab), tetapi kurang tanggap terhadap masalah-masalah masyarakat yang dianggap bukan masalah agama. Contoh?

Ini contohnya. Jika ada kelompok yang menyindir-nyindir Yasinan sebagai amalan bid'ah, maka kita akan sigap dan cepat menangkisnya. Sementara jika ada orang kere di pinggir laut, tak punya perahu tak punya rumah, kita tidak paham harus berbuat apa. Ya Allah, kok begini amat?!

Contoh lagi. Orang NU akan menyambut penuh semangat wacana dan kegiatan-kegiatan menentang radikalisme, bukan semata-mata karena menyadari bahaya radikalisme itu, tetapi karena di sana ada gairah untuk menegaskan identitas keagamaan, ada heroisme untuk dikedepankan di hadapan kelompok mazhab yang berbeda. Sementara itu, terhadap isu-isu "duniawi" yang tak kalah penting, seperti kebutuhan koreksi terhadap struktur ekonomi yang timpang, pengendalian kerusakan alam akibat eksploitasi ekonomi, sistem hukum yang digerogoti korupsi, kebangkrutan etika dan moral

dalam politik, dan sebagainya, mereka nyaris tak menunjukkan perhatian.

Gejala-gejala tersebut adalah sinyal yang mengabarkan bahwa situasinya sudah mendesak untuk melakukan sesuatu. Ada yang timpang dan kita harus bangkit untuk membangun kembali keseimbangan. Orang NU harus mengembalikan pola pikir mereka kepada idealisme awal: memahami NU sebagai jam'iyyah diiniyyah ijtimaa'iyyah, sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Mengembalikan keseimbangan antara kepedulian terhadap masalah-masalah keagamaan dan kepedulian, solidaritas, keterlibatan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan adalah jalan terbaik bagi kita hari ini untuk menjadikan NU bermakna di tengah masyarakat.

Kewargaan, Kepentingan, dan Khidmah Inklusif

Dengan tinjuan yang lebih cermat, kita bisa melihat bahwa ketimpangan dalam wawasan pengabdian NU berakar pada seluk-beluk (nature) kewargaannya. NU tidak memiliki sistem keanggotaan terdaftar. Tidak ada juga prasyarat-prasyarat yang dilembagakan secara resmi bagi kualifikasi keanggotaannya. Maka, apakah seseorang adalah anggota NU atau bukan, itu lebih tergantung pada perasaan masing-masing.

Di tengah gelaran masyarakat umum yang heterogen, keberadaan warga NU pun tidak menghadirkan kategori sosial tersendiri. Konsekuensinya, ketika muncul pertanyaan tentang kepentingan sosial-ekonomi warga NU, misalnya, orang tidak menemukan cara untuk mengidentifikasinya karena tidak ada indentifikasi subjek. Kalau subjeknya tidak diketahui, bagaimana mungkin menyimpulkan kepentingannya?

Pernyataan-pernyataan bahwa penduduk miskin itu orang NU, petani itu orang NU, yang tingkat pendidikannya rendah adalah orang NU, yang terpinggirkan adalah orang NU, dan semacamnya itu lebih

merupakan prasangka-prasangka belaka, dan sama sekali tidak menunjukkan karakter spesifik warga NU.

Dalam ketidakjelasan tersebut, satu-satunya yang masuk akal untuk dipersepsikan sebagai dasar kepentingan NU adalah identitas keagamaannya, yakni Islam berikut embel-embel mazhabnya, yang dalam tataran sosial jelas lebih berfungsi simbolik ketimbang operasional. Maka, wajar apabila segala artikulasi dan gerak-gerik NU hanya beredar di seputar identitas simbolik tersebut. Bahkan proyek-proyek yang diklaim sebagai wujud pengabdian sosial pun lahir dari motivasi menghadirkan identitas simbolik ini, dengan orientasi yang kurang-lebih supremasis.

Atmosfer di atas pada gilirannya memupuk dua gejala utama dalam dinamika aktivisme NU. Di lingkungan masyarakat yang kehadiran budaya NU-nya kuat, seperti di Jawa dan beberapa propinsi di luarnya, identitas simbolik NU diperalat sebagai senjata untuk menggalang dukungan politik. Sebaliknya, di lingkungan masyarakat yang sepi-NU, para aktivisnya tidak mampu menemukan gagasan tentang apa yang bisa diperbuat, karena tidak dapat mengenali warganya, apalagi memobilisasi mereka. Kepengurusan mereka tidak memiliki bukti keberadan, bahkan papan nama pun mereka tak punya. Satu-satunya bukti keberadaan mereka adalah SK, dan kepengurusan semacam ini tidak sedikit jumlahnya.

Telah disinggung di atas bahwa, dalam konteks Indonesia, NU secara keseluruhan memiliki rentang pengaruh yang luas, dan fakta itu sudah selayaknya diikuti kesadaran akan besarnya porsi tanggung jawab NU terhadap masyarakat. Dalam wawasan ini, aktivisme NU seharusnya tidak hanya diarahkan untuk mengumpulkan dan memupuk keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga diorientasikan kepada kemaslahatan masyarakat secara kesuruhan. Operasionalisasi prinsip ini dapat menjadi jalan keluar, baik dari bahaya politisasi NU maupun dari bencana kematian organisasi.

Dengan mengorientasikan khidmah secara inklusif bagi kemaslahatan masyarakat tanpa pandang bulu, NU melepaskan egoisme identitasnya. Aktivisme diarahkan kepada pemecahan masalah-masalah nyata di lingkungannya. Kebutuhan partisipasi politik pun —baik dukungan maupun evaluasi— akan dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan rasional menyangkut isu-isu aspiratif yang substansial, bukan tribalisme identitas.

NU tidak perlu bersusah-payah memilah-milah, mana yang warga NU mana yang bukan, untuk melibatkan diri dalam pemecahan masalah yang nyata di lingkungannya. Masalah apa pun, menyangkut siapa pun, asalkan secara normatif mengharuskan pelibatan NU dalam upaya pemecahannya, NU harus turun tangan. Dengan demikian, di tengah masyarakat yang secara alami penuh masalah ini, mustahil para aktivis NU kekurangan gagasan untuk bergerak.

Selanjutnya harus disadari pula bahwa pilihan untuk melibatkan diri dalam upaya pemecahan masalah masyarakat pada gilirannya akan bersirobok dengan pilihan pihak-pihak lain. Kepada siapa NU harus berpihak, itu adalah pilihan normatif. Lantas, dari mana sumber normanya? Tentu saja dari nilai-nilai luhur Islam 'ala Ahlis Sunnah wal Jama'ah An Nahdliyyah yang pasti akan memendarkan panduan-panduan bernas, asalkan tidak dibonsai dan dikotakkan menjadi sekedar simbol-simbol ritual dan kutipan-kutipan dangkal.

Sejalan dengan tuntutan kebutuhan yang muncul, wacana tentang pandangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An Nahdliyyah akan berkembang lebih subur dan segar sebagai wawasan kontekstual. Alangkah agung kehadirannya ketika istighotsah kubro dan majlis selawat tidak dipandang lebih Aswaja ketimbang advokasi hak-hak rakyat Papua, misalnya, atau kerja bakti membersihkan kali.

Jelas bahwa untuk menjadikan gambaran di atas mewujud dalam dinamika NU, terlebih dahulu pola pikir para aktivis NU harus ditransformasikan. Dan untuk itu diperlukan strategi tersendiri.

Kewargaan dan Kuasa Kepemimpinan

Telah lama menjadi obsesi para aktivis dan pemeduli NU, bagaimana agar al-jama'ah (komunitas, akar rumput) yang sedemikian kokoh eksistensinya dapat sungguh-sungguh ditransformasikan menjadi al-jam'iyyah (organisasi). "Menjam'iyyahkan jama'ah" adalah slogan yang telah digaungkan berpuluh-puluh tahun, tetapi tak kunjung menjadi kenyataan. Ketidakteraturan dan berseraknya kepingan-kepingan komunitas seolah merupakan watak bawaan sehingga segala gairah untuk mengatasinya senantiasa berujung keputusasaan.

Sebagian orang menuding langkanya ketrampilan administrasi sebagai masalah dasar. Sebagian lain bahkan menuduh watak kultural pesantren sebagai biangnya. Tetapi diagnosa semacam ini tidak pernah membawa orang pada jalan keluar: tidak ada gagasan yang bisa dilaksanakan, tak ada langkah untuk mencapai tujuan. Ikhtiar demi ikhtiar dilakukan, sebagian besar bersifat coba-coba, dan semuanya patah ketika hasil yang diharapkan begitu jauh dari gapaian.

Yang absen dari wacana pembangunan jam'iyah justru dua asumsi yang paling mendasar, yaitu asumsi tentang seluk-beluk kewargaan dan asumsi tentang tujuan. Ketika orang menganganankan suatu organisasi NU yang mampu mengerahkan seluruh warganya untuk bergerak bersama, lebih dulu mestinya mereka menanyakan: Apakah seluk-beluk kewargaan NU memungkinkan bagi angan-angan itu untuk menjadi kenyataan? Lebih jauh, bergerak bersama untuk tujuan apa?

Telah dimaklumi bahwa NU tidak memiliki keanggotaan yang terdaftar. Bahkan, walaupun diwarnai "rasa budaya" yang seragam, persepsi orang per orang tentang dasar kewargaan masing-masing bisa berbeda-beda. Kita akan mendapatkan jawaban beragam ketika menanyakan atas dasar apa orang menjadi warga NU. Ada yang

karena keturunan, pertemanan, atau sekedar suatu momentum perjalanan hidup yang terjadi kebetulan.

Singkat kata, kewargaan NU adalah kesertaan yang teramat longgar. Orang bisa merasa menjadi warga tanpa harus punya urusan dengan pengurusnya. Bukan kebetulan bahwa, sekalipun yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah "anggota", istilah "warga" justru lebih populer. Akibatnya, idealisasi organisasi NU yang kepemimpinannya punya kuasa untuk mengendalikan setiap anggotanya hanyalah mimpi kosong. Kuasa kepemimpian NU hanya sampai batas mengarahkan.

Mengikuti rumus politik, kuasa itu seperti iman. Ia bisa bertambah bisa berkurang. Untuk mempertahankan efektivitasnya, diperlukan pemeliharaan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pemeliharaan itu diwujudkan dalam keterlibatan kepemimpinan sebagai subyek kuasa dalam vokasi dan advokasi kepentingan-kepentingan warga sebagai obyek.

Dalam bahasa pesantren, ini adalah fungsi "ri'aayah". Semakin intens kepemimpinan NU terlibat dalam dinamika kepentingan-kepentingan warga, akan semakin besar dukungan warga kepadanya dan semakin kuat pengaruh kepemimpinan dalam mengarahkan mereka.

Dengan struktur berlingkup nasional dan dengan anggaran pengaruh berluasan nasional, koherensi (kepaduan) kepemimpinan adalah kunci. Sikap, arah, dan langkah dari keseluruhan struktur kepemimpinan, pada segenap tingkatan dan sektor, harus memperlihatkan kepaduan itu. Mereka harus kompak, tak boleh berselisih. Wujud kepemimpinan di setiap tingkatan mencerminkan tidak hanya aspirasi basis, tetapi juga soliditas instrumen organisasi. Maka, kepentingan pengendalian oleh tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi harus mendapat ruang dalam pembentukan formasi kepemimpinan di bawahnya.

Tentu saja, rumus macam itu belum cukup. Untuk membangun koherensi kepemimpinan yang optimal dibutuhkan strategi tersendiri pula.

Kepentingan dan Agenda

Ditanya tentang kegemaran beliau akan ziarah kubur, Gus Dur menjawab, "Karena ahli kubur tak lagi punya kepentingan."

Itu sebabnya mereka, ahli kubur, tidak lagi berbuat apa-apa, tidak bergerak, tidak berikhtiar, dan tidak berorganisasi.

Tapi segala sesuatu sebelum kubur adalah kepentingan. Tak terkecuali NU. Maka, pengertian hadapan (mafhum mukhalafah) dari penyataan di atas adalah bahwa, jika ada organ NU yang tidak bergerak, berarti ia berkepentingan untuk tidak bergerak atau tidak memahami kepentingannya.

Padahal, kepentingan adalah dasar utama dalam percaturan masyarakat. Kerjasama atau kompetisi, semua bergantung kepada kepentingan. Ingat adagium yang terkenal sekali: "Tidak ada kawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan."

Kepentingan terbit dari dua sumber, yaitu nilai-nilai dan kehendak untuk mendapatkan sumber daya-sumber daya. Jelas bahwa NU terikat pada ajaran Islam 'ala Ahlis Sunnah wal Jama'ah. Itu adalah salah satu sumber kepentingannya. Di sisi lain, sebagai aktor percaturan duniawi, NU pun berkepentingan untuk memperoleh sumberdaya-sumberdaya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak mana pun yang ia wakili.

Di bagian terdahulu kita telah membahas bahwa NU semestinya menyeimbangkan kepedulian (baca: kepentingan) yang menyangkut mazhab keagamaan dengan kepentingan (duniawi) kemasyarakatan. Kita juga sudah membahas perlunya memperluas basis kepentingan melampaui batas-batas kelompok sendiri. Sebetulnya banyak rumusan keputusan organisasi, termasuk AD/ART dan program hasil

Muktamar, yang telah mencerminkan hal-hal tersebut. Namun, semuanya berhenti hanya sebagai rumusan, yang tak pernah bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang mampu mengubah pandangan orang terhadap NU.

Masalahnya, pertama, rumusan-rumusan tersebut lebih banyak terserak dan tidak dihimpun dan direkatkan dalam satu perspektif yang utuh. Kedua, belum ada penjabaran yang lebih rinci ke dalam langkah-langkah operasional. Ketiga, belum ada wawasan untuk menggerakkan seluruh perangkat organisasi, termasuk jaringan kepengurusan hingga ke tingkat ranting, dalam strategi yang terkonsolidasi.

Masalah-masalah di atas menjadikan gestur NU tidak berkembang dari posisinya yang hanya terkurung di wilayah keagamaan. Semua orang cenderung melihat NU hanya relevan sebagai "kelompok toleran", "penjaga NKRI", "penghadang radikalisme", dan urusan-urusan yang sejenis itu. Berbagai pihak lantas merasa hanya perlu bekerja sama atau mendukung NU atas dasar kepentingan tersebut. Para donatur memberi sumbangan kepada NU dengan motivasi yang sama seperti orang menyumbang kelompok siskamling.

Mengidentifikasi masalah adalah cara yang harus ditempuh untuk menemukan pemecahannya. Hanya ketika kita berhasil merumuskan secara tepat apa masalahnya, kita bisa secara akurat menemukan strategi mengatasinya. Secara garis besar, kita bisa mengatakan bahwa NU harus meningkatkan kapasitas khidmah (pengabdian) dengan mengembangkan wawasan tentang haluan organisasi yang mencakup partisipasinya dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang luas, seperti masalah sosial-ekonomi, budaya politik, lingkungan hidup, dan sebagainya, hingga keterlibatan yang lebih substansial dalam percaturan internasional. Dengan itu NU menetapkan kedudukannya dalam konstelasi kepentingan-kepentingan.

Berangkat dari model pengabdian yang sudah ditetapkan itu, untuk selanjutnya NU mengembangkan strategi yang terkonsolidasi, yakni langkah-langkah sistematis berupa rangkaian kegiatan atau agenda organisasi. Ini akan membuat segala sesuatunya lebih terang. Barangsiapa memiliki kepentingan yang selaras dengan kepentingan NU dalam bidang-bidang yang relevan, ia dapat ikut serta dalam kerjasama pelaksanaan agenda-agenda tersebut.

Dengan demikian, pola hubungan antara NU dengan berbagai pihak dapat dibangun di atas landasan yang lebih bermartabat. Hubungan yang terbangun bukan lagi hubungan antara penyokong yang murah hati dan penerima sumbangan yang penuh syukur, melainkan kerjasama antara pihak-pihak yang setara berdasarkan kepentingan yang sama menuju tujuan bersama. Dalam seruan yang agak muluk, kita katakan: mari kita bangun cita-cita bersama.

Transformasi Pola Pikir (Mindset)

Mengenai pola pikir, Albert Einstein, ilmuwan yang menjadi ikon kejeniusan manusia, memiliki ucapan yang patut diingat: Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama dengan yang kita gunakan untuk menciptakan masalah.

"Mengharapkan hasil yang berbeda tanpa mengubah pola pikir," kata Eintein, "adalah gila."

Jadi, itulah yang dibutuhkan NU untuk mengembangkan kapasitas khidmahnya: Transformasi pola pikir, yang dilanjutkan dengan transformasi mentalitas. Hanya ketika NU mengubah pola pikirnya, orang-orang lain akan otomatis mengubah pola pikir mereka tentang NU.

Menyangkut pola pikir ini, sekurang-kurangnya NU harus memperbarui wawasannya dengan mengubah setidaknya tiga pola pikir: Pertama, pola pikir tentang lingkup bidang khidmah dan jangkauan sasarannya. Kedua, pola pikir tentang makna program.

Ketiga, pola pikir tentang hubungan antartingkatan kepengurusan dalam pelaksanaan program.

Wawasan tentang lingkup bidang khidmah dan jangkauan sasarannya telah dibahas di depan, yang intinya adalah memperluas dan membongkar batas-batas yang membuat NU mengungkung dirinya sendiri. Wawasan tentang makna program bersifat lebih teknis, tapi fundamental.

Selama ini kepemimpinan NU di berbagai tingkatan mengeksplorasi berbagai ragam gagasan tentang kegiatan-kegiatan dan menyelenggarakan apa yang mereka gagas. Kegiatan-kegiatan itu diwujudkan dalam proyek-proyek yang dalam alam pikiran para perancang dan aktivisnya dimaksudkan sebagai program organisasi. Semaraknya cukup terasa. Tapi semarak berbagai jenis kegiatan itu kurang satu nalar, kurang satu napas, dengan arah dan tujuan-tujuan besar yang hendak dicapai.

Hal itu terjadi karena pola pikir kebanyakan pengampu program NU beranggapan bahwa program adalah proyek. Asalkan ada proyek, mereka merasa program sudah berjalan. Akibatnya, kita semua menjadi ahli proposal, sebab kita berpikir bahwa program sama dengan proyek.

Akibat lainnya, kita nyaris tidak mengkalkulasi bagaimana dampak suatu proyek dan bagaimana kaitannya dengan proyek-proyek lain. Kepentingan yang hadir pun menyempit sebatas terlaksananya proyek semata. Pola pikir ini pula yang telah memudarkan dan akhirnya melenyapkan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan bagi kebutuhan sehari-hari warga NU dan masyarakat pada umumnya.

Tentu saja gambaran di atas adalah citra diri yang menyedihkan. Itu sebabnya, untuk mengurangi pedih hati, kiprah tradisional warga berupa jemaah-jemaah ritual serta kiprah para kiai di pesanten masing-masing dan di kampung-kampung diklaim sebagai prestasi

NU yang tak terbilang. Itu tidak salah. Tapi jelas bahwa kiprah-kiprah tersebut bukanlah inisiatif organisasi NU, walapun pengurus NU seringkali diundang untuk memberi sambutan atau mau'idhoh hasanah di dalamnya. Itu, bagaimana pun, bukan capaian organisasi.

Para pengampu program NU harus sungguh memperhatikan nalar kepentingan-kepentingan besar yang diikuti dengan rincian strategi semesta untuk mencapainya. Tidak bisa mereka mengabaikan rumus-rumus dasar tentang strategi yang dijalankan dan capaian yang dikehendaki. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap strategi niscaya mencakup kesatuan nalar antara bentuk kegiatan (output) dan dampak ikutannya (outcome). Kita harus memahami bahwa di dalam bentangan masyarakat Indonesia dan dunia yang sedemikian beragam corak dan warnanya, selalu diperlukan pertimbangan-pertimbangan spesifik yang tersambung dengan realitas lingkungan setempat, yang tentu berbeda antara satu dan lainnya.

Wawasan-wawasan di atas bisa menjadi materi yang bagus untuk diceramahkan dalam forum-forum pelatihan kader, tetapi transformasi tidak akan pernah terwujud tanpa saluran operasional dan tanpa strategi untuk memperlancar prosesnya. Wawasan-wawasan itu adalah muatan. Muatan perlu wadah dan saluran. Tanpa wadah dan tanpa saluran, konsep-konsep yang dicekokkan kepada para kader di bangku-bangku pelatihan hanya akan membuat mereka keluar dengan dada sesak penuh rasa geregetan, namun tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ambyar.

Muatan berupa wawasan-wawasan itu harus diwadahi dalam suatu rancang-bangun organisasi yang ditopang struktur, fungsi dan mekanisme-mekanisme yang sesuai. Dalam kerangka ini, pertama-tama kita harus mengingat kembali karakteristik kewargaan NU.

Nalar organisasi mengasumsikan bahwa anggota adalah bagian dari instrumen organisasi yang dapat digerakkan dalam kendali kepemimpinan. Kita telah membahas bahwa ini hal yang tidak terjadi

di NU. Jangkauan kendali kepemimpinan NU hanya terbatas pada fungsionaris organisasi, sedangkan warga –beserta masyarakat luas— harus dipandang sebagai penerima khidmah organisasi (makhdumin bihim, beneficiaries).

Keseluruhan struktur organisasi beserta para fungsionaris di dalamnya dituntut menjalankan dua fungsi utama. Pertama, menyediakan layanan bagi kebutuhan-kebutuhan warga dan masyarakat luas. Kedua, menggulirkan strategi untuk mewujudkan tujuan-tujuan visioner Nahdlatul Ulama, yang di sana tercakup pula transformasi masyarakat secara keseluruhan.

Ketika NU mampu menyediakan layanan-layanan bagi kebutuhan masyarakat, yakni membangun fasilitas-fasilitas untuk keperluan itu, pada gilirannya NU perlu menetapkan mekanisme dan aturan-aturan objektif agar siapa pun yang membutuhkan layanan NU tersebut dapat mengaksesnya secara adil.

Lebih lanjut, dengan jangkauan sasaran khidmah yang luas, baik nasional maupun internasional, NU harus menetapkan anggaran capaian berupa “outcome” kiprah organisasi dalam skala yang luas pula, yang dirumuskan sebagai agenda semesta, baik nasional ataupun internasional. Anggaran capaian itu kemudian dijabarkan ke dalam strategi yang valid dan rinci, termasuk di dalamnya pembagian tugas dan pekerjaan di antara keseluruhan instrumen dalam struktur kepengurusan NU.

Mengingat beragamnya konteks realitas, yang disebabkan oleh karakteristik lingkungan yang pasti berbeda-beda, pembagian tugas dan pekerjaan itu harus pula sesuai dengan konteks realitas yang bersangkutan. Setiap pengurus cabang, misalnya, akan menerima tugas-tugas spesifik yang niscaya berbeda dari pengurus cabang lainnya.

Pembangunan fasilitas-fasilitas untuk pelayanan warga maupun untuk menjalankan strategi organisasi tentunya membutuhkan

pengerahan sumber daya, dan kita tahu bahwa kemampuan untuk menggalang sumber daya di antara berbagai sektor dan tingkat kepengurusan NU berbeda-beda. Di sinilah kepemimpinan NU dituntut menganggarkan penggalangan beragam sumber daya yang dibutuhkan dalam ukuran agenda semesta yang ditetapkan, dan kemudian mendistribusikannya kepada instrumen-instrumen organisasi, termasuk di antaranya cabang-cabang, sesuai penugasan yang telah dijatahkan.

Dengan kata lain, hubungan di antara berbagai tingkatan kepengurusan dalam pelaksanaan program harus dibangun dalam sistematika operasional yang kokoh. Jika kepemimpinan NU menjalankan tanggung jawab ini secara optimal, tak akan ada alasan bagi organ kepengurusan NU di tingkat manapun untuk tidak bergerak.

Melalui pemaparan di atas, kita bisa menetapkan bahwa struktur jam'iyah NU, dari PBNU hingga ke ranting-ranting, harus menjalankan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Operasionalisasi strategi menuju capaian-capaian visioner;
2. Menyediakan pelayanan untuk umum;
3. Menetapkan aturan-aturan (regulasi) untuk mengakses layanan yang disediakan;
4. Menggalang bermacam-macam sumberdaya dan mendistribusikannya.

Fungsi-fungsi utama tersebut, apabila kita letakkan dalam kerangka teori politik, akan paralel dengan fungsi-fungsi pemerintah. Kesamaan ini tidak berarti kita akan membangun negara dalam negara. Bagaimanapun, NU tidak memiliki kemampuan maupun legitimasi untuk menjalankan paksa fisik sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintahan sebuah negara. Ini adalah perwujudan peran

masyarakat sipil untuk menyokong pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan negara, baik dengan kerja sama maupun kontrol.

Walhasil, sebagai pendamping pemerintahan yang bekerja atas nama negara, jam'iyyah NU membangun kapasitas sebagai pemerintahan (suka rela) oleh masyarakat sipil. Kita bisa menyebutnya Pemerintahan Nahdlatul Ulama, Hukumah an-Nahdlah.

Itulah konsep-konsep kunci di dalam tata kelola NU.

Rais 'Aam PBNU KH. Abdul Wahab Hasbullah sedang meyakinkan muktamirin tentang kebijaksanaan yang ditempuh PBNU

Transformasi Mentalitas

Teramat sering kita mendengar agitasi tentang "membesarkan NU" sebagai seruan atau janji-janji, baik dari fungsionaris NU sendiri maupun dari "orang luar", ketika mereka sedang membutuhkan dukungan NU untuk memperoleh jabatan atau kedudukan, apa pun jabatan dan kedudukan itu. Frase itu terdengar manis di telinga, namun bisa kita pastikan bahwa ia tidak lebih dari "suara tanpa rupa".

Mereka yang menyerukan seperti itu mungkin lupa atau memang tidak pernah menyadari bahwa NU, pada kenyataannya, sudah besar sebelum kita lahir. Dan itu berkat jasa para pendahulu kita yang mulia, bukan akibat perbuatan mereka.

Bukan hanya sudah besar, NU membesar. Hasil Pemilu 1955 menunjukkan, Partai NU memperoleh 18% suara. Proporsi itu lantas dijadikan rumus oleh Pak Harto untuk membagi jatah hasil Pemilu 1971. Seperti disebut di bagian depan, hasil survei Alvara memperlihatkan bahwa kini 39% dari penduduk Muslim mengaku sebagai "anggota" NU, lebih dari 50% mengaku berafiliasi kepada NU. Apakah gerangan kiranya yang menjadikan NU membesar sedemikian rupa?

Ada gagasan bahwa untuk membesarkan NU di suatu daerah, kita perlu menyelenggarakan perhelatan besar atas nama NU di daerah itu, seperti Muktamar, Munas-Konbes, dan perhelatan nasional lainnya. Gagasan ini sudah dipraktikkan berkali-kali. Apa hasilnya?

Sulawesi Selatan pernah menjadi tuan rumah Muktamar 2010, NTB tuan rumah Munas-Konbes 2017, Jawa Barat empat kali dalam dua masa bakti terakhir menuanrumahi hajat nasional berupa Munas-Konbes dan Rapat Pleno PBNU.

Apakah NU membesar di daerah-daerah tersebut? Hasil Pemilu 2019 memberi tanda sebaliknya. Kultur organisasi NU di daerah-daerah itu juga biasa-biasa saja, seperti tidak ada muktamar atau munas.

Mungkin perlu dilakukan survei tersendiri untuk membuktikannya, tetapi saya menduga kuat bahwa sebagian besar warga NU mengidentifikasi diri sebagai NU tanpa merasa perlu berurusan dengan pengurusnya. Orang-orang lama kerasan berdiam di NU bukan karena kenyamanan yang disediakan oleh kepengurusan NU. Orang-orang baru bergabung ke dalam NU bukan karena terpesona oleh prestasi kepengurusan NU.

Saya berkeyakinan bahwa kebesaran NU adalah buah rohani, bukan duniawi. Kebesaran NU adalah anugerah Allah Subhanu wa Ta'ala sebagai pahala atas amal salih yang istikamah dari orang-orang mulia yang sungguh mencintainya. Yang paling kentara di antara mereka adalah kiai-kiai yang menyerahkan seluruh jiwa dan raga sepanjang hidup untuk khidmah kepada ilmu dan umat.

Nikmat yang tertentu (mu'arrafah) dianugerahkan karena sebab-sebab tertentu yang ada pada penerimanya. Selama sebab-sebab tertentu itu terpelihara, nikmat tertentu tersebut akan tetap padanya. Jika sebab-sebab tertentu ditelantarkan hingga luntur dan hilang, nikmat pun terbang.

Demikian ajaran Kiai Misbah Mustofa rahimahullah, Bangilan, Tuban, kepada saya, tetang tafsir atas firman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Ada tiga gejala yang senantiasa melekat pada kiai-kiai salih NU, alhamdulillah, hingga kini.

Pertama, ilmu. Bukan hanya keluasan dan kedalaman ilmu, tapi juga dedikasi paripurna dengan ketekunan, adab (tata krama), bahkan riyadlah (tirakat), yang ditegakkan dengan penuh disiplin oleh kiai-kiai salih sejak belajar, mengajar, hingga beramal. Segalanya disandarkan kepada ilmu.

Kedua, ri'aayah, yakni mengasuh dan membimbing umat dalam segala keadaannya. Para kiai salih melibatkan diri dalam segala macam hajat dan kesulitan umatnya secara langsung dan tanpa pilih-pilih. Itulah sebabnya, kesibukan terbanyak mereka adalah menerima tamu dan memenuhi undangan siapa saja yang membutuhkan.

Ketiga, ikhlas. Pada tingkat hakikat, ini memang tak siapa pun selain Allah yang bisa mengukurnya. Tapi pada tingkat budaya, jejak nilai-nilai ikhlas sangat kentara pada kiai-kiai kita. Kita bisa melihat itu dari penampilan, tutur kata, tindak-tanduk, dan cara bergaul mereka.

Tiga gejala (khishol) dari para pencinta NU itulah sebab dari anugerah berupa kebesaran NU. Para kiai salih itu adalah personifikasi NU. Ketika mereka mengikat kasih-sayang di antara umat, dengan sendirinya ikatan itu dipersepsikan sebagai kerangka NU. Selama ketiga khishol itu lestari, insnya Allah demikian pula kebesaran NU. Maka jelas sekali bahwa kebesaran NU itu adalah nisbat (atribut) dari jemaah, bukan jam'iyah. Kebesaran itu mewujud dan berkembang dalam jemaah.

Bagi jam'iyyah, kebesaran NU tidak dapat dipandang sebagai prestasi ataupun target capaian, melainkan amanah. Ia adalah aset yang diserahkan kepada jam'iyah untuk dikelola. Tentu saja maslahatnya harus sebesar mungkin kembali kepada jemaah (komunitas-komunitas, akar rumput, masyarakat luas) . Jangan sampai aset itu justru hanya ditangguk dan dimanfaatkan, atau istilah sekarang dimonetisasi –dijadikan sumber keuangan—untuk keuntungan pribadi-pribadi. Wal 'iyaadzu billaah.

Terkait dengan ini, tatanan organisasi amat menentukan. Prosedur dan ukuran (parameter) pembuatan keputusan harus ditetapkan dengan rumusan-rumusan yang terang dan tidak bermakna ganda. Demikian pula agenda-agenda organisasi jarus disusun secara sistematis serinci mungkin agar semakin sempit peluang untuk membelokkannya.

"Bang Napi", orang bertopeng yang pada 1990-an tampil di layar televisi untuk menutup acara berita kriminal, selalu mengingatkan kita: "Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan." Mentalitas memanfaatkan kesempatan, yang tentu tidak akan pernah sejalan dengan tujuan-tujuan jam'iyah, tidak mungkin bisa mencederai apabila "dikerangkeng" dalam konstruksi organisasi yang ketat. Sebaliknya, konstruksi organisasi yang dijalankan secara ajeg (istikamah) dapat membentuk mentalitas yang diinginkan melalui pengistikamahan pola perilaku.

Apabila jam'iyah mampu menghasilkan maslahat yang nyata dalam ukuran nilai-nilai jemaah, berarti amanah ditunaikan. Pada titik itu, tidak terlalu menjadi soal, apakah di antara aktor-aktor jam'iyah masih ada yang belum ideal mentalitasnya. Karena, tidak seperti amal ibadah, kebijakan dan strategi organisasi dinilai dari hasilnya, bukan niatnya.

Kamal

KH. Mustofa Bisri dan KH. Sahal Mahfudh

BAB IV
MENUJU PEMERINTAHAN NAHDLATUL ULAMA

Berpikir tentang NU pada abad keduanya itu berlebihan. Memperkirakan proyeksi beberapa puluh tahun ke depan mungkin masih masuk akal, tetapi 100 tahun adalah masa yang terlalu panjang. Apalagi di tengah berbagai ketidakmenentuan global seperti yang kita lihat dewasa ini.

Dalam 100 tahun yang telah berlalu saja ada banyak "belokan" sejarah yang tak seorang pun menduga sebelumnya. Bahkan Indonesia Merdeka adalah ketidakterdugaan. Kekalahan Komunisme Internasional, kebangkitan Syi'ah Imamiyah, reformasi politik di Indonesia, keruntuhan Timur Tengah, itu semua jauh dari ramalan, setidak-tidaknya mengenai waktu tibanya.

Seratus tahun ke depan akan jauh lebih tak terperi, mengingat intensitas dan akselerasi perubahan yang sederas arus bah: Perubahan datang kepada kita bertubi-tubi, dan setiap hari. Ia menjadi gejala utama dinamika dunia hari ini. Teknologi, politik, ekonomi, nilai-nilai dan norma-norma, semua seperti "gabah diintêri", seperti sedang menyusun diri terus-menerus. Semakin sulit menandai adanya satu era kemapanan tertentu.

Yang bisa dilakukan adalah menganggarkan langkah setapak demi setapak, sesuai dengan "jarak pandang ke depan" dari tempat kita berdiri saat ini. Atau, seperti kita mengendarai mobil. Jarak pandang kita hanya sejauh jangkauan mata, tetapi kita tetap bisa

sampai tujuan. Dengan syarat asalkan mobil kita tidak mogok, bensin di tangki cukup, dan kita tahu tempat yang kita tuju.

Untuk tetap bergerak maju, NU pertama-tama harus memahami capaian-capaiannya sendiri sejauh ini. Kemudian menandai momentum-momentum yang terjadi di lingkungan beredarnya dan memawas proyeksi realitas yang ada di depan, sehingga langkah-langkah yang diambil, yaitu agenda-agenda majunya, dapat dianggarkan secara valid, bukan sekadar angan-angan atau daftar keinginan yang tak tentu arah tujuannya.

Sebelum semua itu, tentu saja harus terlebih dahulu dipahami dengan jernih agenda absolut keberadaan NU, yakni tujuan kelahirannya, sebagai sudut pandang dalam mencermati hal-hal di atas.

Agenda Peradaban

Tidak tepat jika dikatakan bahwa NU didirikan semata-mata untuk menentang mazhab atau paham Wahabi. Kalau dikatakan sebagai tanggapan atas dikuasainya Hijaz oleh Keluarga Saud, mungkin ada benarnya, tetapi bukan hanya soal Wahabinya.

Berdirinya Kerajaan Saudi Arabia adalah momentum yang sangat menentukan dan terus menjadi salah satu faktor utama dalam dinamika sejarah dunia selama hampir seratus tahun sejak saat itu.

Pada dasarnya, berakhirnya Imperium Turki Usmani, pada 1920-an, adalah momentum perubahan yang amat mendasar dalam keseluruhan sejarah peradaban Islam. Segala kemapanan selama 13 abad sebelumnya kini memasuki gerbang keluruhan yang tak dapat dibalikkan lagi. Dunia Islam memasuki musim gugur peradaban.

Dalam kerangka sejarah Peradaban Islam sebelum ini, Nusantara adalah pinggiran. Ia bukan bagian dari corak sosial-budaya yang dimapankan oleh pusat-pusat kekuasaan Islam yang dominan, baik masyarakat Sunni yang dikuasai Dinasti Usmani di Istanbul, maupun

masyarakat Syi'ah yang dirajai Dinasti Shafawi di Isfahan. Dapat dimaklumi jika kemudian di Nusantara berkembang corak sosial-budaya masyarakat muslim yang unik, berbeda dari corak umum masyarakat muslim di belahan Dunia Islam lainnya.

Runtuhnya Turki Usmani setelah sebelumnya berhasil menetralisir Dinasti Shafawi —saingannya selama hampir dua setengah abad— merupakan tonggak terhentinya laju ekspansi politik Islam. Ia juga menandai era baru dalam sejarah peradaban dunia, ketika dunia modern menggelinding dalam helaan dominasi Barat. Dengan demikian, Dunia Islam harus memulai suatu pergulatan untuk mencari model yang baru bagi peradabannya sendiri.

Nusantara, setelah sejak abad ke-16 mengembangkan corak sosial-budaya yang berbeda dari Usmani dan Shafawi sebagai arus utama, memiliki alternatif yang dapat ditawarkan dalam pergulatan mencari model peradaban baru itu. Maka para ulamanya mendirikan NU, suatu konstruksi pionir sebagai basis kelembagaan untuk ikut serta dalam perjuangan tersebut.

Jelaslah bahwa agenda absolut NU adalah membangun peradaban. Apakah ini arogan? Tidak. NU tidak menganganganka penaklukan dan dominasi. NU berkehendak untuk menyumbang. Dan itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa di luar sana ada aktor-aktor yang sama mulianya dan sama haknya untuk ikut menentukan masa depan umat manusia, baik dari dalam lingkungan Islam maupun dari luarnya.

Capaian-Capaian

Untuk membangun peradaban, diperlukan suatu konstruksi sosial-politik sebagai basis untuk mengawali perjuangan. Demikianlah rumus sejarah. Itu pula sebabnya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallama mencari-cari tempat yang cocok untuk hijrah setelah menyimpulkan bahwa Mekkah tidak bisa dijadikan basis

awalan. Yatsrib menjadi destinasi yang ideal karena penduduknya bersedia membuat kesepakatan untuk membangun konstruksi sosial-politik bersama-sama Kanjeng Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallama dan kaum Muhajirin. Bahwa belakangan ada pihak yang mengingkari kesepakatan, itu soal lain.

Berbeda dari organisasi-organisasi lain yang ada di kurun waktu berdirinya, NU hadir dengan konstruksi sosial-politik yang nyaris komplet minus kuasa negara. NU merepresentasikan suatu komunitas dengan ikatan kultural yang kuat, bahkan dengan sejenis "struktur kekuasaan" berupa pengaruh para kiai dengan daya kendali yang kuat pula atas jamaahnya.

Al-Ikhwanul Muslimun, yang didirikan tahun 1929, baru berupa ideologi yang ditawarkan. Demikian pula Syarikat Islam dan Muhammadiyah, tahun 1912, mengumpulkan orang-orang yang setuju dengan suatu gagasan, yang abstrak dan terbatas, tentang perjuangan politik, atau pembaharuan pendidikan. NU adalah keseluruhan komunitas berikut kompleks budaya dan hubungan-hubungan kuasa yang menjadi bagian dari tradisinya.

Tapi tetap saja apa yang ada itu belum cukup. Maka, bersama-sama elemen-elemen bangsa lainnya, NU ikut memperjuangkan negara, yaitu NKRI, dengan kesadaran penuh untuk memiliki negara sendiri, berdiri sendiri. Sama sekali tidak ada wawasan untuk bergabung dengan bagian Dunia Islam lainnya dalam satu entitas negara, untuk mengembalikan konstruksi Turki Usmani atau yang sejenisnya. Waktu tidak mungkin dipaksa mundur dan kedatangan era peradaban baru telah menjadi kesadaran bersama.

Harus dipahami bahwa baik mendirikan NU maupun mendirikan NKRI bukanlah "proyek" langsung jadi, atau seperti mincuki mindhik, kata orang Rembang. Semua itu adalah perjuangan merintis peradaban baru, sebuah proyek raksasa yang harus digembalakan mengarungi sejarah dan menembus bolak-baliknya zaman. Maka, nilai

yang paling transenden dalam hal ini adalah cita-cita peradaban itu sendiri.

Banyak pernyataan-pernyataan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh para Bapak Pendiri dan para pahlawan dari generasi yang lalu harus diletakkan pada posisi temporer, tergantung konteks kehadirannya. Tafsir dan perlakuan terhadap kutipan-kutipan pun harus dibarengi dengan pemahaman yang jernih akan konteks tersebut.

Tak perlu kejang-kejang mendapati kenyataan bahwa Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1952 menyeret NU keluar dari Masyumi dan berpraktik sebagai partai politik, sedang Hadlratussyaikh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sebelum wafat pernah menyatakan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik bagi seluruh umat Islam Indonesia. Demikian pula bahwa Bung Karno mengumumkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 (NKRI) pada 1959, padahal sebelumnya sudah setuju pembentukan Republik Indonesia Serikat pada 1949.

Kita bersyukur bahwa dari zaman ke zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pemimpin-pemimpin yang bashiroh ruhaniyah-nya (ketajaman mata batin) senantiasa dinaungi petunjuk-Nya. Walaupun harus menempuh berbagai gejolak yang mengerikan, agenda membangun peradaban tak pernah patah sama sekali ataupun terhenti.

Kini kita telah memiliki jam'iyah yang –walaupun masih lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya—bukan sekadar mampu bertahan hidup, tapi sudah tertransformasikan sehingga cukup cakap untuk memasuki zaman baru abad ke-21. Negara kita ini pun cukup tahan waras melalui macam-macam benturan yang tak masuk akal, menjadi satu-satunya negara di Dunia Islam yang tetap stabil di tengah demokratisasi berkelanjutan, pada saat yang lainnya terkena "sawan" atau bahkan kejangkitan alergi mematikan ketika

bersenggolan dengan demokrasi. Bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran di sana-sini, itu bukan alasan untuk berkecil hati. Kita tidak sendirian. Seluruh dunia memang dihantui bermacam-macam kekhawatiran.

Bahkan, kemelut global yang memuncak, khususnya terkait stabilitas dan keamanan, justru menerbitkan peluang peran besar bagi NU dan NKRI. Gagasan "Humanitarian Islam" (Islam untuk Kemanusiaan, Al-Islam lil Insaniyyah) yang dideklarasikan oleh Gerakan Pemuda Ansor pada 2017 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dan kemudian dilengkapi dengan kerangka teologis secara valid oleh Musyawarah Nasional Alim-Ulama NU di Kota Banjar, 2019, beserta "Manifesto Nusantara" yang diumumkan di Yogya, 2018, kini mulai mewarnai wacana global tentang perdamaian dan tata dunia baru yang dimpikan semua orang, yaitu "tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, ditegakkan di atas dasar penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat di antara sesama".

Apabila dikelola dengan semestinya, gagasan itu akan menjadi daya ungkit (leverage) yang tak ternilai, yaitu ketika realitas keunggulan Indonesia semakin dikenal dan diakui oleh dunia, sebagaimana yang dewasa ini mulai terasa. Pada gilirannya, ia akan menjadi kekuatan tawar yang melambungkan kedudukan Indonesia dalam percaturan internasional.

NU sendiri telah memiliki lembaga-lembaga yang terus berkembang: lebih dari dua puluh ribu pesantren, belasan ribu madrasah dan sekolah, puluhan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, sentra-sentra ekonomi, dan sebagainya; jutaan kader terlatih dan panen sarjana secara besar-besaran di berbagai bidang; jaringan kerja sama di dalam dan luar negeri yang mulai menggurita; semua tinggal menunggu pencanggihan kualitas dan penerapan konstruksi gerakan yang lebih berdaya. Gambaran statistik tentang luasan pengaruh NU

saat ini pun amat mengesankan. Apabila NU konsisten saja dalam memposisikan diri dan menata langkah-langkahnya di tengah dinamika masyarakat seperti sekarang, angka-angka statistik itu masih bisa terus bertambah. Apalagi jika berhasil menerapkan konstruksi gerakan yang lebih progresif.

Momentum, Proyeksi, dan Peluang

"Yang abadi adalah perubahan," kata Herakleitos dari Efesus. Maka, sejarah adalah catatan tentang serial perubahan-perubahan. Tindakan masa kini adalah tanggapan atas perubahan dan upaya menciptakan perubahan. Rencana masa depan adalah antisipasi terhadap perubahan.

Perubahan-perubahan paling kasat mata tampak pada perkembangan teknologi, sebab teknologi adalah hasil upaya manusia yang tak henti-henti untuk menciptakan lebih banyak kemudahan dan mengatasi kelangkaan. Di abad ke-21 ini, capaian-capaian teknologi yang revolusioner menjadi atmosfer utama bagi dinamika masyarakat.

Adapun faktor yang paling banyak menentukan arah perubahan pada tingkat masyarakat, budaya, dan peradaban adalah kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Negara-negara bubar dan terbentuk di tangan raja-raja poltisi, masyarakat-masyarakat menjadi kelaparan atau berpesta di bawah sepak terjang dan inisiatif kaum pemegang kekayaan. Politik dan ekonomi membawa aspirasi perubahan menuju agregasinya.

Maka, ketika kita hendak mengenali momentum perubahan dan memperhitungkan proyeksinya ke masa depan, faktor-faktor teknologi, politik dan ekonomi adalah yang paling penting untuk diperhatikan. Memang, dalam wawasan yang demikian itu terdapat reduksi dan penyederhanaan masalah. Tapi, ibarat menangkap ujung benang ruwet, ini adalah titik tolak yang valid di tengah realitas yang

luar biasa kompleks. Nuansa-nuansa yang datang dari faktor-faktor lain akan dikenali kemudian dalam proses untuk mengurainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa momentum paling mencolok dalam perkembangan teknologi adalah revolusi teknologi informasi dan kecerdasan buatan (artificial intellegence). Teknologi informasi membuat lompatan dengan berlipatnya jangkauan, kecepatan, dan kompleksitas muatan. Hal itu berarti pula melipat-gandakan kapasitas rekayasa di berbagai bidang, termasuk sosial-politik.

Seiring dengan itu, penggunaan kecerdasan buatan meluas, mendorong percepatan ambil-alih kerja dari manusia ke mesin. Konsekuensi-konsekuensi dari momentum ini akan luas dan fundamental terhadap kehidupan masyarakat.

Dukungan teknologi tersebut ikut mendorong berlipatnya kapasitas para pengampu kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dalam menggalang dan memproyeksikan kekuatan. Dalam politik, perlombaan untuk menjangkau dan menggalang basis dukungan seluas-luasnya semakin "meraksasa".

Karena jangkauan sasarannya luas, diperlukan bingkai konsolidasi yang luas pula, dan itu didapati atau dibangun dalam wujud identitas-identitas, baik primordial –etnis dan agama—maupun buatan, seperti ideologi-ideologi sekuler dan kesertaan dalam kelompok-kelompok yang dilembagakan, yakni partai politik dan/atau kategori haluan (kiri-kanan). Polarisasi politik dengan cepat menjelma gejala global. Sedangkan nalar identitas itu sendiri menjadikan pertarungan semakin bercorak kesuku-sukuan (tribal), yakni semakin tidak rasional, tanpa kompromi, dan ganas.

Agama pada gilirannya menjadi basis identitas politik yang menonjol dalam percaturan tersebut. Dorongan ke arah konflik dipertajam oleh kegetiran sejarah berabad-abad, yaitu sepanjang masa pra-modern, ketika negara, kekuasaan, dan agama hadir dalam

satu paket dalam pertarungan politik dan militer tanpa jeda. Ini adalah warisan sejarah yang terus menghantui dunia dan semakin menakutkan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global mengalami pelambatan. Jelas dalam hal ini kekacauan politik dan perang yang tak kunjung reda di berbagai kawasan merupakan faktor yang signifikan. Sedangkan perlambatan pertumbuhan itu sendiri akan mengganggu keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand), yang pada gilirannya memperuncing persaingan ekonomi hingga terproyeksi ke dalam pertarungan politik pula. Ini semua menjadi jalinan silang-susup yang membentuk lingkaran setan.

Teknologi mungkin bisa melahirkan terobosan untuk memutus lingkaran celaka tersebut. Tetapi skala dan kompleksitas tantangan pasti membutuhkan strategi yang komprehensif, melibatkan aktor-aktor sosial-politik yang sungguh-sungguh mampu berperan efektif. NU memiliki kekuatan berupa legitimasi keagamaan dan kemasyarakatan yang kokoh, setidak-tidaknya hingga saat ini, serta instrumen-instrumen organisasional dan jaringan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara sistemik hingga ke akar rumput.

Dewasa ini bahkan NU semakin meningkat daya jangkaunya kepada aktor-aktor signifikan dalam percaturan global. Apabila semua itu dapat dikonsolidasikan ke dalam suatu strategi komprehensif yang valid, NU akan mengaktualisasikan potensinya untuk menyumbang jalan keluar bagi kemelut berskala peradaban ini.

Konstruksi Organisasi dalam Pergulatan Sejarah

Konstruksi organisasi adalah keseluruhan rangkaian komponen-komponen yang membentuk bangunan organisasi, seperti organ-organ tubuh membentuk badan atau onderdil membentuk mesin. Maka konstruksi organisasi meliputi aspek-aspek: struktur,

mekanisme-mekanisme, pola-pola hubungan, kualifikasi personalia, hingga kultur kerja.

Segera setelah NU resmi berdiri, para muassis (pendiri) giat melakukan sosialisasi dan merekrut anggota-anggota. Sesuai dengan nama organisasinya, yang diajak bergabung hanyalah kiai-kiai, bukan kalangan lain. Kiai Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke berbagai daerah, bilamana perlu mendatangi kiai-kiai satu per satu di pesantren masing-masing.

Karena tanggungan untuk mengasuh santri, kesempatan bagi kiai untuk beraktivitas di luar pesantrennya menjadi terbatas. Maka harus ada yang bisa "disuruh-suruh" me-lakoni pekerjaan-pekerjaan di luar pesantren, atas nama kiai. Berdasarkan nalar itulah dirancang model susunan kepengurusan NU dengan pembagian "dua kamar":

Pertama, Syuriyah, yakni dewan permusyawaratan kiai yang berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan. Kedua, Tanfidziyah, yaitu dewan eksekutif yang bertugas melaksanakan kebijakan. Personalia Tanfidziyah pun ditunjuk langsung oleh Syuriyah.

Pada masa awal itu, antara struktur formal organisasi dan pesantren-pesantren terjalin kelindan yang tak terpisahkan secara fungsional. Tingkatan-tingkatan wewenang di antara personalia, yang terkait dengan jabatan-jabatan resmi dalam kepengurusan, sejajar dengan apa yang memang menjadi kesadaran bersama di kalangan pesantren terlepas dari keberadaan organisasi. Walaupun seandainya NU tidak pernah didirikan, telah menjadi kesadaran dan pengakuan bersama kalangan pesantren bahwa Hadlratussyaikh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari menempati kedudukan tertinggi di antara kiai-kiai lainnya, disusul Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri, dan seterusnya. Singkat kata, konstruksi organisasi NU merupakan formalisasi dari realitas yang sudah terbentuk dalam konteks budaya tradisional pesantren.

Kiai Mahfudh Shiddiq adalah Ketua Umum Tanfidziyah pertama

Muktamar Nahdlatul Ulama di Krapyak 1989 M.
Dari atas: Syaikhona KH. Ahmad Shiddiq, Mbah Liem, KH. Zainuddin Jazuli Ploso, KH. Fuad Hasyim, dan beberapa Kiai lainnya.

yang dipilih oleh muktamirin, alih-alih ditunjuk oleh Rais 'Aam seperti sebelumnya, yaitu Haji Hasan Gipo dan K.H. Achmad Noer. Kiai Mahfudh kemudian memperkenalkan sejumlah inovasi penting, terutama sebagai langkah tanggapan atas berkembang pesatnya cacah anggota sekaligus tuntutan peran.

Media menjadi peran penting saat Kiai Mahfudh memimpin. Dia bersama juniornya, Kiai Abdul Wahid Hasyim menggawangi langsung Majalah "Berita Nahdlatoel Oelama". Majalah yang paling lama ini, dari awal 1930an hingga awal 1950an (sebelumnya ada Swara Nahdlatoel Oelama) menjadi media yang sungguh dirasakan kehadirannya

sebagai penyambung segala kebutuhan komunikasi –mulai dari urusan organisasi, hubungan dagang, sampai dengan hajat-hajat pribadi dan keluarga, seperti kabar duka—di antara sesama orang NU di berbagai daerah.

Dengan Gerakan "Mabadi Khaira Ummah", beliau membuka jalur bagi orang awam—non-kiai—untuk bergabung ke dalam kerangka organisasi NU, walaupun dengan syarat-syarat dan prosesur yang sulit. Meski NU tetap sebagai organisasi eksklusif para kiai, tapi butuh semakin banyak operator lapangan yang tidak terlalu terikat dengan urusan pesantren sehari-hari sehingga bisa lebih banyak menyediakan energi bagi NU dan pada saat yang sama terjamin kesetiaan dan integritas moralnya.

Konstruksi organisasi tersebut berubah total ketika pada 1952 Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan hadir secara mandiri sebagai Partai NU untuk ikut berkompetisi dalam pemilu yang pertama tahun 1955.

NU pun lantas beroperasi dalam model sebagaimana lazimnya partai politik. Maka perubahan-perubahan terjadi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Aktivis-aktivis non-kiai diserap secara besar-besaran ke dalam struktur kepemimpinan organisasi, yaitu di sektor Tanfidziyah;
2. Keanggotaan eksklusif untuk kiai diganti dengan kewargaan massal, bahwa barangsiapa mencoblos gambar jagat dalam pemilu, diakui sebagai warga NU dan berhak berpartisipasi hingga dalam proses-proses pembuatan keputusan;
3. Tingkatan kepengurusan mengikuti tingkatan pemerintahan, maka dibentuk "Pengurus Wilayah" untuk setiap provinsi, "Pengurus Cabang" untuk setiap kabupaten, "Majelis Wakil Cabang" untuk kecamatan, dan "Ranting" untuk desa atau kelurahan;

4. Nafkah organisasi yang semula bertumpu pada iuran langsung anggota, kemudian ditumpukan pada kuasa dan upaya-upaya politik untuk meraup sumber daya-sumber daya;
5. Pola penyapaan oleh organisasi kepada warga, yakni konstituen politiknya, didasarkan pada kebutuhan untuk memobilisasi dukungan dengan menonjolkan artikulasi-artikulasi –terkait simbol-simbol—yang menggugah pemihakan terhadap identitas kelompok.

Elemen tradisional yang tetap efektif untuk memelihara koherensi (keterpaduan) adalah pola hubungan antarkiai dalam tatanan kohesi dan hierarki yang alami serta antara para kiai dan komunitas lingkungannya masing-masing yang diwarnai kesetiaan absolut. Efektivitas itu masih bertahan hingga generasi kiai-kiai yang mengenyam pendidikan langsung dari para kiai dari generasi Hadltarussyaikh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Machrus Ali, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Ali Maksum, Kiai Abdul Hamid Pasurun, Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, Kiai Bisri Mustofa Rembang, dan lain-lain hidup di penghujung era efektivitas yang utuh dari tatanan tradisional tersebut. Sesudah generasi itu, kekuatan tatanan tradisional semakin terasa memudarnya.

Kini tak ada lagi tatanan hierarki efektif yang alami di antara kiai-kiai. Hubungan di antara mereka pun semakin mencair, demikian pula hubungan antara kiai dengan komunitasnya. Akibatnya, koherensi (keterpaduan) runtuh.

Ketika NU melepaskan status sebagai partai politik untuk kembali menjadi organisasi sosial (ormas), yaitu dengan bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1973, model organisasional –yang sejatinya terbentuk dalam konteks kebutuhannya sebagai parpol—tetap bertahan. Bahkan setelah NU sepenuhnya keluar dari PPP pada tahun 1984, model itu tidak berubah

hingga sekarang. Dari sini kerancuan fungsi antara NU dan PKB dapat dimengerti.

Masalahnya, tidak seperti PKB, NU tidak lagi memiliki fungsi yang langsung dalam agregasi politik. Hal itu menjadikan nilai peran NU tidak juga punya landasan ukur yang pasti. Yang ada tinggal “klaim”. Klaim hak atas saham politik dan klaim kendali atas puluhan juta konstituen. Dua-duanya tak ada dalam kenyataan. Sedangkan klaim atas jasa masa lalu jelas tak berguna tanpa kinerja politik yang nyata.

Semua itu hanyalah sebagian gambaran dari kesenjangan antara pola pikir dan kenyataan, antara model konstruksi dan konteks realitas. Jika keadaan ini dibiarkan, hanya soal waktu, tidak lama lagi, organisasi NU akan menjadi tidak relevan bagi siapa pun. Tidak bagi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lain, tidak juga bagi warganya sendiri. Bahkan jemaah (komunitas, akar rumput) NU terancam mencair dan larut tanpa makna di tengah masyarakat.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Bagi setiap umat tempo ajalnya. Dan saat tiba ajal mereka, tak bisa mereka menunda walau sesaat dan tak bisa pula memajukan.

Di sisi lain:

إن الله يبعث في هذه الأمة عند رأس كل مأة سنة من يجدد لها دينها

Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini di penghujung setiap seratus tahun orang yang merevitalisasi demi mereka agama mereka.

Maka, jika kita menginginkan tajdid (revitalisasi), kita harus bangkit dengan strategi dan kerja berlipat-lipat lebih keras. Strategi

sistemik tak mungkin diharapkan datang dari jemaah (komunitas). Harus dari jam'iyah (organisasi). Kita harus mentransformasikan konstruksi kedaluwarsa yang semakin tidak relevan ini menuju konstruksi baru yang bisa dioperasikan secara efektif, bukan hanya untuk membuka jalan keluar bagi kemandulan NU sendiri, tetapi juga bagi keringkihan bangsa, kemelut dunia Islam, bahkan kemerosotan peradaban umat manusia.

Singkatnya, kalau kita pilih terima ajal, mari kita tidur saja.

Konstruksi organisasi terbentuk melalui proses pergulatan bersama (engagement) yang berketerusan dalam pola yang ajeg, mencerminkan arah (orientasi), dan tata cara (moda). Arah dibimbing oleh, pertama-tama, cita-cita. Dalam hal ini, cita-cita peradaban yang diidamkan atau diterima sebagai "ilham ilahi" oleh para muassis (pendiri) NU.

Jelas bahwa cita-cita peradaban adalah titik yang jauh di masa depan. Jalan ke arahnya harus melewati dinamika sejarah yang panjang, kompleks, dan pasti tidak linier. Di sepanjang jalan, di setiap persimpangan, kesetiaan pada cita-cita dan pemahaman yang utuh terhadap konteks realitas menjadi penentu keputusan.

Untuk itu, yang pertama-tama dibutuhkan adalah kendaraan yang tangguh. Sebagaimana senantiasa terjadi dalam sejarah umat manusia, para pioner peradaban, sejak Romus-Romulus, Iskandar Dzulqarnain, Dawud bin Yasa, Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, Wijaya bin Dyah Lembu Tal, dan seterusnya, mengawali pergulatan dengan membangun sistem sosial politik, yakni negara. Itulah kendaraan untuk mengarungi perjuangan peradaban.

Maka, membangun, menjaga, dan merawat negara pun merupakan pra syarat eksistensial, seperti makan dan minum untuk bertahan hidup. Kalau negara runtuh, perjuangan peradaban mati.

Selebihnya, membangun peradaban adalah membangun manusia, memperbaiki kualitas lahir-batinnya. Agama, akhlaknya, dan intelektualnya diteguhkan. Sawahnya dan pasarnya diperhatikan. Hutan dan lautnya dilestarikan. Kebudayaannya dipikirkan.

Dari waktu ke waktu, di tengah konteks realitas yang terus-menerus berubah, landasan-landasan nalar di atas mengerangkai persepsi tentang kepentingan. Kepentingan menuntut pemenuhan. Upaya memenuhi tuntutan-tuntutan kepentingan itulah agenda.

Karena manusia menjadi subyek dan obyek dari perjuangan peradaban, maka keseluruhan prosesnya adalah pergulatan bersama manusia. Yang punya agenda menyangkut manusia akan bergulat bersama-sama dengan manusia lainnya. Barang siapa tidak melakukan pergulatan bersama, ia tidak punya agenda. Tak punya agenda berarti tak punya eksistensi. Tidak ada. Tidak relevan. Wujuuduhu ka 'adamihi, ada dan tiadanya sama saja.

Apakah NU relevan atau tidak? Tergantung pergulatannya bersama manusia, dalam konteks komunitas, negara, dan pergaulan antar-bangsa. NU yang relevan adalah NU yang mampu menghadirkan khidmah yang dibutuhkan, yaitu keajekan mempersembahkan maslahat-maslahat yang nyata-nyata dirasakan.

Dengan demikian, tata cara (moda) berorganisasi yang dibutuhkan adalah yang memapankan pergulatan bersama secara lumintu, tak putus-putusnya, dan menjamin dihasilkannya maslahat-maslahat nyata. Dengan moda itu agenda-agenda besar dijabarkan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang didistribusikan sedemikian rupa sehingga tidak ada kepingan organisasi yang menganggur.

Pemerintahan NU

Pada tahun 1980-an, Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) memperkenalkan teori tentang pesantren sebagai subkultur, yakni suatu "kantung" budaya dengan ciri-ciri unik dan karakter yang

kurang-lebih berbeda dari masyarakat luas di luarnya.

Dalam lingkungan budaya pesantren itu, kiai menempati pusat kepemimpinan dengan fungsi antara lain sebagai "makelar budaya" (cultural broker) untuk menyaring pengaruh dari dunia luar yang masuk kedalam lingkungan pesantren. Hingga kini, teori tersebut masih cukup akurat untuk menggambarkan kecenderungan yang dominan dalam pola kehadiran NU sebagai organisasi. Gestur NU lebih banyak menampakkan upaya bertahan menghadapi berbagai serangan dari luar.

Untungnya, dari generasi ke generasi NU diberkati dengan hadirnya sosok-sosok pemimpin luar biasa yang memiliki kapasitas pribadi sedemikian raksasa sehingga mampu memproyeksikan pengaruh besar kepada masyarakat luas, bahkan menjadi penentu jalannya sejarah. Selain Hadlratussyaikh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri, Kiai Abdul Wahhab Hasbullah, dan Kiai Abdurrahman Wahid ada di antara pemimpin-pemimpin "profetik" NU, yang jejak kepemimpinan mereka jauh melampaui batas-batas lingkungan NU sendiri. Dapat dikatakan, selama hampir satu abad ini, NU bergantung kepada para pemimpin berkarya peradaban itu untuk menghadirkan diri dengan peran-peran besar dalam sejarah.

Kini, memasuki abad berikutnya dari khidmah NU, warisan (legacy) etos perjuangan peradaban dari para waliyullah itu harus dilembagakan menjadi konstruksi organisasi, agar NU sebagai organisasi sungguh mampu menjadi "mesin" yang terus-menerus menghasilkan dampak maslahat bernilai peradaban. Desain konstruksi itu meliputi agenda, struktur, mekanisme, dan kualifikasi personalia.

NU harus menetapkan agenda jangka panjang dan berkala berupa target-target capaian yang kongkret dan berskala luas. Kongkret berarti setiap target harus dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pada saat "jatuh tempo" di

akhir setiap interval waktu yang ditetapkan, capaian aktual dapat dievaluasi secara obyektif dan akurat. Berskala luas artinya bahwa output (bentuk kegiatan) diprogram dengan jangkaun kewilayahan yang luas (internasional atau nasional) disertai analisis ekspektasi dampak (outcome) yang luas pula.

Sebagai contoh, NU dapat menetapkan target capaian berupa peningkatan mutu sekolah-sekolah Ma'arif secara nasional, dengan analisis dampak ikutan yang diharapkan baik terhadap kondisi internal maupun eksternal NU. Target nasional itu kemudian dibagi-bagi secara kewilayahan menjadi target spesifik di setiap provinsi, kabupaten, dan seterusnya hingga ke setiap unit sekolah. Pada akhir interval program yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dievaluasi, sejauh mana output yang ditargetkan tercapai dan outcome yang diharapkan terjadi. Berdasarkan evaluasi itulah kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari manajemen pelaksanaan hingga ke desain programnya.

Dalam bidang-bidang lain pun dapat dirancang program-program dengan rumus yang sama. Pembidangan itu sendiri harus lebih spesifik agar penalaran program menjadi lebih kongkret dan realitis. Ekonomi, misalnya, perlu dirinci pembidangannya menjadi: pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, industri, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil, perdagangan, dan seterusnya.

Selanjutnya, karena sasaran capaian ditetapkan meliputi wilayah yang luas (nasional dan internasional), eksekusi program menuntut konsolidasi instrumen-instrumen organisasi secara menyeluruh kedalam format manajemen yang terpadu. Keseluruhan struktur kepengurusan, dari PBNU hingga ke ranting-ranting, dari jajaran pengurus harian hingga lembaga-lembaga dan banom-banom, harus dioperasikan dalam satu kerangka strategi yang utuh. Setiap aktivitas dari bagian organisasi yang mana pun tidak boleh terpisah dari

aktifitas bagian lainnya atau terlepas dari kerangka strategi keseluruhan, nasional, dan internasional. Organisasi menjadi satu sistem yang utuh.

Dalam praktek, cara kerja kepengurusan NU akan menyerupai cara kerja pemerintahan. PBNU bekerja laksana kabinet pemerintahan pusat, PWNU laksana pemerintah propinsi, PCNU pemerintah kabupaten/kota, dan seterusnya. Lembaga-lembaga berfungsi laksana birokrasi kementerian dengan rentang kendali yang tidak putus dari pusat ke daerah.

Dengan demikian, ujung tombak pelaksanaan program adalah PCNU, dengan PBNU memegang kendali pusat dan PWNU melakukan koordinasi kewilayahan. Perlu diingat pula bahwa, eksekusi program sebagai strategi untuk mencapai sasaran-sasaran nasional dan internasional harus memperhatikan kekhasan potensi, keluasan dan keterbatasan dari masing-masing daerah atau Pengurus Cabang-nya. Maka, misalnya, pembentukan lembaga-lembaga tidak perlu sama jenis dan jumlahnya antara satu PC dengan PC lainnya.

Jelas bahwa pelaksanaan program akan mewujud kedalam rincian tugas-tugas spesifik yang menuntut kapasitas spesifik dari setiap personil pengampunya. Maka, pemilihan dan penunjukan personalia pengurus harus didasarkan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Personalia PBNU, misalnya, harus memiliki kecakapan untuk mengelola instrumen-instrumen strategi secara nasional. Singkatnya, memiliki kecakapan bertaraf menteri kabinet dalam pemerintahan negara. PWNU bertaraf pemerintah propinsi, PCNU bertaraf pemerintah kabupaten/kota, dan seterusnya.

Kebangkitan yang Dibutuhkan

Apabila NU menetapkan kualifikasi personalia yang menuntut tingkat kecakapan tinggi, apakah kader-kadernya ada?

Ada!

Lihat saja, sudah banyak kader-kader yang mutunya tidak kalah dari orang-orang yang telah ditunjuk sebagai menteri kabinet saat ini. Mereka tidak menjadi menteri hanya karena tidak masuk dalam perhitungan politik Presiden Joko Widodo, atau belum nasibnya. Tapi memang harus diakui bahwa dibanding kalangan lainnya, NU dalam hal ini masih tertinggal, terutama dalam kuantitas. Walaupun telah muncul kader-kader NU dengan kualitas luar biasa, bahkan sulit ditandingi siapa saja, jumlahnya masih terlalu sedikit dibanding besarnya ukuran komunitas NU yang mencapai lebih dari 90 juta jiwa.

Kuncinya adalah pendidikan, kemudian tempaan pengalaman dalam pergulatan di berbagai bidang.

Ada masanya ketika pesantren adalah satu-satunya sistem pendidikan yang tersedia di tengah masyarakat Nusantara. Barangsiapa ingin terangkat derajatnya memasuki kelas cendekia, tak ada tempat yang bisa dituju selain pesantren. Banyak anak bangsawan keraton dikirim ke pesantren untuk belajar, seperti Raden Mustahar, putera Sultan Hamengkubuwono III, mengaji kepada kiai-kiai di Tegalrejo, hingga bergelar Raden Mas Antawirya, dan di kemudian hari terkenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro. Raden Bagus Burhan, putera Raden Mas Pajangswara dari Keraton Surakarta, dikirim untuk berguru kepada Kiai Kasan Besari di Tegalsari, hingga menjadi intelektual paling terkemuka dengan gelar Ranggawarsita.

Kerajaan Belanda mendirikan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1808 dan memperkenalkan sistem politik baru ala Eropa. Seiring dengan semakin kuat dan semakin luasnya pengaruh, sistem politik baru itu pun pada gilirannya menggiring masyarakat Nusantara ke dalam atmosfir peradaban yang sama sekali baru. Diberlakukannya "Politik Etis" oleh Ratu Wilhelmina sejak 1901 menandai lahirnya standar kelas intelektual baru yang lebih merujuk kepada tradisi Eropa. Masyarakat Nusantara pun semakin melebur ke dalam apa yang kemudian disebut sebagai "peradaban modern", yang terus berdaulat

atas dunia hingga kini.

Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1912 sebagai wahana bagi kaum pribumi untuk mengejar kemajuan ala Belanda, tapi lebih banyak melayani kaum priyayi seputar keraton. Sementara itu, santri jelata masih belum cukup mendapatkan kesempatan.

Pada sekitar 1940-an, sarjana-sarjana pribumi bermunculan dari kalangan priayi. Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Soepomo, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, adalah beberapa di antara mereka. Kaum santri baru menikmati panen sarjana pada sekitar 1970-an, itu pun nyaris tak ada dari lingkungan pesantren NU. Sarjana-sarjana di berbagai bidang baru bermunculan dari kalangan santri NU pada sekitar 1990-an.

Dari narasi ini saja, jelas bahwa NU terlambat dibanding kalangan lain. Belum lagi kenyataan bahwa selama 32 tahun di bawah Soeharto, kalangan NU nyaris terhalang sama sekali dari kesempatan kerja di sektor manapun. Jalan orang NU dihalangi untuk menjadi pegawai negeri. Berwira usaha pun, orang NU ini, kembang-kempis, karena perekonomian didominasi oleh kapitalisme negara. Pesantren, yang alumninya tidak bisa jadi pegawai, saat hendak berwira usaha tidak didukung, dianaktirikan. Sempurna!

Maka, selama era Soeharto itu tidak ada wahana yang tersedia bagi santri-santri NU untuk bergulat mengembangkan kapasitas peran. Tak ada kesempatan untuk membangun rekam jejak kiprah di berbagai bidang.

NU memasuki era reformasi dalam keterbatasan sumber daya manusia dibanding kalangan lain.

Kini keadaan mulai membaik, karena reformasi memang membuka pintu bagi semua orang tanpa kecuali. Tapi tuntutan perjuangan untuk masa depan mengharuskan akselerasi pembangunan kapasitas kader secara lebih progresif. Nahdlatul

Ulama, Kebangkitan Ulama, membutuhkan kebangkitan!

Pertama, kebangkitan intelektualisme. Ini lebih dari sekedar kesarjanaan yang hanya berfokus pada kapasitas akademik. Intelektualisme menggabungkan penguasaan atas khazanah akademik, perhatian sepenuh hati terhadap realitas masyarakat dan masalah-masalahnya, serta pergulatan pemikiran untuk meretas jalan keluar dari masalah-masalah itu. Seorang akademisi tenggelam dalam buku-buku, laboratorium, dan kuesioner-kuesioner penangguk data. Seorang intelektual hadir ke tengah pergulatan masyarakat mengarungi realitas. Gus Dur, Kiai Sahal Mahfudh, Kiai Maimoen Zubair, dan Kiai Mustofa Bisri adalah di antara ikon-ikon intelektual yang kita miliki. Kita butuh lebih banyak lagi yang seperti mereka, di bidang-bidang yang lebih beragam.

Kebangkitan yang meluas harus dipupuk dengan strategi. Sedangkan strategi memerlukan wahana dan instrumen-instrumen. Sebenarnya, telah tersedia banyak wahana dan instrumen di lingkungan NU untuk itu. Yang dibutuhkan selanjutnya dalah reorientasi aktivisme di berbagai wahana tersebut dan pengelolaan instrumen-instrumen secara lebih sistematis. PMII sebagai wahana pengkaderan di lingkungan perguruan tinggi harus memikirkan model kaderisasi yang tidak hanya lebih memacu pengembangan kapasitas akademik, tapi sekaligus juga keterlibatan dalam berbagai jaringan kepemimpinan masyarakat yang strategis. Pesantren harus lebih membuka diri terhadap realitas faktual masyarakat, mulai dari lingkungan lokal hingga realitas global, alih-alih mencukupkan diri dengan wacana normatif yang selama ini mendominasi tradisinya.

Untuk membangun strategi kebangkitan itu, NU dapat merevitaliasi strategi yang dahulu diinisiasi oleh Gus Dur seorang diri sejak 1980-an, yang telah berhasil mentransformasikan hampir satu generasi penuh santri NU kedalam pola pikir dan gerak aktivisme yang luar biasa dinamis. Strategi itu pada dasarnya bertumpu pada

upaya menghubungkan (connecting) berbagi jaringan di dalam dan di luar NU: jaringan kiai-kai, kalangan kampus, bahkan jaringan politik dan ekonomi, di dalam negeri dan di lingkup internasional, dalam kerangka pergulatan untuk menjawab berbagai masalah agama, sosial, pendidikan, ekonomi, dan kemanusiaan.

Kedua, kebangkitan teknokrasi. Teknokrasi adalah "mesin" organisasional dalam ukuran besar yang diasumsikan sebagai generator transformasi masyarakat luas secara terencana dan terekayasa diatas basis teknologi. Pada era developmentalisme, modernisme, tahun 1970-an dan 1980-an, ketika gagasan tentang pembangunan terencana menjadi acuan utama negara-negara berkembang untuk "mengejar ketertinggalan" dari negara-negara maju, teknokratisme adalah panglima. Berdasarkan "ideologi" inilah kemudian Presiden Soeharto menyemati dirinya dengan gelar "Bapak Pembangunan Nasional".

Di era reformasi, teknokratisme luruh. MPR menetapkan bahwa GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) tidak layak dibikin lagi karena dianggap tidak demokratis. Reformasi dibiarkan bergulir tanpa desain, diserahkan pada kehendak alam dan kehendak bebas rakyat banyak yang diasumsikan merdeka. Dalam praktik, orientasi masyarakat akhirnya dipandu oleh kaum selebritas yang dibesarkan dengan techno-marketing (pemasaran dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi). Para pemimpin selebritas muncul di berbagai bidang, mulai kalangan politisi, pendakwah, kalangan jurnalis sendiri, intelektual abal-abal, hingga sekedar orang iseng. Teknokratisme digeser oleh "selebritisme", "kesohorisme".

Agenda peradaban NU menuntut transformasi menyeluruh pada segenap jemaah warganya melalui strategi yang terencana dan terkelola dengan cermat. Dalam konteks ini, jam'iyah dalam arti keseluruhan sistem kepemimpinan dan kepengurusan harus difungsikan sebagai generator transformasi dengan teknokrasi

sebagai tulang punggungnya. Dengan menerapkan kualifikasi spesifik dalam rekrutmen pengurus, jamiyah akan medapatkan "bahan mentah" untuk membangun teknokrasi, sebagaimana halnya pemerintah merekrut pegawai negeri. Sedangkan pergulatan dalam organisasi akan mengasah ketrampilan teknokratik para kader di dalamnya.

Ketiga, kebangitan kewirausahaan (enterpreneurship). Di antara alasan "ideologi reformasi" menolak teknokratisme adalah bahwa asumsi-asumsinya dianggap cenderung mengecilkan inisiatif independen masyarakat. Teknokratisme dianggap hanya cocok untuk pemerintahan otoriter dan organisasi fasis. Tapi, sejatinya teknokrasi adalah alat belaka, metode teknis untuk menyelenggarakan pekerjaan. Teknokrasi dapat dioperasikan tanpa menjadikannya "isme". Dengan penyikapan semacam itu, teknokrasi berguna untuk mempertajam dan memperluas stimulus bagi kebangkitan kewirausahaan yang hakikatnya adalah inisiatif independen masyarakat.

Kewirausahaan itu sendiri tidak melulu soal ekonomi. Ada kewirausahaan sosial, ketika orang menggagas, merintis, dan mengembangkan suatu lembaga yang menyediakan layanan masyarakat secara "rela", tidak mengambil keuntungan ekonomi. Bangkitnya kedua jenis kewirausahaan itu diperlukan. Sebab, sebagaimana jamiyah harus mengubah konstruksinya, jemaah harus berubah posturnya. Gara-gara marginalisasi selama Orde Baru, postur jemaah (baca: masyarakat akar rumput) hingga kini secara demografis dan budaya masih didominasi oleh kalangan petani dan warga sektor informal. Menghadapi dunia yang serba VUCA —volatile (rentan), uncertain (tak menentu), complex, dan ambiguous (abu-abu)— masyarakat perlu didorong agar mengadopsi karakter tangkas, ulet, dan luwes sekaligus. Kewirausahaan adalah wahana paling tepat untuk memupuknya.

Pada saat yang sama, kewirausahaan tampak sebagai pilihan yang paling masuk akal untuk membangun ketahanan dan independensi ekonomi. Pertanian rakyat yang padat karya jelas tidak punya masa depan. Luasan lahan berkurang di saat tenaga kerja makin melimpah di pedesaan. Sementara, mitos lama tentang korporasi-korporasi besar dan konglomerasi sebagai lokomotif ekonomi terbukti jauh dari kenyataan.

Bukan tanpa alasan jika Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, memilih gerakan kewirausahaan sebagai isu utama dalam visi kepemimpinannya. Beliau membuat tag line "arus ekonomi baru" untuk gagasan strategi tentang pembangunan ekonomi yang tumbuh dari bawah, berbasis usaha kecil dan menengah.

***

Presiden RI pertama, Ir. Soekarno hadir dalam Muktamar ke-23 NU di Solo pada tahun 1962. Tampak KH. Abdul Wahab Hasbullah menyambut kedatangannya.

BAB V
MAKRIFAT ORGANISASI DAN TAKDIR PERADABAN

Seperti kebanyakan warga NU lainnya, saya sudah NU sejak jauh sebelum lahir. Saya merasa, NU telah membingkai jati diri saya bahkan sebelum saya sendiri memiliki kesadaran tentang identitas.

Tahun 1971, saya baru lima tahun. Ibu saya mengajak menghadiri Rapat Akbar Partai Nahdlatul Ulama di alun-alun Rembang. Jurkamnya Kiai Idham Chalid, Ketua Umum PBNU waktu itu, dan Kiai Bisri Mustofa, kakek saya sendiri. Di pinggir alun-alun, di sudut luar halaman masjid agung, Ibu mengajak saya bersama dua orang adik perempuan saya –yang kecil masih di gendongan—berteduh di emperan warung Pak Mad yang jualan es campur. Ayah saya tak terlihat, larut ditengah kerumunan massa di alun-alun. Begitu lekat ingatan tentang itu sehingga masih jelas betul di benak saya bahwa es campur Pak Mad isinya kelapa muda, nanas dan tape singkong.

Pada Muktamar ke-26 NU di Semarang, 1979, saya masih kelas satu SMP. Ayah saya yang waktu itu Ketua PCNU Kabupaten Rembang membawa saya serta sehingga saya bolos sekolah seminggu. Bibi-bibi saya membuka stand di salah satu sudut arena Muktamar, di Gedung Olah Raga Semarang yang sekarang sudah tak ada bekasnya, jualan buah kawis. Ayah saya berhasil mendapatkan kartu akses warna biru bertuliskan "PENINJAU" untuk saya. Untuk peserta, kartunya warna hijau. Sementara ayah saya sibuk mengikuti sidang-sidang, saya dibiarkan berkeliaran ditemani Pakdhe Mujab,

kakak ibu saya. Pakdhe Mujab mendapat kartu warna biru juga.

Penjaga pintu arena sidang pleno, yang rambutnya gondrong, mencegat saya dengan galak,

"Apa ini anak kecil ikut-ikutan?!"

Tapi dengan gagah saya tunjukkan kartu warna biru itu. Penjaga menyeringai,

"O, peninjau to", lalu membiarkan saya masuk.

Sejak itu, saya tidak pernah absen dari muktamar-muktamar NU, walaupun dalam fungsi yang tidak lebih penting daripada lalat. Itu kecuali pada Muktamar ke-29 di Cipasung. Saya hanya bisa menginjakkan kaki di arena kurang dari setengah jam karena harus buru-buru pulang mendengar kabar paman-paman saya, Kiai Adib Bisri dan Kiai Umar Faruq Chamzawi, mengalami kecelakaan di jalan. Kedua-duanya wafat akibat kecelakaan itu.

Pergulatan saya dalam ber-NU adalah bagian dari ikhtiar memburu makrifat. Barangsiapa ingin mengenal Tuhan, hendaklah mengenali diri sendiri. Karena NU adalah identitas saya, maka tidak mungkin saya mencapai makrifat diri (ma'rifatun nafs) tanpa makrifat NU (ma'rifatul jam'iyyah). Husnul khotimah saya adalah apabila saya mati dalam keadaan telah memahami hakikat NU. Kalau tidak, alangkah canggung sekali nanti menghadap Tuhan tanpa mengerti siapa diri saya ini.

Makrifat Jati dan Makrifat Dharma

Ini seperti istilah Jawa, tapi bukan kejawen. "Makrifat Jati" maksudnya ma'rifatun nafs, mengenali hakikat diri. Sedangkan "Makrifat Dharma" adalah ma'rifatut taklif, mengenali tugas atau peran yang dibebankan Tuhan dalam keberadaan diri. Keduanya harus dicapai oleh seorang 'abid (hamba) dalam pergulatan untuk mencapai ma'rifatullah.

Seluruh uraian di atas, dari bab ke bab, adalah tentang makrifat

jati dan makrifat dharma dalam ber-NU. Pointer-pointer berikut ini adalah sari patinya:

1. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah keseluruhan perkauman yang merupakan bibit peradaban, seperti Bani Israil dibawah pimpinan Nabi Musa 'Alaihissalam, seperti kaum Muhajirin dan Anshar dibawah bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, seperti rombongan Raden Wijaya yang berhijrah dari Daha dan membedah hutan Maja;
2. Bahwa secara hakiki lingkup "tempat tinggal" dan kiprah Nahdlatul Ulama sejak de facto keberadaannya adalah keseluruhan peradaban dunia, bukan hanya Nusantara atau Indonesia, apalagi sekedar lingkungan subkultur pesantren, dan pergulatan selama hampir satu abad ini telah membawanya dari lingkungan lokal dan subkultural menembus ruang kiprah global dan universal;
3. Bahwa perjuangan menuju cita-cita peradaban berarti ikhtiar transformasi masyarakat dari kemapanan peradaban lama yang merosot menuju fajar peradaban baru yang lebih baik dan penuh harapan;
4. Bahwa Nahdlatul Ulama bekerja dalam panduan nilai-nilai ahlus sunnah wal jama'ah dengan warisan tradisi pesantren sebagai habitus (modal budaya yang telah meresap sebagai adat, ketrampilan dan kecenderungan yang tertanam secara mendalam) untuk menanggapi realitas masyarakat dan kesejarahan dari waktu ke waktu menuju cita-cita peradaban yang mulia, yaitu untuk mewujudkan tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang didasarkan atas penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat diantara sesama umat manusia;
5. Bahwa termasuk diantara habitus yang diwariskan oleh tradisi pesantren itu adalah kemampuan bashirah ruhaniyyah

(ketajaman mata batin) dari para ulama shalihin sebagai buah barokah dari istikamah dalam ilmu, ri'aayah dan keikhlasan;

6. Bahwa demi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita peradaban mulia itu Nahdlatul Ulama secara mutlak membutuhkan NKRI yang kuat sebagai titik tolaknya;
7. Bahwa upaya transformasi masyarakat untuk perbaikan peradaban itu mensyaratkan diperluasnya sasaran khidmah Nahdlatul Ulama, tidak melulu untuk warganya sendiri saja tapi secara inklusif mengabdi bagi kemaslahatan umum;
8. Bahwa kehendak untuk mengupayakan transformasi masyarakat itu menuntut Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyyah diiniyyah ijtimaa'iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) untuk secara nyata dan lumintu (terus-menerus, tak putus-putus) melibatkan diri dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang-bidang yang luas, baik dengan upaya membina vokasi masyarakat (kemampuan untuk menangani masalah di berbagai bidang) maupun upaya advokasi (dukungan dan pembelaan) terhadap kebijakan-kebijakan publik yang relevan, yang semua itu berarti melembagakan dalam organisasi tradisi ri'aayah yang dihidupi oleh kiai-kiai pesantren;
9. Bahwa tempuhan ke depan dalam upaya transformasi masyarakat itu menuntut Nahdlatul Ulama untuk mentransformasikan organisasinya, dari konstruksi lama yang sudah menua (hampir 70 tahun, sejak 1952) dan semakin kedaluwarsa, menuju konstruksi baru yang lebih menjamin ketangkasan, keuletan dan keluwesan organisasi dalam menyiasati dinamika perubahan masyarakat yang pada era millenial ini kedalaman pengaruh, skala kompleksitas dan akselerasi kecepatannya belum pernah ada presedennya dalam sejarah;
10. Bahwa konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama dalam hal ini menyangkut penetapan agenda-agenda strategis dan prinsip-

prinsip pengelolaan eksekusinya, yaitu desain struktur dan mekanisme-mekanisme kerja serta kualifikasi personalia pengampunya;

11. Bahwa agenda-agenda strategis itu harus ditetapkan dengan cara pandang yang realistis dalam garis nalar yang padu (koheren) antara target capaian global, nasional dan lokal serta disusun dalam sistematika program yang merupakan pembagian tugas secara sektoral diantara lembaga-lembaga dan banom-banom dan secara hirarkis dari PBNU hingga ke PCNU;
12. Bahwa program harus berorientasi pada bentuk-bentuk kegiatan (output) dan proyeksi dampak (outcome) yang kongkret dan terukur;
13. Bahwa PBNU harus difungsikan untuk memimpin mobilisasi sumberdaya-sumberdaya, meredistribusikannya kepada lembaga, banom, PWNU dan PCNU berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengendalian eksekusi program, serta menetapkan regulasi bagi tata kelola organisasi dan untuk mengatur akses kepada layanan-layanan organisasi;
14. Bahwa Cabang-cabang, baik NU maupun banom, harus menjadi ujung tombak eksekusi program;
15. Bahwa Wilayah, baik NU maupun banom, berfungsi mengkonsolidasikan Cabang-cabang dan menjadi simpul koordinasi diantara Cabang-cabang dalam pelaksanaan program-program yang secara spesifik saling terkait;
16. Bahwa pelaksanaan program dikerjasamakan dengan berbagai pihak atas dasar kesamaan kepentingan;
17. Bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan harus sejak sekarang didorong lahirnya kebangkitan intelektualisme, teknokrasi dan kewirausahaan melalui wahana-wahana kaderisasi yang ada, baik struktural (kegiatan pelatihan reguler) maupun kultural (pesantren-pesantren).

Ikhtiar dan Dzikir

Sebenarnya pada pertengahan 1990-an Gus Dur sempat menyampaikan keinginannya untuk membawa saya ke Jakarta mengikuti beliau. Tapi ayah saya tidak mengijinkan, malah lantas membawa saya ke Mekah dan menyuruh saya mukim disana untuk "minum air Zamzam sebanyak-banyaknya". Kutipan itu adalah apa yang secara harfiah dikatakan oleh ayah saya waktu itu. Belakangan, Gus Dur bukan hanya membawa saya, tapi sekalian ayah saya, ke Jakarta, ketika mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, 23 Juli 1998.

Itu adalah pertama kali saya masuk kedalam suprastruktur sosial-politik nasional, tembak langsung dari Rembang. Selama enam tahun berikutnya, saya harus terlibat dalam pergulatan politik yang luar biasa kompleks dan menegangkan, bahkan dalam beberapa momentum terasa tragis. Jangan tanya, betapa gugupnya saya menjalani semua itu. Dinamikanya berlangsung dalam ritme yang begitu cepat sehingga saya tak punya kesempatan untuk dengan sepantasnya mencerna peristiwa-peristiwa.

Tahun 2004 ayah saya wafat dan saya harus membawa anak-isteri kembali ke Rembang. Memandang Jakarta dari kejauhan, berlepas diri dari segala pertarungan. Itu memberi saya kesempatan untuk "memamah biak", mencerna kembali semua pelajaran yang telah "dengan paksa" dan tergesa-gesa dijejalkan kepada saya selama enam tahun mengikuti Gus Dur di Jakarta. Dan tiba-tiba saja saya seperti bangun dari pingsan ketika menyadari, betapa beruntungnya saya, seekor kutu di sudut Rembang, kebetulan tertangkap oleh penglihatan Gus Dur nun jauh dari Jakarta sana, kemudian beliau berkenan menempelkan saya ke jasad mulianya. Supaya saya belajar.

Selanjutnya adalah Kiai Sahal Mahfudh yang, setelah dalam Muktamar ke-22 di Makassar tahun 2010 terpilih kembali sebagai Rais Am, menyisipkan saya kedalam jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai salah seorang Katib Syuriyah. Itu memberi saya

kesempatan untuk memandang realitas "NU struktural" dari sudut pandang puncaknya. Saya langsung melihat: ini pekerjaan raksasa!

Setahun pertama saya habiskan hanya untuk memikir-mikirkan, apa yang bisa saya sumbangkan dan dari mana saya harus mulai. Lalu GP Ansor menggelar kongres di Surabaya tahun 2011 dan Nusron Wahid mencalonkan diri untuk kursi Ketua Umum. Saya mengajaknya bicara tentang hal-hal yang penting dilakukan jika ia terpilih. Saya menyebut tiga hal.

Pertama, menyerap kembali para gus, kiai muda dan santri senior dari pesantren-pesantren salaf. Sudah terlalu lama GP Ansor didominasi oleh aktivis-aktivis dari perguruan-perguruan tinggi moderen sedangkan kalangan pesantren salaf semakin tersingkir. Padahal tidak ada sumber kepemimpinan Syuriyah yang lebih kuat daripada pesantren-pesantren salaf. Apabila "bahan mentah" Syuriyah kurang mendapatkan tempaan organisasi, bagaimana mereka akan menjadi pemimpin yang mumpuni nanti? Belum lagi mengingat bahwa NU di masa depan membutuhkan penyelarasan antara dua jalur tradisi pendidikan, yaitu jalur perguruan tinggi dan jalur pesantren salaf itu. Kader-kader dari kedua lingkungan yang berbeda harus dipergaulkan sejak dini agar membiasakan diri untuk berkonsolidasi bersama.

Kedua, menghidupkan kembali kegiatan pelatihan formal reguler. Ini adalah wahana untuk saling menyelaraskan persepsi diantara para kader tentang realitas organisasi, realitas tantangan dan tanggapan yang harus dikedepankan dalam menghadapi berbagai masalah. Pelatihan formal reguler harus dirancang dalam sistematika hirarkis untuk kemudian dijadikan cetak biru meritokrasi, yang merupakan prinsip paling elementer untuk membangun koherensi. Karir seorang kader dalam organisasi harus didasarkan pada capaian obyektifnya. Sistem pelatihan formal reguler yang bertingkat menyediakan ukuran capaian paling dasar sehingga bisa menjadi

basis meritokarasi.

Ketiga, menghidupkan kegiatan rutin di tingkat Cabang dan Anak Cabang. GP Ansor harus dirasakan kehadirannya secara nyata oleh masyarakat dan itu hanya mungkin apabila memiliki kegiatan rutin yang menjadi peristiwa sosial di lingkungannya. Mengingat "wilayah kerja" yang sedemikian luas, hal itu harus diciptakan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Biidznillah, Nusron Wahid terpilih sebagai Ketua Umum. Ia mengikuti saran-saran saya dan memaksa kader-kader Ansor mematuhi parameter-parameter baru sehingga transformasi organisasi berlangsung dengan akselerasi tinggi. Dalam waktu tiga tahun, GP Ansor sudah sama sekali berubah menjadi organisasi yang koheren.

Saya memandangi hasil yang indah itu dengan perasaan bangga luar biasa. Masalahnya, saya ini pengurus PBNU, bukan pengurus Ansor.

Sementara itu, ketika Gus Dur semakin terbatas daya fisiknya, beliau mulai mengalihkan wadhifah (kegiatan) internasional kepada Kiai Mustofa Bisri. Sejak 2009, Gus Mus terlibat berbagai kegiatan internasional, difasilitasi oleh Pak C. Holland Taylor.

Pak Holland warga negara Amerika Serikat asal North Carolina. Dulunya, ia adalah pengusaha telekomunikasi, pemilik perusahaan telekomunikasi internasional yang cukup besar. Ia datang ke Indonesia pertama kali tahun 1997 untuk suatu kerja sama bisnis dengan P.T. Indosat. Tahun 1999 seseorang memperkenalkannya kepada Gus Dur. Entah apa yang kemudian terjadi, belakangan Pak Holland menjual perusahaannya lantas mengabdikan diri kepada Gus Dur. Sekurang-kurangnya sejak 2003, Pak Holland memfasilitasi kegiatan-kegiatan internasional Gus Dur. Ke belahan dunia mana pun Gus Dur ingin pergi, Pak Holland yang mengurus. Dengan siapa pun Gus Dur ingin bertemu, kalau beliau sendiri belum punya kontaknya,

Ketika NU menunjukkan kekuatannnya. Rapat Akbar NU pada tahun 1992 di Lapangan Timur Senayan Jakarta, yang dihadiri 1 juta Nahdliyin dari seluruh Indonesia.

Pak Holland yang mencarikan jalan. Pak Holland menikahi seorang wanita Magelang dan tinggal di kampung isterinya. Salah seorang paman dari isterinya adalah pengurus Syuriyah di Ranting NU kampung itu.

Tahun 2011 Gus Mus mengajak saya mengikuti lawatannya ke Eropa dan Amerika. Sudah tentu selama lawatan itu saya berusaha keras menjadikan diri saya berguna. Tapi diam-diam saya khawatir justru mengganggu nuansa diplomasi Gus Mus yang lembut dan santun karena saya terlalu berterus-terang setiap kali bicara. Yang terjadi sesudah lawatan itu malah Gus Mus menyuruh-nyuruh saya pergi kesana-kemari atas nama beliau.

Mulailah saya bersama dan/atau difasilitasi oleh Pak Holland berkeliaran di muka bumi ini untuk melihat dunia dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya dapati dunia ini alangkah buruk rupa. Tragedi yang telah terjadi dan yang sedang berlangsung saja sudah luar biasa mengerikan. Sedangkat diatas kepala umat manusia terus mengancam pula tragedi yang berlipat kali ganasnya akibat amarah turun-temurun sejak masa lalu yang jauh, keangkuhan, keserakahan dan kebodohan.

Tapi setelah memahami seluk-beluk tragedi dunia itu, saya pun mendapati bahwa Nahdlatul Ulama memiliki wawasan dan habitus (!) yang bisa menjadi jalan keluarnya. Tidak ada pihak mana pun di dunia ini memilikinya selain NU! Maka missi aktivisme internasional saya kemudian adalah mengartikulasikan “jalan keluar ala NU” itu.

Masalahnya, bagaimana mungkin melakukan pekerjaan ini sendirian? Bahkan tambahan tenaga seratus, dua ratus, seribu orang pun tak akan ada artinya. Ini masalah peradaban. Upaya menuju jalan keluar hanya bisa dilakukan oleh satu kaum yang berbaris dalam shaf-shaf yang rapi dan bergerak rampak. Ini adalah jenis pekerjaan yang hanya bisa dipikul sebagai wadhifah oleh Nahdlatul Ulama sebagai jamiyah!

Maka tampak oleh saya bahwa masalah-masalah internal jamiyah NU dan masalah peradaban sesungguhnya merupakan satu alur bersambung. Jalur menuju jalan keluar dari kedua simpul masalah itu ada pada garis tempuh yang sama. Dengan pemikiran itulah kemudian saya mengikhtiarkan segala yang saya bisa, yang ada dalam batas kemampuan saya, yang terjangkau tangan saya. Tapi selama beberapa tahun saya tak kunjung menemui hasil yang berarti. Bahkan setelah dijadikan Katib Am pun saya belum mampu menemukan titik paling strategis dalam konstruksi organisasi untuk membuat manuver yang dapat memicu perubahan secara desisif. Meyakinkan orang tentang kenyataan yang saya saksikan saja sulit sekali.

Sementara itu, dunia yang semakin panas, baik internasional maupun domestik, membuat saya cenderung kalut. Sampai-sampai saya berpikir: apakah kiamat sungguh segera datangnya? Apakah segala yang saya kerjakan ada gunanya?

Dalam suasana batin saya yang semacam itu, paman saya, Kiai Mustofa Bisri, mengajak saya ikut umroh bersama beliau. Saya kabarkan itu kepada Pak Holland dan ia menyambut dengan bersemangat sekali. Ia ikut mendaftar bersama isteri dan anak sulungnya dan ia bayari isteri saya untuk mendaftar juga, sehingga kami semua berangkat bersama. Itu pada bulan Februari 2016.

Sejak dari rumah saya mendambakan sowan kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi di Madinah. Beliau kelahiran Condet, Jakarta, sejak remaja dikirim untuk belajar di Tarim, Hadlramaut, dan setelah mumpuni kemudian ditugaskan untuk mengajar di Madinah atas sponsor Rabithah 'Alam Islamy, sampai dukungan diputus dan Pemerintah Saudi mencabut ijin mengajarnya beberapa tahun yang lalu. Saya mendambakan beliau karena sepengetahuan saya, beliau adalah Syaikhul Habaib, tetua para Habib. Saya ingat, dulu Syaikh As Sayyid Muhammad bin 'Alawy Al Maliky Al Hasany menyebut beliau sebagai "Syuwaifi'iy" alias "Syafi'i Kecil", karena keluasan dan

kedalaman ilmu beliau sebagai Mufti Madzhab Syafi'i.

Saya berhasil sowan atas bantuan Cak Mustofa, seorang pemukim asal Madura. Benak saya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan dan saya melakukan persiapan sungguh-sungguh dengan menyusun dan menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa Arab untuk menyampaikannya kepada Habib Zain.

Ada banyak tamu lain bersama saya dan Pak Holland di ruangan tempat kami menunggu, ditemani Habib Muhammad, putera Habib Zain. Tak lama kami menunggu, Habib Zain muncul, menyapa dengan salam dan menyalami semua orang, kemudian duduk di tempat yang memang dikhususkan untuk beliau. Belum sempat saya atau siapa pun diantara tamu-tamu menyampaikan apa pun, beliau langsung bicara panjang lebar layaknya mengajar. Dan, ajaibnya, seluruh uraian beliau dari awal sampai akhir merupakan jawaban atas semua pertanyaan saya!

Diantara yang beliau sampaikan adalah pengingat bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir Allah. Kiamat pun akan terjadi atas takdir Allah. Hanya saja, kita tidak tahu apa yang menjadi takdir sampai sesudah terjadinya. Oleh karena itu kita diwajibkan berikhtiar.

"Barangsiapa ikhtiarnya bersesuaian dengan ikhtiar Allah, beruntunglah dia", kata Habib Zain.

Selanjutnya, karena kita wajib berikhtiar sedangkan hasilnya bergantung pada takdir Allah, kita tak boleh memisahkan ikhtiar dari dzikir.

من ليس له ذ كر ليس له ذ كر

"Barangsiapa tidak punya dzikir, ia tidak akan punya keberanian", kata beliau lagi.

Beliau pun menambahkan bahwa yang dimaksud dengan dzikir dalam hal ini bukan sekedar mengingat Allah dalam pikiran atau hati,

tapi wirid dengan ijazah tertentu yang dijalankan secara istikamah.

Saya merasa, dalam menyampaikan taklim itu Habib Zain tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi beliau sekaligus menyalurkan energi spiritual. Dalam khazanah tradisi pesantren, ini disebut "suwuk". Saya tidak hanya lega dan puas karena pertanyaan-pertanyaan saya terjawab semuanya. Saya merasakan suwuk Habib Zain menghujam saya sedemikian rupa, membuyarkan kabut jiwa saya, sehingga segala rasa takut dan khawatir saya pun hilang sama sekali.

Kini saya tidak takut lagi. Tidak juga khawatir akan nasib peradaban. Saya hanya harus melakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang penting tidak tidur kelamaan.

Rembang, 23 Februari 2020

Kyai Haji Yahya Cholil Staquf

Adalah salah satu pendiri gerakan global "Humanitarian Islam" (Islam Untuk Kemanusiaan), sebuah gerakan yang berjuang untuk merekontekstualisasi pemahaman keagamaan dalam Islam yang dapat melanggengkan kebencian, kekerasan dan sikap "mau menang sendiri" dalam beragama. Gerakan ini ingin mengembalikan prinsip Rahmah (cinta dan kasih-sayang universal) ke posisinya sebagai pesan utama dari ajaran Islam. Gus Yahya, yang juga menjabat sebagai Katib 'Am (Sekretaris Umum) Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), organisasi Muslim terbesar di dunia dengan anggota lebih dari 50 juta anggota dan memiliki sekitar 14,000 madrasah, memelopori upaya membawa kearifan dan spiritualitas Islam Nusantara ke panggung dunia, di mana pemahaman Islam yang galak, represif dan tak jarang penuh kekerasan telah mendominasi selama beberapa dekade.

"[Yahya C. Staquf] adalah salah satu pemimpin Islam Indonesia yang paling berpengaruh."
— *Time Magazine*

Gus Yahya lahir dari garis keluarga besar Kyai Bisri Mustofa di Rembang, Jawa Tengah. Sejak kecil Gus Yahya telah menerima pendidikan formal dan spiritual Islam dari ayahnya, kakeknya dan pamannya. Gus Yahya kemudian menjadi murid atau santri dari ulama terkenal yang pernah menjadi Rais 'Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Ali Maksum (1915 — 1989), dan di bawah bimbingan beliau ini Gus Yahya belajar ilmu-ilmu Islam di Pondok Pesantren Munawir, Krapyak, Yogyakarta. K. H. Ali Maksum sendiri adalah murid dari Syeh Umar Hamdan al-Makki (1858 — 1948) dan Syeh Hasan Masshat al-Makki (1900 — 1979) di Mekah, dan juga menjadi guru dari beberapa tokoh modern Indonesia yang amat berpengaruh, termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1940 — 2009) presiden Indonesia yang pertama dipilih secara demokratis, dan juga K.H. A. Mustofa Bisri atau Gus Mus (1944 — sekarang), seorang ulama, budayawan, pelukis dan salah satu pemimpin karismatik NU, yang juga paman dari Gus Yahya Staquf.

Pada 2014 Gus Yahya ikut mendirikan Bayt a-Rahmah li ad-Da'wa al-Islamiyah Rahmatan li al-'Alamin (Rumah Rahmah untuk Dakwah Islam sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta) di Amerika Serikat. Organisasi ini berperan sebagai pusat jaringan penghubung untuk ekspansi kegiatan NU di panggung dunia.

Sebagai Direktur Urusan-urusan Keagamaan (Modir), Gus Yahya berusaha mewujudkan visi Presiden Abdurrahman Wahid untuk mendukung upaya mengerahkan energi di Dunia Barat untuk menyelaraskan pemahaman tentang ajaran Islam dengan prinsip kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia di dunia modern.

> "Belum pernah sebelumnya saya melihat pemimpin Muslim [selain Kyai Yahya Staquf] datang ke Eropa, berdiri tegak bagai menara dan berkata, "Catat, kami siap mengambil langkah' … untuk membuka lembaran baru dengan mengusulkan rekontekstualisasi pemahaman atas Hukum Islam agar sesuai dengan kondisi era modern."
> — *Magnus Ranstorp, ahli terorisme, dalam sebuah wawancara di CNN.*

Berdasarkan visi Presiden Wahid dan komitmen kuat pada kebenaran, Gus Yahya menggerakkan otoritas lembaga Muslim Sunni yang besar untuk bekerja sama dalam proyek rekontekstualisasi teologis yang luas dan jelas untuk pertama kalinya sejak abad pertengahan.

Serangkaian deklarasi bersejarah yang telah disusun oleh Gus Yahya menjadi basis bagi upaya pembaharuan ini, seperti ISOMIL Nahdlatul Ulama Declaration (2016); First Global Unity Forum Declaration (2016); Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Humanitarian Islam (2017); dan yang terbaru, Nusantara Statement dan Manifesto Nusantara (2018). Melalui Resolusi dan Keputusan Bersama, Bayt ar-Rahmah dan Gerakan Pemuda Ansor, yang beranggotakan lebih dari 5 juta orang, secara resmi mengadopsi Manifesto Nusantara.

Manifesto ini didasarkan pada tradisi pembaruan (tajdid) yang sejak lama telah dipraktikkan oleh para ulama Indonesia sebagaimana dicontohkan oleh Presiden Wahid. Esainya yang penting, "Tuhan Tidak Perlu Dibela," dimasukkan dalam Bagian 11.3 dari Manifesto tersebut. Upaya keras Gus Yahya dalam memperjuangkan rahmah sebagai basis untuk resolusi konflik dipuji oleh para pakar internasional dan dikutip

oleh sponsor kampanye internasional yang memperjuangkan NU dan Muhammadiyah agar memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian. Buku berjudul Dua Menyemai Damai — yang diterbitkan pada Januari 2019 oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, Universitas Gadjah Mada — mendeskripsikan kampanye Islam Nusantara; Deklarasi ISOMIL Nahdlatul Ulama; Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Humanitarian Islam; Manifesto Nusantara; dan perjalanan bersejarah Kyai Yahya ke Yerusalem, yang berhasil "merintis jalur baru menuju perdamaian [antara Israel dan Palestina] melalui misi yang diinisiasi oleh Gus Dur dan dilanjutkan oleh Kyai Yahya Staquf."

"[A]mong the Muslim world's most incisive and outspoken reformers"
–Paul Marshall, Wilson Distinguished Professor of Religious Freedom at Baylor University

Gus Yahya adalah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang kedudukannya secara protokoler setara dengan menteri. Ia sering dimintai pertimbangan untuk persoalan-persoalan keagamaan, persoalan dalam negeri dan hubungan internasional.

Saat ini ia menjabat sebagai Duta Ansor untuk Dunia Islam dan Utusan Partai Kebangkitan Bangsa (yang berakar pada sayap spiritual NU) untuk Centrist Democrat International (IDC – CDI) dan European People's Party (EPP) — jaringan politik terbesar di Eropa dan dunia. Beliau berusaha membangun konsensus masyarakat "Untuk mencegah usaha memperalat agama Islam demi kepentingan politik, entah itu oleh Muslim atau non-Muslim, dan mencegah penyebaran kebencian komunal dengan mendorong terbentuknya tatanan dunia yang harmonis dan adil berdasarkan penghormatan atas kesetaraan hak asasi dan martabat manusia." — Nusantara Statement.

Bersama Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence, di Sayap Barat Gedung Putih, Washington, D.C

"Muslims, Jews, and Christians should take their cue from Yahya Cholil Staquf. . . Moderates have to find the moral courage to speak out when their own religions are hijacked by extremists, just as Mr. Staquf has. When his courage and clarity become the norm we may have the chance to slay the dragon of hate."

–Rabbi Abraham Cooper,
Associate Dean of the Simon Wiesenthal Center

Bersama Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, di Istana Merdeka

"Yahya Cholil Staquf has bravely shown us an example [of how to tackle Islamism]"
—Sir John Jenkins, former British Ambassador to Saudi Arabia

Bersama Paus Fransiskus di kediaman pribadi beliau di Komplek Basilica, Vatikan

Bersama Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen,
di sela-sela Kongres European Peolple's Party, di Zagreb, Kroasia

Bersama para pemimpin agama-agama Ibrahimiyah dalam pertemuan "Inisiatif Agama-agama Ibrahimiyah", di Pontifical Gregorian University, Vatikan.

Bersama Ketua Umum, Sekjen dan Syeikh Muhammad bin Abdul Karim Al Issa, Sekjen Rabithah 'Alam Islamy di kantor PBNU
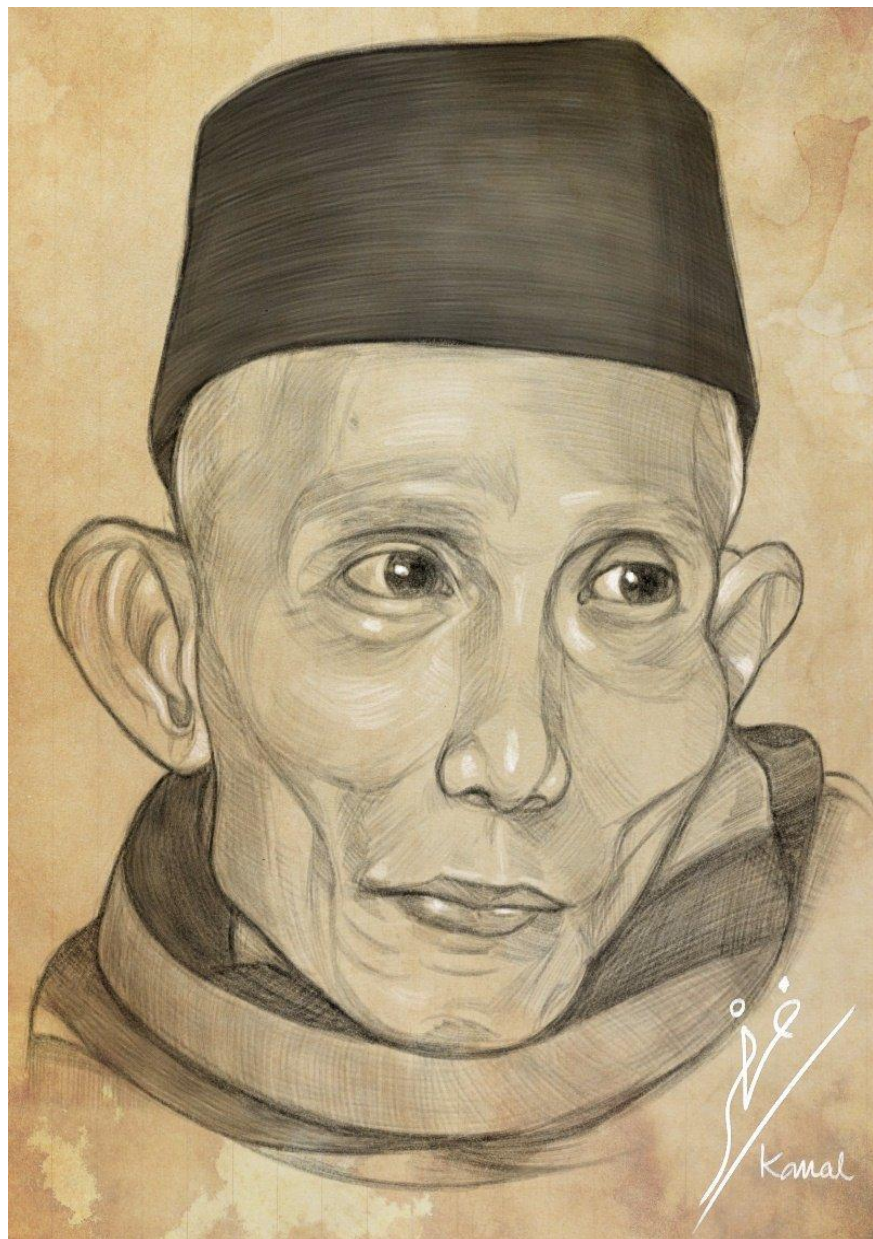
Rekontekstualisasi Ajaran Islam untuk Tatatan Dunia Baru[1]

Kyai Dr. (HC) YAHYA CHOLIL STAQUF Rembang[2]

---

[1] Pidato Ilmiah untuk Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 13 Februari 2023—bersama dengan dr. Sudibyo Markus, M.B.A. (PP Muhammadiyah) dan Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, M.C.C.J. (Gereja Katholik Vatikan).

[2] Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Jam'iyyah Nahdlatul 'Ulama (PBNU) dan salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.

Refleksi Pasca-Perang Dunia

Konflik atas nama Islam, baik internal (sesama muslim) maupun eksternal (muslim maupun non-muslim) masih terus marak dibelahan dunia hingga saat ini. Berbagai upaya besar yang telah dilakukan oleh berbagai pihak tidak kunjung mampu menyelesaikannya, bahkan intensitas konflik cenderung meningkat sehingga mengganggu keamanan dan stabilitas global. Pola yang tampak dalam konflik-konflik tersebut ternyata muncul pula dalam fenomena-fenomena konflik yang terkait dengan agama-agama dan atau ideologi-ideologi di luar Islam.

Refleksi historis menunjukkan bahwa fenomena konflik ini di masa lalu adalah fenomena yang normal. Masa dahulu adalah rimba identitas-identitas yang saling berkompetisi supermasi satu sama lainnya, baik identitas rasial, etnik, agama, budaya, klan, maupun ideologi-ideologi lainnya. Lebih dari itu, konflik peperangan di masa lalu adalah mekanisme yang wajar untuk menyelesaikan persaingan dan pertentangan.

Dan sekarang ini, sejalan semakin terintegrasinya masyarakat global ke dalam suatu wahana pergaulan yang menghubungkan semua aktor yang ada satu sama lain, dan seiring pula dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi militer, perwujudan konflik antaridentitas berkembang menjadi semakin intens tingkat kekerasannya dan semakin luas skala ketelibatan pihak-pihak di dalam konflik itu. Hal ini disebabkan karena keterhubungan antarpihak menjadikan dimungkinkannya konsolidasi kekuatan secara besar-besaran ke dalam aliansi-aliansi politik dan militer berskala internasional.

Sementara itu, perkembangan teknologi melahirkan persenjataan militer dengan daya rusak yang semakin meraksasa pula. Di dalam sejarah dunia telah mengalami puncak konflik antaridentitas dalam wujud perang-perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama pada 1914—1918 dan Perang Dunia Kedua 1939—1945. Dua perang dunia tersebut

mengakibatkan korban kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak kurang dari 10 juta korban jiwa dan 21 juta korban luka dalam perang dunia pertama serta lebih dari 60 juta korban jiwa dalam perang dunia kedua.

Dua perang dunia tersebut, yang melibatkan lebih dari 50 negara, menjadi hentakan peradaban bagi umat manusia sedemikian rupa sehingga mendorong masyarakat internasional untuk membangun konsensus politik baru demi mengupayakan terwujudnya suatu tata dunia yang diharapkan mampu menekan kecendrungan konflik antaridentitas dan mencegah terulangnya perang besar seperti perang dunia pertama dan kedua.

Pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco Amerika Serikat sejumlah negara besar menandatangani kesepakatan yang kemudian disebut "Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa". Piagam itu pada gilirannya menjadi dasar dibentuknya organisasi PBB yang dimaksudkan berfungsi sebagai rezim internasional dalam konstruksi tata dunia baru.

Komponen-komponen utama dari tata dunia baru:

Pertama adalah rezim perbatasan internasional yang menetapkan batas-batas definitif dari setiap negara sebagai lingkup kedaulatan yang dihormati dan dilindungi dari serangan pihak luar. Hal ini mengubah pola interaksi antara negara yang bertetangga dari ketegangan militer dan konflik abadi, menjadi jaminan hak dan kedaulatan atas dasar aturan-aturan yang disepakati. Di atas rezim perbatasan internasional itu hubungan antarnegara dijalankan dan dikelola di dalam tatanan yang didasarkan atas aturan-aturan (*rules-based order*).

Kedua adalah nilai hak asasi universal yang berisi prinsip penghormatan atas kesetaraan hak dan martabat bagi semua manusia terlepas dari perbedaan latar belakang apapun, baik tas, etnik, agama, ideologi sekular maupun label-label identitas lainnya. Nilai ini dimaksudkan untuk menghentikan persaingan perebutan supremasi di antara kelompok-kelompok yang ada dengan menghilangkan diskriminasi. Umat manusia diatur, diperintah agar mengedepankan dialog dengan setara dan rasional untuk menyelesaikan pertentangan.

Negara-negara baru yang lahir sesudah perang dunia kedua mendapatkan legitimasi dan kedaulatan atas dasar prinsip-prinsip tata dunia baru ini, di bawah perlindungan rezim organisasi PBB. Dalam kurun beberapa dekade kemudian, rezim tata dunia baru tersebut secara relatif berhasil ditegakkan sebagai suatu kemapanan internasional, walaupun di dalam dirinya terdapat kerawanan-kerawanan yang berpotensi menimbulkan krisis sistemik.

Setidaknya saya mencatat ada tiga kerawanan:

Pertama, bahwa perangkat-perangkat aturan yang diperlukan sebagai kelengkapan dari rules-based order yang diidealisasikan belum komplit. Masih banyak isu-isu menyangkut nilai-nilai dan aturan-aturan yang belum disepakati secara internasional. Misalnya aturan-aturan mengenai perbatasan (garis batas) perairan yang dituangkan dalam UNCLOS *(United Nations Convention on the Law of the Sea*) masih menyisakan berbagai masalah sehingga tidak sepenuhnya mampu menutup potensi-potensi sengketa batas-batas perairan antarnegara.

Indonesia memiliki pengalaman sengketa perbatasan dengan Malaysia di kawasan pulau Sipadan dan Ligitan dan belakangan dengan China di kawasan laut Natuna. Timor-Timur berhadapan dengan Australia di selat Timur, Turki bersengketa dengan Siprus di ladang minyak dan gas di perairan laut Tengah bagian timur, dan lain sebagainya.

Kedua, desain struktural dari organisasi PBB itu sendiri oleh banyak anggota-anggotanya dipandang tidak mencerminkan kesetaraan univesal dengan adanya wewenang khsusus bagi anggota-anggota tetap dewan keamanan PBB terutama hak veto yang ada pada mereka.

Ketiga, sejumlah aktor global baik negara-negara atau penguasa-penguasanya, gerakan-gerakan dengan ideologi transnasional maupun korporasi-korporasi multinasional melakukan upaya-upaya untuk melemahkan skema rules-based order yang ada demi agenda-agenda dominasi global.

Dewasa ini perkembangan dinamika internasional semakin membangkitkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya bencana-bencana besar akibat ketegangan politik militer yang terus memuncak. Pada saat yang sama peran dan wibawa organisasi PBB terus merosot

sehingga organinasasi PBB cendrung disfungsional sebagai pengelola hubungan antara negara dalam pergaulan global.

Dunia seolah terjebak dalam kebimbangan yang luar biasa berbahaya, yaitu apakah tata dunia pascaperang dunia kedua ini masih layak untuk dipertahankan (PBB dan lainnya)? Apakah tata dunia ini punya kapastitas untuk mencegah bencana konflik global yang berpotensi meruntuhkan seluruh bangunan peradaban umat manusia? Kalau konstruksi tata dunia ini ditinggalkan, apa alternatifnya?

Apabila kebimbangan ini tidak segera menemukan jawaban yang menyakinkan, maka masa depan keberadaan umat manusia sebagai penduduk planet bumi ini sungguh terancam.

Perubahan Tatanan Dunia

Runtuhnya kemapanan peta politik global akibat perang dunia kedua dan lahirnya tatanan politik baru sesudah Piagam PBB. Sebelum perang dunia pertama, ada peta politik global yang mapan selama ratusan tahun, yakni peta politik dunia yang global didasarkan atas identitas-identitas komunal terutama yang bersifat keagamaan. Ada kerajaan-kerajaan dengan identitas Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Dua perang dunia meruntuhkan peta dunia yang sudah mapan tersebut, disusul dengan lahirnya konfigurasi poltik global yang baru, yang pada gilirannya digiring ke dalam tatanan politik baru berdasarkan konsensus internasional, konsensus setelah perang dunia kedua. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan fundamental baik di tingkat struktur politik internasional maupun di tingkat masyarakat-masyarakat lokal.

Perubahan-perubahan itu bergulir dalam skala yang luas, sehingga melahirkan wajah baru bagi peradaban umat manusia secara keseluruhan. Empat perubahan mendasar dapat kita tandai, yaitu:

(1) Perubahan tatanan politik internasional

(a) Pada masa lalu, hampir setiap negara atau kerajaan menyandang identitas agama. Pada masa kini, sebagian besar negara-negara yang ada telah melepaskan identitas agama dan menggantinya dengan identitas nasional.

(b) Pada masa lalu, tidak ada rezim perbatasan antarnegara, sehingga hubungan antarnegara berlangsung senantiasa dalam kerangka interaksi militer. Bahkan negara-negara yang secara geografis bersandingan satu dengan lain cenderung terjebak dalam perang abadi di garis batas jangkauan militer masing-masing. Saat ini, dengan adanya rezim internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka perbatasan antarnegara jauh

lebih terjamin kemapanannya sebagai batas-batas kedaulatan masing-masing.

(2) Perubahan demografi dan kewargaan

(a) Migrasi mengikuti aspirasi dan kontak-kontak ekonomi mendorong pergerakan manusia melintasi batas-batas negara, sehingga, pada masa kini, kita mendapati potret demografis yang sangat heterogen di berbagai kawasan, termasuk tumbuhnya komunitas muslim dalam jumlah yang signifikan di kawasan-kawasan yang pada masa lalu hanya memiliki penduduk non-muslim saja, seperti di Eropa, Amerika, dan kawasan-kawasan lainnya.

(b) Pada masa lalu, karena setiap negara atau kerajaan menggunakan identitas agama, maka status kewarganegaraan didasarkan pula atas identitas agama dari penduduknya, dan supremasi agama penguasa dijadikan landasan penilaian. Penduduk yang memeluk agama berbeda dari agama negara cenderung dipersekusi atau sekurang-kurangnya diberi status sebagai warga kelas dua. Pada masa kini, dengan dilepaskannya identitas agama, maka negara mentolerir keragaman identitas agama di antara warganya.

(3) Perubahan dalam standar norma-norma (*'urf*)

Praktik-praktik mengabaikan sebagian hak-hak kemanusiaan yang pada masa lalu ditolerir, seperti perbudakan, penjajahan antarbangsa, persekusi dan diskriminasi atas minoritas, kini secara umum dipandang sebagai kejahatan menurut standar norma-norma keadaban.

(4) Globalisasi

Globalisasi yang didorong oleh interaksi-interaksi ekonomi dan perkembangan teknologi telah menjadikan batas-batas fisik, yaitu batas-batas geografis, maupun batas-batas politik antarbangsa semakin kurang relevan dalam dinamika sosial. Perkembangan teknologi juga telah secara dramatis menjembatani jarak fisik,

sehingga setiap peristiwa yang terjadi di manapun berpotensi memicu rangkaian konsekuensi-konsekuensi global.

Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut masyarakat internasional masih bergulat untuk mengatasi berbagai ancaman konflik, baik yang merupakan warisan dari konstruksi peradaban lama maupun yang lahir dari dinamika politik yang baru. Yang jelas bahwa fokus pergulatan masyarakat lnternasional dalam hal ini adalah mencegah terulangnya perang-perang besar seperti perang dunia pertama dan kedua.

Posisi Agama-Agama dan Tanggapan Islam terhadap Tata Dunia Baru

Agama-agama sejak lahirnya mengibarkan klaim sebagai penyelamat umat manusia mengemban dalam dirinya tendesi supremasis untuk menundukkan seluruh dunia di bawah otoritas agama yang bersangkutan, tak terkecuali Islam. Itu sebabnya dalam sejarah strukur otoritas agama senantiasa mengembangkan kapasitas ekspansi untuk memperluas jangkauan pengaruhnya.

Perebutan supremasi antara agama inilah yang menjadi penyumbang terbesar dari konstruksi peradaban sebelum perang dunia pertama. Setelah konsesus internasional paska perang dunia kedua itu posisi normatif dari agama-agama masih tetap pada posisi yang mereka pegang dalam konteks peradaban lama sehingga tendensi dasar dari agama-agama yaitu ekspansionisme dan kompetisi supremasis berbenturan dengan kepentingan masyarakat internasional untuk mencegah konflik.

Di pihak lain sejauh menyangkut Islam masalah mendasar ini dipertajam dengan trauma kekalahan militer pada dunia pertama yang disusul dengan kolonisasi atau penjajahan wilayah berpenduduk muslim—yang sebagai besar merupakan bekas Turki Utsmani—oleh kerajaan-kerajaan Kristen Barat.

Hal ini melahirkan *mindset* yang dominan di dunia Islam yang memandang tata dunia baru hasil konsensus internasional pasca-Perang Dunia Kedua sebagai kelanjutan dan peneguhan kemenangan Kristen-Barat atas Islam. Walaupun realitas politik yang baru telah lahir di sebagian dunia Islam dengan format, struktur, dan norma-norma politik yang baru, wawasan keagamaan yang dominan masih merujuk kepada wacana yang mapan sejak masa kejayaan Turki Ustmani.

Situasi ini melestarikan kecenderungan resistensi dunia Islam terhadap tata dunia baru tersebut dan dengan sendirinya menghidupi api

permusuhan didalam sekam tata dunia yang masih penuh ketidaksempurnaan. Akar dari masalah ini adalah kerawanan-kerawanan yang ada dalam hubungan antara wawasan keislaman yang mapan dengan konstruksi normatif dari tata dunia baru tersebut.

Dalam hal ini dapat diidentifkasi empat pusat kerawanan.

Pertama, menyangkut pandangan tentang status non-muslim di tengah kehidupan bermasyarakat dan norma-norma menyangkut interaksi antara muslim dengan non-muslim. Kedua, pandangan tentang model negara yang diterima oleh syariat. Ketiga, pandangan yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan hukum negara sebagai hasil dari proses-proses politik modern. Keempat, pandangan menyangkut penyikapan terhadap konflik-konflik yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam.

Apabila wawasan keislamanan terutama yang berkaitan dengan empat pusat kerawanan di atas tidak berubah maka Islam akan terus menjadi kekuatan yang mengancam stabilitas tata dunia dan berpotensi mendorong terjadinya konflik-konflik besar yang mengancam keamanan global. Di sisi lain, perubahan-perubahan dalam wawasan keislamana itu sendiri menuntut dipenuhinya prasyarat-prasyarat dan disiplin prosedural yang tidak mudah dipenuhi.
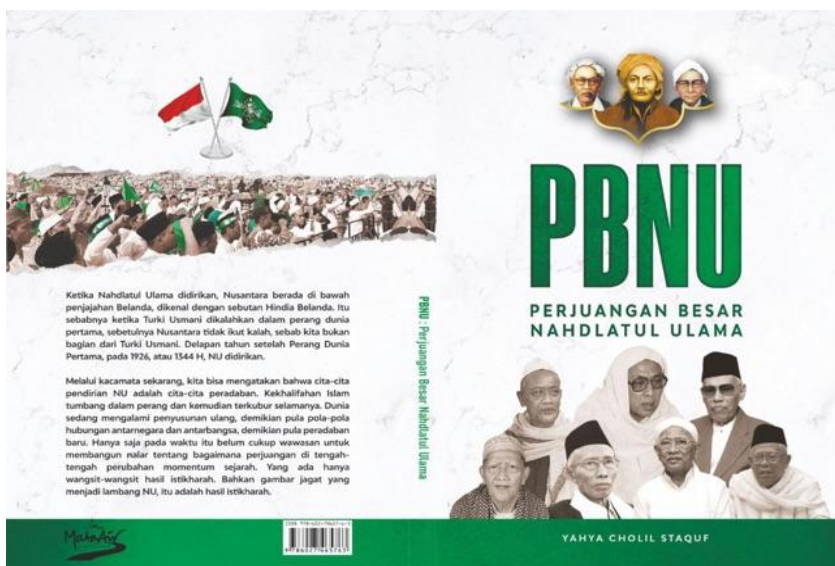
Syariat dan Politik

Sebagai *taklîf* (beban) individu, pengamalan syariat adalah wujud ketaatan kepada Tuhan berdasarkan iman. Pada tingkat kolektif masyarakat, syariat berfungsi sebagai sendi tertib sosial, sedangkan tertib sosial itu sendiri pada dasarnya adalah konstruksi politik. Itulah sebabnya sejumlah aspek dalam syariat melibatkan kategori-kategori politik, dan penerapannya di dalam masyarakat mensyaratkan koersi (pemaksaan) politik oleh otoritas yang dianggap sah.

Selama lebih dari tiga belas abad, yaitu sejak Rasulullah SAW berhasil menciptakan tatan sosial politik bagi masyarakat Madinah sampai dengan runtuhnya Turki Utsmani, kehidupan kolektif umat Islam dikerangkai dengan suatu model politik yang kurang lebih tetap atau konstan, tanpa perubahan yang berarti. Maka, selama lebih dari tiga belas abad itu pula ortodoksi syariat tumbuh dan mapan sebagai konstruksi tertib sosial yang saling berkelindan, tak terpisahkan dengan model konstruksi politik tersebut. Model ortodoksi syariat dan konstruksi politik yang mapan laksana sepasang jodoh atau dua sisi mata uang yang sama.

Dengan runtuhnya Turki Utsmani, model konstruksi politik yang tumbuh selama tiga belas abad itu pun hilang begitu saja, maka ortodoksi syariat kehilangan pasangannya pula. Ketika konstruksi-konstruksi politik yang baru kemudian bermunculan, ortodoksi syariat tidak dapat secara seirama menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.

Kesulitan ortodoksi syariat beradaptasi dengan perubahan itu berakar pada dua hal.

Pertama, karena dalam ortodoksi syariat itu dikembangkan disiplin paradigmatik yang mencegah atau membatasi perubahan-perubahan. Kedua, model otoritas politik yang disemati wewenang untuk

menginisiasi dan menyangga perubahan-perubahan dalam ortodoksi syariat itu sendiri sudah tidak ada. Kepincangan ini menjadikan operasionalisasi syariat (*tathbîq asy-syarî'ah*) suatu arena pergulatan yang cenderung kacau akibat hilangnya koherensi antara kerangka konseptual ortodoksi syariat dengan realitas obyektif dari konstruksi politik yang tersedia.

Konstruksi negara bangsa yang merupakan basis dari tata dunia hari ini tidak menyediakan fungsi hakim sebagaimana disyaratkan dalam *tathbîq asy-syarî'ah*. Bahkan, negara-negara yang mengklaim identitas Islam pun, secara konseptual, tidak punya kapasitas untuk menyediakan pemangku peran *hâkim* yang dapat diterima universal oleh dunia Islam seluruhnya. Sebabnya, tidak satu pun dari negara-negara Islam itu memiliki legitimasi sebagai wakil konstruksi politik Islam sebagaimana yang disyaratkan dalam kerangka kerja ortodoksi syariat, persis karena masing-masing negara Islam dibangun di dalam kerangka kerja negara-bangsa.

Pilihan-Pilihan dan Konsekuensi-Konsekuensi Obyektif

Hingga saat ini, dunia masih dirundung konflik ketidakadilan dan aniaya. Permusuhan atas nama agama masih terus berlangsung di banyak kawasan. Eksploitasi politik dan ekonomi yang tidak adil pun merupakan pemandangan yang lazim di mana-mana. Doktrin Islam menunut koheresi antara iman, wawasan keagamaan, dan tindakan atau amal perbuatan.

Di dalam syariat yang mapan, menegakkan *al-imâmah al-'uzhmâ* sebagai *hâkim* universal dipandang sebagai kewajiban mutlak. Kenyataan bahwa sejak berakhirnya Daulah Umayyah kesatuan *imâmah* tidak terjadi dan tidak pernah lagi terjadi hingga sekarang. Berdirinya Daulah Abbasiyah di Baghdad diiringi oleh berdirinya Daulah Bani Ahmar di Qordoba di Spanyol. Bahkan, di kemudian hari Turki Utsmani yang tegak sebagai Daulah yang paling berpengaruh di dunia Islam pada masanya tetap saja harus berbagi wilayah politik dengan daulah-daulah Islam lainnya: Tinbuktu di Afrika, Syafawi di Persia, Mughal di India, dan lain sebagainya.

Para ulama pada masa-masa itu mentolerir ketiadaan *imâmah* tunggal dengan alasan kedaruratan akibat luasnya wilayah yang menyulitkan konsolidasi, tetapi alasan obyektif dalam realitas adalah kemustahilan politik dari pusat-pusat kekuasaan yang ada untuk tunduk satu sama lain. Sementara itu, menegakkan satu *imâmah* tunggal bagi seluruh umat Islam tetap dipertahankan sebagai cita-cita yang wajib diperjuangkan.

Jelas bahwa ada masalah besar yang tidak terpecahkan selama berabad-abad, yaitu inkoherensi antara wawasan normatif dengan realitas obyektif, kesenjangan antara wawasan syariat dengan *tathbîq*-nya. Masalah ini terus membesar dan semakin kompleks sehingga yang kita dapati hari ini adalah konfigurasi yang sangat dalam pergulatan politik terkait syariat.

Pada dasarnya, di tengah keseluruhan lanskap realitas global hari ini, dunia Islam menghadapi dua pilihan: (1) apakah akan kembali kepada wawasan syariat lama?; (2) ataukah mengembangkan wawasan baru?

Kalau kita memaksakan *tathbîq* atas dasar wawasan lama, maka yang kita dapati adalah konstruksi sosial-politik yang disyaratkan untuk menopang *tathbîq* itu sendiri. Di dunia Islam sudah tidak ada lagi setelah keruntuhan *khilâfah* Turki Ustmani. Memaksakan upaya mendaulat *al-imâmah al-'uzhmâ* di tengah keragaman sistem politik yang sudah mapan di dalam realitas, konsekwensinya adalah juga kekacauan yang bahkan lebih besar lagi karena negara-negara yang sudah ada dipaksa bubar, yang merupakan negara-negara di mana umat Islam saat ini tinggal. Maka, jelas bahwa pilihan kembali kepada wawasan lama dalam kenyataannya membawa konsekwensi-konsekwensi yang bertentangan dengan—bahkan meruntuhkan—*maqâshid asy-syarî'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.

Bahkan pula, hal itu secara langsung bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri, karena akan menyebabkan kehancuran yang meluas terhadap institusi agama dan tempat ibadah, jiwa, akal, keturunan (keluarga), dan harta. Bagaimana mungkin kita memaksakan apa yang kita anggap sebagai syariat di satu sisi, sementara di sisi lain jelas-jelas membawa konsekwensi keruntuhan *maqâshid*-nya? Dengan demikian pilihan pertama ini tertolak.

Sebagai alternatifnya adalah mengubah seperangkat pandangan fikih yang telah mapan sebagaimana disebut di atas. Di dalam fikih itu sendiri kita mengenal kaidah: "Hukum itu ada dan tidak adanya berputar mengikuti *'illat*-nya (*al-hukm yadûru ma'a 'illatihi wujûdan wa 'adaman*)." Berdasarkan prinsip ini, mengubah pandangan fikih yang telah mapan tentang ketidakrelevanan untuk kembali mendirikan *al-imâmah al-'uzhmâ* atau *khilâfah* memerlukan pendekatan yang dianggap sah dalam pandangan fikih.

Bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia, atau negara *khilâfah*, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat.

Cita-cita mendirikan kembali negara khilâfah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan non-Muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi.

Karena itu cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia (*al-ummah al-islâmiyyah*) adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-Muslim, serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia anak cucu Adam (*ukhuwwah basyariyyah*), seperti yang disuarakan Nahdlatul Ulama sejak tahun 1984.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, Piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktik-praktik biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, Piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai, harmonis, dan adil.

Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatupadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara *khilâfah*, kami memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antargolongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi yang seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariat. **[ض]**

Ketika Nahdlatul Ulama didirikan, Nusantara berada di bawah penjajahan Belanda, dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Itu sebabnya ketika Turki Usmani dikalahkan dalam perang dunia pertama, sebetulnya Nusantara tidak ikut kalah, sebab kita bukan bagian dari Turki Usmani. Delapan tahun setelah Perang Dunia Pertama, pada 1926, atau 1344 H, NU didirikan.

Melalui kacamata sekarang, kita bisa mengatakan bahwa cita-cita pendirian NU adalah cita-cita peradaban. Kekhalifahan Islam tumbang dalam perang dan kemudian terkubur selamanya. Dunia sedang mengalami penyusunan ulang, demikian pula pola-pola hubungan antarnegara dan antarbangsa, demikian pula peradaban baru. Hanya saja pada waktu itu belum cukup wawasan untuk membangun nalar tentang bagaimana perjuangan di tengah- tengah perubahan momentum sejarah. Yang ada hanya wangsit-wangsit hasil istikharah. Bahkan gambar jagat yang menjadi lambang NU, itu adalah hasil istikharah.